

**STABILITAS PEREKONOMIAN INDONESIA PERIODE 2004-
2024**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Program Studi Ekonomi Pembangunan*



Oleh:

Nama :NIGO FUTUA
NPM 2105180021
Program Studi :Ekonomi Pembangunan

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN TUGAS AKHIR

Panitia Ujian Strata -I Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Jum'at, 11 Juli 2025, pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang :

MEMUTUSKAN

Nama : NIGO FUTUA
NPM : 2105180021
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Judul Tugas Akhir : STABILITAS PEREKONOMIAN INDONESIA PERIODE 2004-2024

DINYATAKAN : (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

Dra. Hj. ROSWITA HAFNI, M.Si.

Penguji II

HASTINA FEBRIATY, SE., M.Si

Pembimbing

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, S.E., M.Si

Panitia Ujian

Ketua

Assoc. Prof. Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si., CMU

Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Tugas akhir ini disusun oleh:

Nama Lengkap : Nigo Futua

N.P.M : 2105180021

Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN

Alamat Rumah : JL. Ismailiyah No. 144

Judul Tugas Akhir : Stabilitas Perekonomian Indonesia Periode 2004-2024

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan tugas akhir.

Medan, 18 Juni 2025

Pembimbing Tugas Akhir

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, S.E., M. Si

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, S.E., M. Si

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, S.E., M. Si, CMA



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Nigo Futua

N.P.M : 2105180021

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Judul Tugas Akhir : Stabilitas Perekonomian Indonesia Pada Pemerintahan Joko Widodo

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Tugas akhir	Paraf	Keterangan
7-11-2024	Bimbingan Tema dan judul		
15-11-2024	Pengajuan permohonan judul penelitian		
01-12-2024	Bab 1 : Mendesain Latar Belakang		
08-12-2024	Bab 1 : Merevisi Latar Belakang		
17-12-2024	Bab 1 : Membuat identifikasi dan Batasan Masalah		
24-12-2024	Bab 1 : Menambahkan Data dan Menganalisis Datanya		
01-01-2025	Bab 1 : Merumuskan Masalah dan tujuan penelitian, serta manfaat		
09-01-2025	Bab 2 : Menambahkan teori, regulasi penelitian terdahulu, harapan penelitian		
16-01-2025	Bab 3 : Menambahkan definisi operasional tempat dan waktu penelitian, jenis sumber data, Model estimasi dan teknik pengumpulan data.		
23-01-2025	Bab 3 : Merevisi Teknik analisis Data dan model estimasi.		
10-02-2025	Bab 3 : Merevisi model estimasi		
20-02-2025	ACC SEMPRO !		

Medan, 20 Februari 2025

Diketahui/Disetujui

Ketua Program Studi

Ekonomi Pembangunan

Pembimbing Tugas Akhir

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, S.E., M. Si

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, S.E., M. Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UIN
Inggris | Cerdas | Terampil

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nigo Futua
N.P.M : 2105180021
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Judul Tugas Akhir : Stabilitas Perekonomian Indonesia Pada Pemerintahan Jokowi Dodo

Dengan ini menyatakan bahwa tugas akhir saya yang berjudul "**Stabilitas Perekonomian Indonesia Pada Pemerintahan Jokowi Dodo**" bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain, kecuali pada bagian- bagian yang dirujuk sumbernya.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya

Yang Menyatakan

Nigo Futua



ABSTRAK

Stabilitas Perekonomian Indonesia Periode 2004-2024

Nigo Futua

Program Studi Ekonomi Pembangunan

Email : nigofutua007@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis stabilitas perekonomian Indonesia selama periode 2004–2024 dengan membandingkan indikator-indikator makroekonomi utama pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi), yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran, dan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan analisis data panel untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi stabilitas ekonomi nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada era SBY, pertumbuhan ekonomi cenderung lebih tinggi namun inflasi fluktuatif, sementara pada era Jokowi pertumbuhan ekonomi relatif stabil namun sempat berkontraksi akibat pandemi COVID-19. Inflasi lebih terkendali, tingkat pengangguran menurun secara bertahap, dan angka kemiskinan menunjukkan tren penurunan seiring dengan kebijakan pembangunan infrastruktur dan bantuan sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kombinasi kebijakan ekonomi di kedua era kepemimpinan memiliki kontribusi signifikan terhadap stabilitas makroekonomi Indonesia. Hasil ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengambil kebijakan dalam merancang strategi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci : stabilitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, kemiskinan,

SBY, Jokowi, Indonesia 2004–2024.

ABSTRACT

The Stability of Indonesia's Economy in the 2004–2024 Period

Nigo Futua

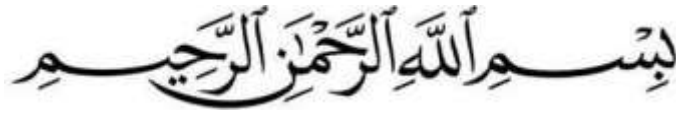
Development Economics Study Program

Email : nigofutua007@gmail.com

This study aims to analyze the stability of Indonesia's economy from 2004 to 2024 by comparing key macroeconomic indicators during the administrations of Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) and Joko Widodo (Jokowi): economic growth, inflation, unemployment, and poverty. The research adopts a descriptive quantitative approach using secondary data from Statistics Indonesia (BPS) and panel data analysis to identify the factors influencing national economic stability. The findings reveal that during SBY's era, economic growth was relatively higher but inflation was more volatile, while under Jokowi, growth remained stable but contracted due to the COVID-19 pandemic. Inflation was more controlled, unemployment gradually declined, and poverty levels showed a downward trend, supported by large-scale infrastructure development and social assistance programs. The study concludes that the combination of economic policies implemented during both administrations significantly contributed to Indonesia's macroeconomic stability. These findings are expected to provide valuable input for policymakers in formulating inclusive and sustainable economic development strategies.

Keywords: economic stability, economic growth, inflation, unemployment, poverty, SBY, Jokowi, Indonesia 2004–2024.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil'alamiin. Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan Skripsi yang berjudul **Stabilitas Perekonomian Indonesia Periode 2004-2024**. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Baginda Rasulullah SAW beserta keluarganya, para sahabat dan seluruh pengikut Beliau yang insya Allah tetap istiqomah hingga akhir zaman kelak, Amin. Dengan selesainya penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Adapun ungkapan terima kasih ini penulis tujukan kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta Rezeki-Nya yang luar biasa serta nikmat iman dan nikmat Kesehatan kepada saya. Dan atas izinnya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Terima kasih kepada Orang Tua Saya Bapak Aرسال dan ibu Evi Yanti yang telah berjuang mengasuh, mendidik, melahirkan saya kedunia, memberikan semangat dan doa yang tiada henti sehingga saya bisa berada di titik ini berkat kedua orang tua hebat saya.
3. Kepada abang dan kakak saya yang selalu memberi semangat kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Prof Dr. H. Agussani, MAP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. H. Januri S.E., M.M., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.
6. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE., M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE, M.Si. selaku wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Dr. Prawidya Hariani RS, Selaku Dosen Pembimbing dan Ketua Jurusan Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Ibu Dra. Hj. Roswita Hafni M.Si., selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Seluruh Dosen mata kuliah Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya Prodi Ekonomi Pembangunan yang telah memberikan ilmunya yang bermanfaat, semoga menjadi amalan di akhirat kelak.
11. Bapak / Ibu Biro Fakultas Ekonomi yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan berkas-berkas yang dibutuhkan dalam Akademik .
12. Kepada sahabat saya yang selalu memeberikan semangat dan dukungan (rinaldi,febby,muda,adi,tohir,fira,rohde,dini,iyen,citra) terima kasih karena selalu membersamai dalam penulisan skripsi ini.
13. Kepada temen seimbangin saya dalam penulisan skrpsi ini (Alyssia, Sally, Meli, Ramadhan).
14. Kepada teman-teman seperjuangan saya serta rekan sekelas masa

perkuliahan, dan teman-teman dekat saya yang telah memberi informasi mengenai perkuliahan, dan memberi semangat kepada saya.

15. Terima kasih untuk diri saya sendiri Nigo Futua, yang sudah mau bertahan dan berjuang dalam penulisan skripsi ini walaupun banyak sekali rintangan yang di telah di lalui dan fase-fase berat yang dilalui penulis mampu bangkit dan menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat berguna bagi semua pihak dalam menerapkan ilmu. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penulisan tugas akhir ini. Terimakasih, Wassamu'alaikum Wr.Wb

Medan, April 2025

Penulis,

Nigo Futua

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	9
1.3. Batasan Masalah	10
1.4. Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian.....	10
1.4.1 Rumusan Masalah	10
1.4.2 Tujuan Penelitian	10
1.5. Manfaat Penelitian	11
1.5.1 Manfaat Akademik.....	11
1.5.2 Manfaat Non-Akademik	11
BAB II	12
LANDASAN TEORI	12
2.1 Uraian Teori.....	12
2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi.....	12
2.1.2 Inflasi	30
2.1.3 Pengangguran	33
2.1.4 Kemiskinan	38
2.2 Regulasi Pemerintah	40
2.3 Peneliti Terdahulu.....	43
2.4 Kerangka Penelitian	49
2.4.1. Tahap Penelitian.....	49
2.4.2 Kerangka Analisis Penelitian	50

2.4.3 Kerangka Konseptual Model Estimasi Ekonomi terkait Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. (Data Panel)	50
2.5 Hipotesis	51
BAB III.....	52
METODE PENELITIAN	52
3.1 Pendekatan Penelitian	52
3.2 Defenisi Operasional.....	52
3.3 Tempat Dan Waktu Penelitian	53
3.3.1. Tempat Penelitian.....	53
3.3.2 Waktu Penelitian	53
3.4 Jenis Data dan Sumber Data.....	53
3.4.1. Jenis Data	53
3.4.2 Sumber Data	54
3.5. Teknik Pengumpulan Data	54
3.6 Model Estimasi	54
3.7 Metode Estimasi	55
3.8 Teknik Analisis Data	56
3.8.1 Melakukan Analisis Ekonomi Secara Deskriptif tentang pertumbuhan ekonomi inflasi, pengangguran, kemiskinan tahun 2004-2024	56
3.8.2 Melakukan Analisis Analisa Model Ekonometrika untuk Mengetahui Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi (PE) tahun 2014-2015 Menggunakan data (Panel).....	56
2. Pengujian (Test Diagnostic)	57
3. Perumusan Hipotesis	57
4. Uji stastitik yang digunakan adalah uji t. Dimana t hitung adalah	58
Kreteria Uji.....	58
c. Uji Asumsi Klasik	60
3.8.3 Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Berdasarkan Provinsi di Indonesia Menggunakan Tipologi Klassen.....	63
BAB IV	65
HASIL DAN PEMBAHASAN	65
4.1 Gambaran Umum Indonesia.....	65
4.1.1 Kondisi Geografis Indonesia.....	65

4.1.2	Kondisi Demografi Indonesia.....	66
4.1.3	Perkembangan Ekonomi di Indonesia	69
4.1.3	Perkembangan Sosial di Indonesia.....	72
4.2	Analisis Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Pengangguran, Kemiskinan.....	75
4.2.1	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Masa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (2009-2024).....	75
4.2.2	Perkembangan Inflasi di Indonesia Masa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (2009-2024)	80
4.2.3	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia Masa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (2009-2024).....	85
4.2.4	Perkembangan Jumlah Penduduk Kemiskinan di Indonesia Masa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (2009-2024).....	89
4.3	Analisa Model Ekonometrika untuk Mengetahui Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi.....	94
4.3.1	Statistik Deskriptif Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi.....	94
4.3.2	Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	97
4.4	Analisis Tipologi Klassen.....	110
4.4.1	Analisis Tipologi Klassen Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi	110
BAB V		118
KESIMPULAN DAN SARAN		118
5.1	Kesimpulan	118
5.2	Saran	120
DAFTAR PUSTAKA.....		121
LAMPIRAN		123

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Pertumbuhan Ekonomi di masa SBY-Jokowi Tahun 2004-2024.....	2
Tabel 1. 2 Laju Inflasi era SBY-Jokowi Tahun 2004-2024	4
Tabel 1. 3 Tingkat Pengangguran Terbuka	6
Tabel 1. 4 Persentase Penduduk Miskin Tahun 2020-2024	8
 Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	43
 Tabel 3. 1 Defenisi Operasional Variabel Ekonometrika (Data Panel).....	52
Tabel 3. 2 Tipologi Klassen untuk Klasifikasi Daerah.....	64
 Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Indonesia (2020-2024).....	67
Tabel 4. 2 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (2018-2024)	69
Tabel 4. 3 Tingkat Inflasi Indonesia (2020-2024).....	71
Tabel 4. 4 Jumlah Penduduk Miskin Indonesia (2019-2024)	72
Tabel 4. 5 Garis Kemiskinan Indonesia (2019-2024).....	74
Tabel 4. 6 Laju Pertumbuhan Ekonomi Masa Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo Tahun 2005-2024.....	77
Tabel 4. 7 Laju Inflasi Masa Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo Tahun 2005-2024	82
Tabel 4. 8 Laju Pengangguran Terbuka Masa Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo Tahun 2005-2024.....	86
Tabel 4. 9 Laju Pertumbuhan Penduduk Miskin Masa Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo	91
Tabel 4. 10 Statistik Deskriptif Model	95
Tabel 4. 11 Hasil Olahan Regresi Linier Berganda.....	97
Tabel 4. 12 Hasil Regresi Setelah Menghapus Variabel JOM	98
Tabel 4. 13 Ringkasan Hasil Pengolahan Data Model Estimasi	99
Tabel 4. 16 Hasil Uji Multikolinearitas	106
Tabel 4. 17 Hasil Uji Auto Korelasi	108
Tabel 4. 18 Hasil Uji Korelasi Setelah Melakukan Perbaikan	108
Tabel 4. 19 Hasil Uji Hausman	109
Tabel 4. 20 Tipologi Klassen Berdasarkan Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi per Provinsi Tahun 2014	111
Tabel 4. 21 Tipologi Klassen Berdasarkan Pertumubuhan Ekonomi dan Inflasi per Provinsi Tahun 2024	115

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Fungsi Produksi	15
Gambar 2. 2 Output, Konsumsi dan Investasi	18
Gambar 2. 3 Depresiasi	18
Gambar 2. 4 Investasi, Depresiasi, dan Kondisi Mapan	20
Gambar 2. 5 Kerangka Analisis Penelitian	50
Gambar 2. 6 Kerangka Analisa Estimasi	50
 Gambar 4. 1 Jumlah Penduduk Menurut Provinsi (Dalam Ribuan) Tahun 2023...	 68
Gambar 4. 2 Jumlah Penduduk Menurut Provinsi (Dalam Ribuan) Tahun Pertumbuhan Ekonomi Masa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Tahun 2004- 2014	 75
Gambar 4. 3 Pertumbuhan Ekonomi Masa Joko Widodo Tahun 2015-2024	77
Gambar 4. 4 Tingkat Inflasi Masa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Tahun 2009-2013	 80
Gambar 4. 5 Tingkat Inflasi Masa Joko Widodo Tahun 2020-2024	82
Gambar 4. 6 Tingkat Pengangguran Terbuka Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Tahun 2004-2014	 85
Gambar 4. 7 Tingkat Pengangguran Terbuka Pemerintahan Joko Widodo Tahun 2015-2024	 87
Gambar 4. 8 Persentase Penduduk Kemiskinan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Tahun 2004-2014	 89
Gambar 4. 9 Jumlah Penduduk Miskin Pemerintahan Joko Widodo Tahun 2015- 2024	 91
Gambar 4. 10 Scatterplot Model	107
Gambar 4. 11 Tipologi Klassen Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Tahun 2014	 110
Gambar 4. 12 Tipologi Klassen Berdasarkan Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Tahun 2024	 114

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pentingnya pembangunan ekonomi pada suatu negara mempunyai tujuan untuk mengurangi kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran. Usaha untuk meningkatkan pembangunan ekonomi diantaranya dengan memperluas kesempatan kerja agar tingkat pengangguran berkurang. Sehingga, pembangunan pada semua sektor ekonomi menggunakan peningkatan kesempatan kerja khususnya melalui pengembangan kegiatan yang banyak menyerap tenaga kerja.

Pertumbuhan ekonomi merujuk pada peningkatan pendapatan atau produksi nasional di suatu negara dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu parameter penting dalam menilai keberhasilan pembangunan suatu negara. Belakangan ini, banyak negara yang aktif berupaya meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi mereka. Upaya ini dilakukan dengan cara meningkatkan output secara berkelanjutan, yang didukung oleh ketersediaan barang modal, teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki karakteristik yang berbeda, dipengaruhi oleh kondisi global serta kebijakan ekonomi masing-masing. Pada era SBY (2004-2014), pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai sekitar 5,8% per tahun, bahkan sempat menyentuh 6,5% pada 2011. Meskipun menghadapi krisis keuangan global 2008-2009, Indonesia tetap mampu mempertahankan pertumbuhan positif. Investasi asing relatif stabil, sementara

inflasi berkisar antara 5-8% akibat kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Selain itu, rasio utang luar negeri terhadap PDB berhasil ditekan dari sekitar 56% pada 2004 menjadi 26% pada 2014. (CNBC Indonesia, 2023)

Sementara itu, pada era Jokowi (2014-sekarang), pertumbuhan ekonomi rata-rata sedikit lebih rendah, sekitar 5% per tahun sebelum pandemi COVID-19. Fokus utama kebijakan ekonomi Jokowi adalah pembangunan infrastruktur besar-besaran, seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara untuk meningkatkan konektivitas ekonomi. Namun, pandemi COVID-19 pada 2020 menyebabkan ekonomi mengalami kontraksi sebesar -2,07%, pertama kali sejak krisis 1998. Meskipun demikian, ekonomi mulai pulih dengan pertumbuhan 5,3% pada 2022. Kemudian pada tahun 2023 dan 2024 pertumbuhan ekonomi sebesar 5%. Dapat dilihat pada data tabel perbandingan pertumbuhan ekonomi masa pemerintahan SBY – Jokowi:

(wikipedia, 2024).

Tabel 1. 1 Pertumbuhan Ekonomi di masa SBY-Jokowi Tahun 2004-2024

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2020	-2,07
2021	3,69
2022	5,31
2023	5,05
2024	5,03

Sumber : Badan Pusat Statistik

Pada data tabel diatas menjelaskan bahwa Pertumbuhan ekonomi pada era SBY (2004-2014) rata-rata mencapai 5,78% per tahun, lebih tinggi dibandingkan era Jokowi (2014-2023) yang hanya 4,12% per tahun. SBY berhasil menjaga pertumbuhan stabil meski menghadapi krisis global 2008-2009, dengan puncak pertumbuhan 6,5% pada 2011, didukung oleh harga komoditas yang tinggi dan investasi asing yang kuat. Sementara itu, Jokowi lebih fokus pada pembangunan

infrastruktur, tetapi pertumbuhan ekonomi stagnan di sekitar 5% per tahun sebelum pandemi COVID-19. Krisis pandemi pada 2020 menyebabkan kontraksi -2,07%, meski ekonomi mulai pulih pada 2022 dengan pertumbuhan 5,31%. Kemudian pada tahun 2023 dan 2024 pertumbuhan ekonomi sebesar 5%. Perbedaan ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global, kebijakan fiskal, dan tantangan yang dihadapi masing-masing pemerintahan. Sehingga pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi pertumbuhan inflasi.

Inflasi merupakan salah satu indikator penting dalam perekonomian yang tidak bisa diabaikan, karena dapat mengakibatkan dampak yang sangat luas baik terhadap perekonomian maupun kesejahteraan masyarakat. Bagi perekonomian, inflasi yang tinggi dapat menyebabkan ketidakstabilan dan akan menurunkan gairah untuk menabung maupun berinvestasi, menghambat usaha dalam peningkatan ekspor, melambatnya pertumbuhan ekonomi, dan akan mengakibatkan bertambahnya tingkat pengangguran.

Pada era SBY (2004-2014), inflasi cenderung lebih tinggi dan fluktuatif dengan rata-rata 7,9% per tahun. Puncak inflasi terjadi pada tahun 2005 sebesar 17,11%, akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang signifikan. Selain itu, lonjakan inflasi juga terjadi pada 2008 (11,06%) dan 2013 (8,38%), yang disebabkan oleh kenaikan harga pangan dan energi, serta dampak krisis ekonomi global. Namun, ada beberapa tahun di mana inflasi bisa ditekan lebih rendah, seperti pada 2009 (2,78%) dan 2011 (3,79%), ketika harga-harga lebih stabil dan tekanan eksternal berkurang.

Sebaliknya, di era Jokowi (2014-2024), inflasi lebih terkendali dan relatif stabil dengan rata-rata 3,3% per tahun. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2024). *BPS Sebut Inflasi Tahunan Capai 2,84% pada Mei 2024*. Diakses dari (Badan Pusat Statistik (BPS)., n.d.) Reformasi subsidi energi yang dilakukan sejak 2015 membantu menekan volatilitas inflasi yang sebelumnya tinggi akibat kebijakan harga BBM. Inflasi sempat turun drastis pada 2020 menjadi 1,68%, akibat melemahnya permintaan selama pandemi COVID-19. Namun, pada 2022 inflasi meningkat menjadi 5,51%, didorong oleh kenaikan harga energi dan pangan akibat ketegangan geopolitik global. Memasuki tahun 2023 dan 2024, inflasi kembali menunjukkan tren menurun. tercatat sebesar 1,84%, mencerminkan efektivitas kebijakan pengendalian harga dan daya beli masyarakat yang masih terjaga (Laporan Investasi Nasional., n.d.).

Tabel 1. 2 Laju Inflasi era SBY-Jokowi Tahun 2020-2024

Tahun	Inflasi
2020	1,68
2021	1,56
2022	4,21
2023	2,61
2024	1,57

sumber :Badan Pusat Statistik

Pada era SBY (2004–2014), inflasi cenderung fluktuatif dengan lonjakan tinggi, seperti 17,11% pada 2005 akibat kenaikan harga BBM dan 11,06% pada 2008 karena krisis keuangan global. Meski sempat turun ke 2,78% pada 2009, inflasi kembali meningkat menjadi 8,38% pada 2013 akibat pelemahan rupiah dan kenaikan harga energi. Sementara itu, pada era Jokowi (2014-2024), inflasi lebih terkendali dengan tren penurunan. Setelah 6,36% pada 2015, inflasi terus menurun hingga 1,56% pada 2021, sebelum naik menjadi 4,21% pada 2022 akibat dampak global. Pada 2023 dan 2024, inflasi berhasil ditekan kembali ke 2,61% dan 1,57%.

Secara keseluruhan, inflasi pada era Jokowi lebih stabil dibandingkan era SBY, mencerminkan kebijakan ekonomi yang lebih fokus pada pengendalian harga dan stabilitas moneter. Inflasi yang stabil juga dapat mempengaruhi tingkat pengangguran dan juga kemiskinan.

Tingkat pengangguran di Indonesia mengalami dinamika yang berbeda selama era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi), dengan tren penurunan yang signifikan meskipun dihadapkan pada tantangan ekonomi global dan domestik. Pada awal pemerintahan SBY tahun 2004, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada pada angka 9,86%, yang saat itu masih dipengaruhi oleh dampak krisis ekonomi 1998 dan kurangnya pertumbuhan industri padat karya. Untuk mengatasi permasalahan ini, SBY menerapkan berbagai kebijakan yang berfokus pada stabilisasi ekonomi, peningkatan investasi, serta pengembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) guna menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Seiring waktu, program-program ini menunjukkan hasil yang positif dengan penurunan angka pengangguran secara bertahap hingga mencapai 5,94% pada tahun 2014 (Badan Pusat Statistik (BPS)., n.d.).

Memasuki era pemerintahan Jokowi pada tahun 2014, TPT tercatat sebesar 5,70%, sedikit lebih rendah dibanding akhir pemerintahan SBY. Jokowi berfokus pada pembangunan infrastruktur secara masif serta reformasi regulasi untuk meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan kerja, termasuk melalui Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) yang bertujuan mempermudah proses perizinan usaha. Katadata. (2024). *Jumlah Pengangguran Lulusan SMA Meningkat 2014-2024*. Diakses dari (Data Ketenagakerjaan Indonesia., n.d.).

Namun, tantangan muncul pada tahun 2015 ketika kondisi ekonomi global melemah, menyebabkan kenaikan angka pengangguran menjadi 5,81%. Seiring dengan pemulihan ekonomi dan berjalannya berbagai program ketenagakerjaan, angka ini kembali menurun. Krisis terbesar terjadi pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19, yang berdampak signifikan terhadap dunia usaha dan menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di berbagai sektor, terutama industri pariwisata, perhotelan, ritel, dan manufaktur. Akibatnya, angka pengangguran melonjak ke 6,26% pada tahun 2021, menjadi yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah meluncurkan berbagai program pemulihan ekonomi, seperti bantuan subsidi upah. Kartu Prakerja untuk pelatihan tenaga kerja, serta insentif bagi pelaku usaha agar tetap bertahan. Setelah situasi pandemi mulai terkendali dan aktivitas ekonomi kembali normal, tingkat pengangguran berangsur-angsur menurun hingga mencapai 4,91% pada tahun 2024, yang merupakan angka terendah dalam dua dekade terakhir. Data Indonesia. (2023). *Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia pada 2004-2023*.

Tabel 1. 3 Tingkat Pengangguran Terbuka 2020-2024

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
2020	7,07
2021	6,49
2022	5,86
2023	5,32
2024	4,91

sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Pada masa kepemimpinan SBY (2014), TPT cenderung mengalami penurunan secara stabil dari 5,94% pada 2014 menjadi 5,28% pada 2019. Penurunan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam mendorong pembangunan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, meski ada tantangan global dan domestik

yang mempengaruhi sektor-sektor tertentu. Pada masa Jokowi (2014-2024), TPT menunjukkan penurunan yang lebih signifikan setelah mengalami lonjakan besar pada 2020 dan 2021, akibat dampak pandemi COVID-19. TPT mencapai 7,07% pada 2020, namun kemudian menurun drastis hingga 4,91% pada 2024. Meskipun terdapat lonjakan pengangguran yang besar pada 2020, pemulihan ekonomi yang cepat dan kebijakan Jokowi dalam menciptakan lapangan kerja pasca-pandemi berhasil menurunkan tingkat pengangguran secara signifikan. Menurunnya tingkat pengangguran di Indonesia juga mempengaruhi jumlah dan persentase penduduk miskin.

Penduduk miskin di Indonesia selama era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan tren penurunan meskipun menghadapi tantangan ekonomi yang berbeda. Pada era SBY, persentase penduduk miskin pada tahun 2013 tercatat sebesar 11,47% dari total populasi, dengan jumlah sekitar 28,17 juta orang.

Pada pemerintahan Jokowi, program pengentasan kemiskinan lebih banyak difokuskan pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan bantuan sosial. Pada tahun 2014, tingkat kemiskinan berada di angka 11,25%, dan sempat turun menjadi 9,22% pada tahun 2019. Namun, pandemi COVID-19 yang melanda pada tahun 2020 menyebabkan lonjakan angka kemiskinan menjadi 10,19% pada tahun 2021 akibat kontraksi ekonomi. Pemerintah kemudian merespons dengan berbagai program bantuan sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), serta Kartu Prakerja. Hingga 2023, angka kemiskinan kembali turun ke level 9,36%. pandemi mulai terkendali

dan program pemulihan ekonomi berjalan, angka kemiskinan kembali menurun.

Pada September 2024, persentase penduduk miskin turun menjadi 8,57 %.

Tabel 1. 4 Persentase Penduduk Miskin Tahun 2020-2024

Tahun	Persentase Penduduk Miskin (%)
2020	10,19
2021	9,71
2022	9,57
2023	9,36
2024	8,57

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Pada tabel 1.4 bahwa Peningkatan angka kemiskinan pada tahun 2020 disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19, yang mengakibatkan perlambatan ekonomi, PHK massal, serta berkurangnya pendapatan masyarakat. Namun, pada tahun 2021, angka kemiskinan mulai menurun menjadi 9,71%, seiring dengan pemulihan ekonomi, program vaksinasi, serta berbagai bantuan sosial seperti Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Tren penurunan ini berlanjut pada tahun 2022 dan 2023, dengan angka kemiskinan mencapai 9,57% dan 9,36%, didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang stabil, penguatan UMKM, serta berbagai kebijakan pemberdayaan ekonomi. Pada tahun 2024, angka kemiskinan turun lebih signifikan menjadi 8,57%, mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam mengendalikan inflasi, meningkatkan investasi, serta memperkuat program bantuan sosial yang lebih terarah. Secara keseluruhan, meskipun sempat mengalami lonjakan akibat pandemi, angka kemiskinan di Indonesia berhasil ditekan berkat kebijakan pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, baik di era SBY maupun Jokowi, tren kemiskinan menunjukkan penurunan, meskipun sempat mengalami kenaikan akibat faktor

eksternal seperti pandemi. Kebijakan di era SBY lebih berfokus pada stabilisasi ekonomi dan perlindungan sosial dalam skala terbatas, sementara di era Jokowi terdapat program bantuan sosial yang lebih luas dan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan fakta yang ada disertai dengan data yang mendukung, terdapat permasalahan menjaga stabilitas ekonomi, Indonesia memiliki indikator yaitu, Pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran dan kemiskinan. Dengan demikian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait permasalahan tersebut. Maka untuk itu penelitian ini berjudul **“Stabilitas Perekonomian Indonesia Periode 2014-2024”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, terdapat beberapa masalah yang muncul, yaitu:

1. Fluktuasi inflasi akibat pandemi, kenaikan harga energi, dan faktor global mempengaruhi daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi.
2. Meskipun stabil di kisaran 5% per tahun, ekonomi Indonesia terdampak guncangan seperti pandemi COVID-19 yang menyebabkan kontraksi ekonomi.
3. Distribusi pendapatan belum merata, dengan kesenjangan antara kelompok berpenghasilan tinggi dan rendah, serta antarwilayah.
4. Program pemerintah berhasil menekan pengangguran, tetapi sektor informal masih mendominasi dan pandemi sempat meningkatkan angka pengangguran.

5. Proyek infrastruktur masif meningkatkan daya saing ekonomi, namun juga meningkatkan utang negara yang menimbulkan kekhawatiran keberlanjutan fiskal.
6. Program bantuan sosial membantu menekan kemiskinan, tetapi efektivitas distribusi dan ketergantungan masyarakat masih menjadi tantangan.

1.3. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah stabilitas makro ekonomi pertumbuhan ekonomi inflasi, pengangguran, kemiskinan tahun 2004-2024.

1.4. Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada penjelasan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perkembangan stabilitas indicator ekonomi makro pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, kemiskinan periode 2014-2024
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi stabilitas ekonomi di Indonesia periode 2004-2024
3. Bagaimana Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi menggunakan tipologi klassen per provinsi di indonesia tahun 2014 dan 2024

1.4.2 Tujuan Penelitian

1. Melakukan analisa ekonomi secara deskriptif tentang pertumbuhan ekonomi inflasi, pengangguran, kemiskinan periode 2004-2024.
2. Melakukan estimasi tentang pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, kemiskinan periode 2004-2024 .

3. Melakukan analisa tentang pertumbuhan ekonomi dan inflasi di Indonesia menggunakan tipologi klassen tahun 2004 dan 2024

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun dari hasil penelitian ini nantinya dapat diambil manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam Stabilitas perekonomian Indonesia periode 2004-2024.

1.5.1 Manfaat Akademik

1. Untuk memenuhi tugas akhir skripsi dalam memperoleh Sarjana Ekonomi
2. Sebagai bahan studi atau tambahan kajian bagi mahasiswa serta dosen dalam menganalisis penelitian terkait sector keuangan Negara di Indonesia.
3. Sebagai tambahan Literatur terhadap penelitian selanjutnya yang ingin melakukan penelitian menyangkut topic yang sama.

1.5.2 Manfaat Non-Akademik

1. Penelitian dapat memberikan rekomendasi konkret bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan strategi yang lebih efektif
2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai penambahan pengetahuan bagi masyarakat.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teori

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Menurut N. Gregory. Mankiw, (2003) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki masyarakat.

(Todaro, 2003) mengatakan ada tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi. Pertama, akumulasi modal yang meliputi semua bentuk dan jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan sumber daya manusia. Kedua, pertumbuhan penduduk yang beberapa tahun selanjutnya dengan sendirinya membawa pertumbuhan angkatan kerja. Ketiga, kemajuan teknologi. Selanjutnya ditambahkan oleh (N. Gregory. Mankiw, 2003) indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Ada beberapa alasan yang mendasari pemilihan pertumbuhan.

Teori pertumbuhan ekonomi menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi dan prosesnya dalam jangka panjang, penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor itu berinteraksi satu dengan yang lainnya. Sehingga menimbulkan terjadinya proses pertumbuhan. Empat faktor

yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yakni sumber daya manusia, sumber daya alam, pembentukan modal dan teknologi. Namun demikian, sumber daya alam tidak menjadi keharusan bagi keberhasilan ekonomi dunia modern. Hal ini sejalan dengan teori ekonomi neoklasik yang menitikberatkan pada modal dan tenaga kerja, serta perubahan teknologi sebagai sebuah unsur baru (Samuelson, P. A., & Nordhaus, 2001).

Beberapa teori pertumbuhan ekonomi, masing-masing teori mengemukakan faktor-faktor apa saja yang mendorong pertumbuhan, sebagai berikut:

1. Teori Pertumbuhan Solo dan Swan

Teori pertumbuhan neo-klasik dikembangkan oleh Solow dan Swan (1956). Model Solow-Swan menggunakan unsur pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajuan teknologi (eksogen), dan besarnya output yang saling berinteraksi. Perbedaan utama dengan model Harrod-Domar adalah masuknya unsur kemajuan teknologi. Selain itu, Solow-Swan menggunakan model fungsi produksi yang memungkinkan adanya substitusi antara kapital (K) dan tenaga kerja (L). Tingkat pertumbuhan berasal dari tiga sumber yaitu: akumulasi modal, bertambahnya penawaran tenaga kerja, dan kemajuan teknologi. Teknologi ini terlihat dari peningkatan skill atau kemajuan teknik sehingga produktivitas meningkat. Dalam model Solow-Swan, masalah teknologi dianggap fungsi dari waktu.

Teori Solow-Swan menilai bahwa dalam banyak hal mekanisme pasar dapat menciptakan keseimbangan, sehingga pemerintah tidak perlu terlalu banyak

mempengaruhi atau mencampuri pasar. Campur tangan pemerintah hanya sebatas kebijakan fiskal dan kebijakan moneter.

Penawaran barang dalam model Solow didasarkan pada fungsi produksi yang sudah dikenal, yang menyatakan bahwa output bergantung pada persediaan modal dan angkatan kerja. (N. Gregory. Mankiw, 2003)

$$Y = F(K, L)$$

Model pertumbuhan Solow mengasumsikan bahwa fungsi produksi melalui skala pengembalian konstan atau skala hasil konstan (constant returns to scale). Asumsi ini sering dianggap realistis, seperti akan kita lihat berikut ini, asumsi ini membantu untuk mempermudah analisis. Ingatlah bahwa fungsi produksi memiliki skala pengembalian konstan jika

$$zY = F(zK, zL)$$

Dengan z bernilai positif. Jika kita mengalikan modal dan tenaga kerja dengan z , kita juga mengalikan jumlah output dengan z . Fungsi produksi dengan skala pengembalian konstan memungkinkan kita menganalisis seluruh variabel dalam perekonomian dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja. Untuk melihat kebenarannya, gunakan $z = 1/L$ dalam persamaan di atas untuk mendapatkan

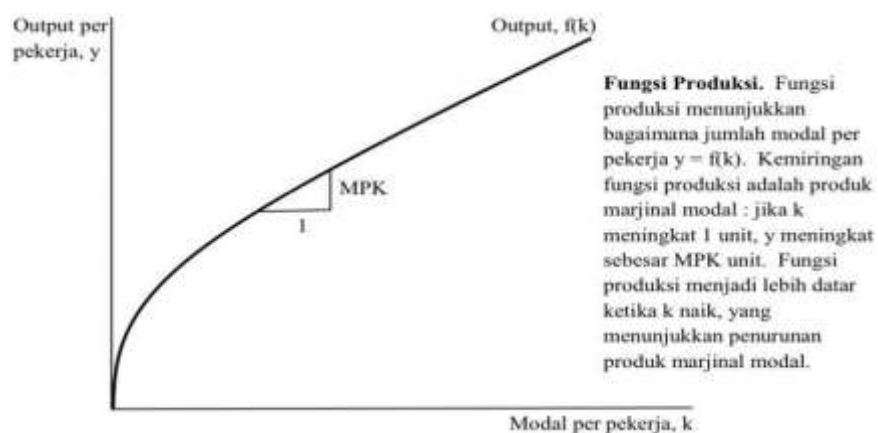
$$Y/L = F(K/L, 1)$$

Persamaan ini menunjukkan bahwa jumlah output per pekerja Y/L adalah fungsi dari jumlah modal per pekerja K/L . (Angka “1” adalah, tentu saja, konstan sehingga bisa dihilangkan asumsi skala pengembalian konstan menunjukkan bahwa besarnya perekonomian sebagaimana diukur oleh jumlah pekerja tidak mempengaruhi hubungan antara output per pekerja dan modal per pekerja.

Karena besarnya perekonomian tidak menjadi masalah, maka cukup beralasan untuk menyatakan seluruh variabel dalam istilah per pekerja. Kita nyatakan hal ini dengan huruf kecil, sehingga $y = Y/L$ adalah output per pekerja, dan $k = K/L$ adalah modal per pekerja selanjutnya kita bisa menulis fungsi produksi sebagai :

$$y = f(k),$$

Dimana kita definisikan $f(k) = F(k,1)$. Gambar 2.1 menunjukkan fungsi produksi ini, Ketika jumlah modal meningkat, kurva fungsi produksi menjadi lebih datar, yang mengindikasikan bahwa fungsi produksi mencerminkan produk marginal modal yang kian menurun. Ketika k rendah, rata-rata pekerja hanya memiliki sedikit modal untuk bekerja, sehingga satu unit modal tambahan begitu berguna dan dapat memproduksi banyak output tambahan. Ketika k tinggi, rata-rata pekerja memiliki banyak modal, sehingga satu unit modal tambahan hanya sedikit meningkatkan produksi. Fungsi produksi menunjukkan bagaimana jumlah modal per pekerja k menentukan jumlah output per pekerja $y = f(k)$. Kemiringan fungsi produksi adalah produk marginal modal : jika k meningkat 1 unit, y meningkat sebesar MPK unit. Fungsi produksi menjadi lebih datar ketika k naik, yang menunjukkan penurunan produk marginal modal.



Gambar 2. 1 Fungsi Produksi

Kemiringan dari fungsi produksi ini menunjukkan berapa banyaknya output tambahan yang dihasilkan seorang pekerja ketika mendapatkan satu unit modal tambahan. Angka yang diperoleh merupakan produk marginal modal MPK. Secara matematis, dapat ditulis

$$MPK = f(k + 1) - f(k)$$

Permintaan terhadap barang dalam model Solow berasal dari konsumsi dan investasi. Dengan kata lain, output per pekerja y merupakan konsumsi per pekerja c dan investasi per pekerja :

$$y = c + i$$

Model Solow mengasumsikan bahwa setiap tahun orang menabung sebagian s dari pendapatan mereka dan mengkonsumsi sebagian $(1-s)$. Dengan fungsi konsumsi sederhana :

$$c = (1 - s)y$$

Dimana s , tingkat tabungan, adalah angka antara nol dan satu. Perlu diingat bahwa berbagai kebijakan pemerintah secara potensial bisa mempengaruhi tingkat tabungan nasional, sehingga salah satu dari tujuan kita adalah mencari berapa tingkat tabungan yang diinginkan. Namun, sekarang kita asumsikan tingkat bunga s sudah baku. Untuk melihat apakah fungsi konsumsi ini berpengaruh pada investasi, substitusikan $(1-s)y$ untuk c dalam identitas perhitungan pendapatan nasional :

$$y = (1 - s)y + i.$$

Dan kita ubah lagi menjadi

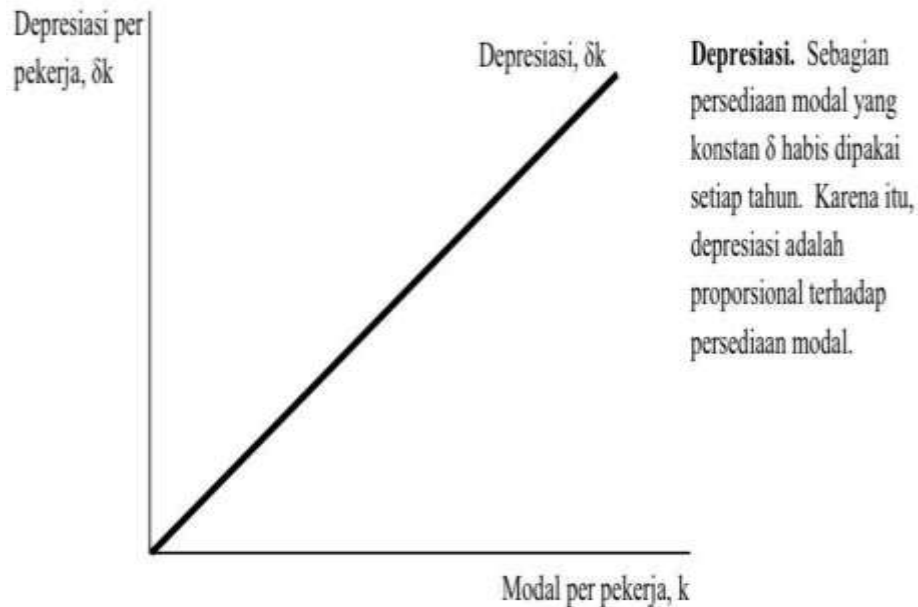
$$i = sy.$$

Persamaan ini menunjukkan bahwa investasi sama dengan tabungan, tingkat tabungan s juga merupakan bagian dari output yang menunjukkan investasi. Pada setiap momen, persediaan modal adalah determinan output perekonomian yang penting karena persediaan modal bisa berubah sepanjang waktu, dan perubahan itu bisa mengarah ke pertumbuhan ekonomi. Biasanya, terdapat dua kekuatan yang mempengaruhi persediaan modal: investasi dan depresiasi. Investasi mengacu pada pengeluaran untuk perluasan usaha dan peralatan baru, dan hal itu menyebabkan persediaan modal bertambah. Depresiasi mengacu pada penggunaan modal, dan hal itu menyebabkan persediaan modal berkurang.

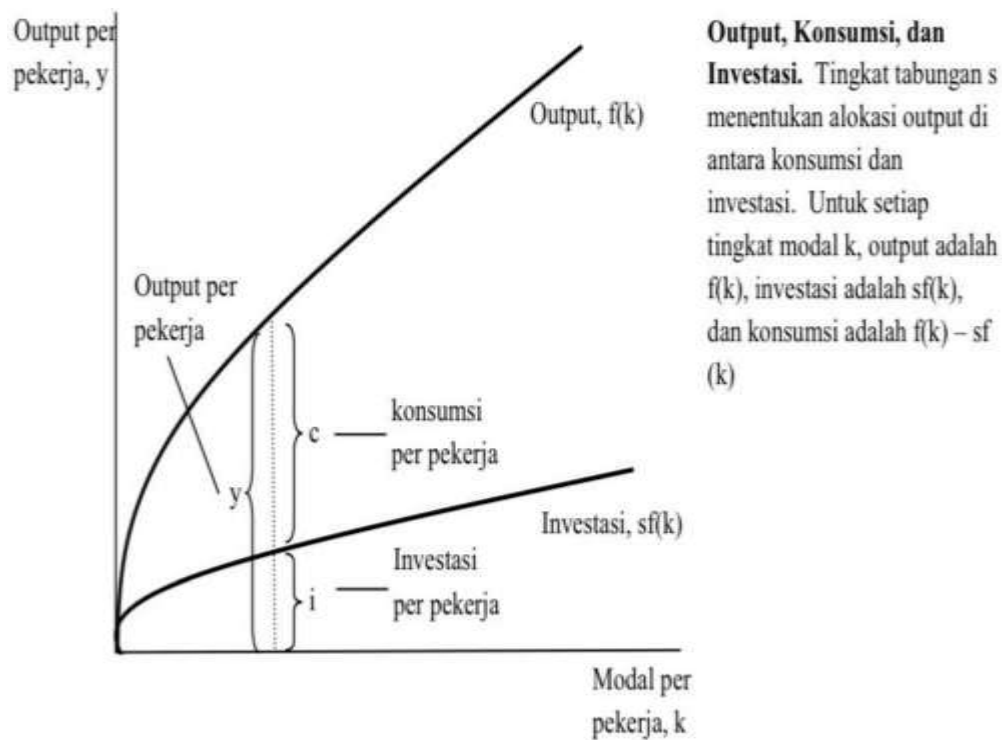
Sebagaimana dinyatakan sebelumnya, investasi per pekerja i sama dengan sy . Dengan mengganti fungsi produksi untuk y , kita bisa menunjukkan investasi per pekerja sebagai fungsi dari persediaan modal per pekerja :

$$i = sf(k).$$

Persamaan ini mengaitkan persediaan modal yang telah ada k dengan akumulasi modal baru i . Gambar 2.2 menunjukkan hubungan ini, gambar ini menunjukkan bagaimana untuk setiap nilai k , jumlah output ditentukan oleh fungsi produksi $f(k)$, dan alokasi output itu di antara konsumsi dan tabungan ditentukan oleh tingkat tabungan s . Untuk memasukkan depresiasi ke dalam model, kita asumsikan bahwa sebagian tertentu dari persediaan modal δ menyusut setiap tahun. Di sini δ disebut tingkat depresiasi.



Gambar 2. 2 Output, Konsumsi dan Investasi



Gambar 2. 3 Depresiasi

Kita bisa nyatakan dampak investasi dan depresiasi terhadap persediaan modal dalam persamaan ini :

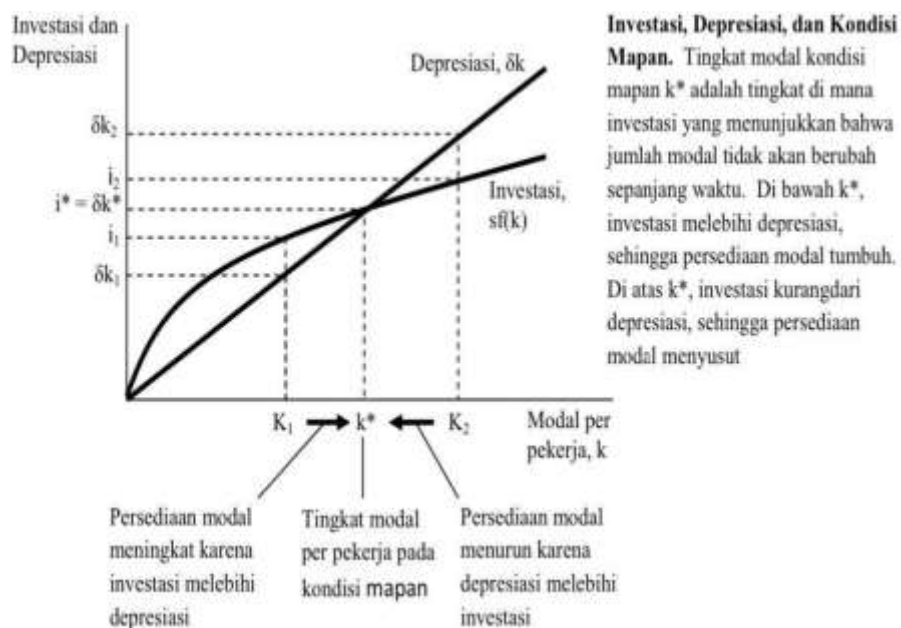
Perubahan persediaan modal = Investasi - Depresiasi

$$\Delta k = i - \delta k$$

Dimana Δk adalah perubahan persediaan modal antara satu tahun tertentu dan tahun berikutnya. Karena investasi i sama dengan $sf(k)$, kita bisa menulisnya sebagai,

$$\Delta k = sf(k) - \delta k$$

Gambar 2.3 memperlihatkan komponen dari persamaan ini investasi dan depresiasi untuk tingkat persediaan modal k yang berbeda. Semakin tinggi persediaan modal, semakin besar jumlah output dan investasi. Namun semakin tinggi persediaan modal, semakin besar pula jumlah depresiasinya. Sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 2.3, ada persediaan modal k^* di mana jumlah investasi sama dengan jumlah depresiasi. Jika perekonomian berada dalam tingkat persediaan modal ini, maka persediaan modal tidak akan berubah karena dua kekuatan investasi dan depresiasi beraksi di dalamnya secara seimbang. Yaitu, pada k^* , $\Delta k = 0$, sehingga persediaan modal k dan output $f(k)$ dalam kondisi mapan sepanjang waktu (tidak tumbuh atau menyusut). Karena itu, kita menyebutnya k^* sebagai tingkat modal pada kondisi mapan (*steady-state level of capital*).



Gambar 2. 4 Investasi, Depresiasi, dan Kondisi Mapan

Untuk melihat mengapa perekonomian selalu berakhir pada kondisi mapan, anggaplah bahwa perekonomian diawali dengan tingkat modal yang lebih kecil dari tingkat modal kondisi mapan, seperti tingkat k_1 dalam gambar 2.4. Dalam hal ini, tingkat investasi melebihi jumlah depresiasi. Sepanjang waktu, persediaan modal akan naik dan akan terus naik — bersamaan dengan output $f(k)$ — sampai mendekati kondisi mapan k^* .

Demikian pula, anggaplah bahwa perekonomian dimulai dengan tingkat modal yang lebih besar dari tingkat modal kondisi mapan, yaitu tingkat k_2 . Dalam hal ini, investasi lebih kecil daripada depresiasi : modal akan habis dipakai lebih cepat ketimbang penggantianannya. Persediaan modal akan turun, yang sekali lagi mendekati tingkat kondisi mapan. Sekali persediaan modal mencapai kondisi mapan, investasi sama dengan depresiasi, dan tidak ada tekanan terhadap persediaan modal untuk naik atau turun.

Tingkat modal yang memaksimalkan konsumsi pada kondisi mapan disebut tingkat kaidah emas. Nilai kondisi mapan k yang memaksimalkan konsumsi disebut tingkat modal kaidah emas dan dinyatakan k^* emas. Bagaimana kita bisa menyatakan bahwa suatu perekonomian berada pada tingkat kaidah emas? untuk menjawab pertanyaan ini, pertama kita harus menentukan konsumsi per pekerja pada kondisi mapan. Lalu kita bisa melihat kondisi mapan mana yang memberikan konsumsi paling besar.

Untuk mencari konsumsi per pekerja pada kondisi mapan, kita mulai dengan identitas perhitungan pendapatan nasional :

$$y = c + i$$

dan mengubahnya menjadi :

$$c = y - i$$

Konsumsi adalah output dikurangi investasi. Karena kita ingin mencari konsumsi pada kondisi mapan, maka kita ganti nilai kondisi mapan untuk output dan investasi. Output per pekerja pada kondisi mapan adalah $f(k^*)$, di mana k^* adalah persediaan modal per pekerja pada kondisi mapan. Selanjutnya, karena persediaan modal tidak berubah dalam kondisi mapan, maka investasi sama dengan penyusutan δk^* . Dengan mengganti $f(k^*)$ untuk y dan δk^* untuk i , kita bisa menulis konsumsi per pekerja pada kondisi mapan sebagai berikut :

$$c^* = f(k^*) - \delta k^*.$$

Persamaan ini menunjukkan bahwa kenaikan modal pada kondisi mapan memiliki dua dampak yang berlawanan terhadap konsumsi pada kondisi mapan. Di satu sisi, lebih banyak modal berarti lebih banyak output. Di sisi lain, lebih banyak modal juga berarti bahwa lebih banyak output yang harus digunakan

untuk mengganti modal yang habis dipakai. Ketika membandingkan kondisi mapan, kita harus ingat bahwa tingkat modal yang lebih tinggi mempengaruhi output dan depresiasi. Jika tingkat modal berada di bawah di bawah tingkat Kaidah Emas, maka kenaikan persediaan modal akan meningkatkan output lebih banyak ketimbang depresiasi, sehingga konsumsi meningkat. Sebaliknya, jika persediaan modal di atas tingkat Kaidah Emas, maka kenaikan persediaan modal mengurangi konsumsi, karena kenaikan output lebih kecil ketimbang kenaikan depresiasi.

Sekarang kita bisa menetapkan kondisi sederhana yang mencirikan tingkat modal Kaidah Emas. Bahwa kemiringan fungsi produksi adalah produk marjinal modal MPK. kemiringan garis δk^* adalah δ . Karena kedua kemiringan ini sama pada k^*_{emas} , maka Kaidah Emas dijelaskan dengan persamaan

$$MPK = \delta$$

Pada tingkat modal Kaidah Emas, produk marjinal modal sama dengan tingkat depresiasi.

Bagaimana pertumbuhan populasi mempengaruhi kondisi mapan, kita harus membahas bagaimana pertumbuhan populasi, bersama – sama dengan investasi dan depresiasi, mempengaruhi akumulasi modal per pekerja. Kita akan menggunakan huruf kecil untuk jumlah per pekerja. Jadi, $k = K/L$ adalah modal per pekerja, dan $y = Y/L$ adalah output per pekerja. Akan tetapi harus diingat bahwa jumlah pekerja terus tumbuh sepanjang waktu. Perubahan persediaan modal per pekerja adalah :

$$\Delta k = i - (\delta + n)k.$$

Persamaan ini menunjukkan bagaimana investasi, depresiasi, dan pertumbuhan

populasi mempengaruhi persediaan modal per pekerja. Investasi meningkatkan k sedangkan depresiasi dan pertumbuhan populasi mengurangi k . Dan di asumsikan populasi konstan ($n = 0$).

Analisis kita tentang pertumbuhan populasi sekarang lebih banyak memberi hasil ketimbang sebelumnya. Pertama, kita ganti $sf(k)$ untuk i . Persamaan ini kemudian bisa kita tulis berikut :

$$\Delta k = sf(k) - (\delta + n)k.$$

Dalam kondisi mapan, dampak positif investasi terhadap persediaan modal per pekerja akan menyeimbangkan dampak negatif depresiasi dan pertumbuhan populasi. Yaitu, pada k^* , $\Delta k = 0$, dan $i^* = \delta k^* + nk^*$. Sekali perekonomian berada dalam kondisi mapan, investasi memiliki dua tujuan. Sebagian dari perekonomian itu (δk^*) akan mengganti modal yang terdepresiasi dan sisanya (nk^*) memberi modal untuk para pekerja baru. Akhirnya, pertumbuhan populasi mempengaruhi kriteria kita untuk menentukan tingkat modal Kaidah Emas (memaksimalkan konsumsi). Untuk melihat bagaimana kriteria ini berubah, ingatlah bahwa konsumsi per pekerja adalah :

$$c = y - i$$

Karena output pada kondisi mapan adalah $f(k^*)$ dan investasi pada kondisi mapan adalah $(\delta + n)k^*$, maka kita dapat menulis persamaan konsumsi pada kondisi mapan sebagai :

$$c^* = f(k^*) - (\delta + n)k^*$$

Dapat kita simpulkan bahwa tingkat k^* yang memaksimalkan konsumsi adalah

$$MPK = \delta + n$$

atau sama dengan,

$$MPK - \delta = n$$

Dalam kondisi mapan Kaidah Emas, produk marginal modal setelah terdepresiasi sama dengan tingkat pertumbuhan populasi.

Model Solow juga menjelaskan kemajuan teknologi yang merupakan variabel eksogen yang meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memproduksi sepanjang waktu. Untuk memasukkan kemajuan teknologi, kita kembali ke fungsi produksi yang mengaitkan modal total K dan tenaga kerja total L dengan output total Y . Jadi, fungsi produksi itu adalah :

$$Y = F(K, L)$$

Kini kita tulis fungsi produksi sebagai :

$$Y = F(K, L \times E)$$

Di mana E adalah variabel baru (dan abstrak) yang disebut efisiensi tenaga kerja. Efisiensi tenaga kerja mencerminkan pengetahuan masyarakat tentang metode-metode produksi: ketika teknologi mengalami kemajuan, efisiensi tenaga kerja meningkat. Efisiensi tenaga kerja juga meningkat ketika ada pengembangan dalam kesehatan, pendidikan, atau keahlian angkatan kerja. $L \times E$ mengukur para pekerja efektif. Perkalian ini memperhitungkan jumlah pekerja L dan efisiensi masing-masing pekerja E . Fungsi produksi yang baru menyatakan bahwa output total Y bergantung pada jumlah unit modal K dan jumlah per pekerja efektif, $L \times E$. Asumsi yang paling sederhana tentang kemajuan teknologi adalah bahwa kemajuan teknologi menyebabkan efisiensi tenaga kerja E tumbuh pada tingkat konstan g . Bentuk kemajuan teknologi disebut **pengoptimalan tenaga kerja**, dan g disebut **tingkat kemajuan teknologi yang mengoptimalkan tenaga kerja** (*Labor-*

augmenting technological progress). Karena angkatan kerja L tumbuh pada tingkat n , dan efisiensi dari setiap unit tenaga kerja E tumbuh pada tingkat g , maka jumlah pekerja efektif $L \times E$ tumbuh pada tingkat $n + g$.

Karena kemajuan teknologi yang dimodelkan di sini menambah efisiensi tenaga kerja, maka hal itu memiliki pengaruh yang sama terhadap populasi. Meskipun kemajuan teknologi tidak menyebabkan jumlah pekerja actual meningkat. Namun sebenarnya, setiap pekerja menghasilkan unit yang lebih banyak sepanjang waktu. Jadi kemajuan teknologi menyebabkan jumlah pekerja efektif meningkat. Untuk melakukan hal ini, kita perlu mempertimbangkan kembali notasi kita, kita nyatakan $k = K/(L \times E)$ menunjukkan modal per pekerja efektif, dan $y = Y/(L \times E)$ menunjukkan output per pekerja efektif.

Dengan definisi ini kita bisa menulis kembali $y = f(k)$.

Persamaan yang menunjukkan evolusi k sepanjang waktu sekarang berubah menjadi :

$$\Delta k = sf(k) - (\delta + n + g)k.$$

Perubahan persediaan modal Δk sama dengan investasi $sf(k)$ dikurangi investasi pulang pokok $(\delta + n + g)k$. Namun, karena $k = K/(L \times E)$, maka investasi pulang pokok meliputi tiga kaidah : untuk menjaga k tetap konstan, δk dibutuhkan untuk mengganti modal yang terdepresiasi, nk dibutuhkan untuk memberi modal bagi para pekerja baru, dan gk dibutuhkan untuk memberi modal bagi “para pekerja efektif” baru yang diciptakan oleh teknologi.

Kemajuan teknologi juga memodifikasi kriteria untuk kaidah emas. Tingkat modal Kaidah Emas kini didefinisikan sebagai kondisi mapan yang memaksimalkan konsumsi per pekerja efektif. Dengan mengikuti argumen yang sama yang kita gunakan sebelumnya, kita bisa menunjukkan bahwa konsumsi per pekerja efektif pada kondisi mapan adalah :

$$c^* = f(k^*) - (\delta + n + g)^*.$$

konsumsi pada kondisi mapan dimaksimalkan jika

$$MPK = \delta + n + g,$$

atau

$$MPK - \delta = n + g.$$

Yaitu, pada tingkat modal Kaidah Emas, Produk marjinal neto, $MPK - \delta$, sama dengan tingkat pertumbuhan output total, $n + g$. Karena perekonomian aktual mengalami pertumbuhan populasi dan kemajuan teknologi, maka kita harus menggunakan kriteria ini untuk mengevaluasi apakah hal itu memiliki modal yang lebih besar atau lebih kecil dari kondisi mapan Kaidah Emas.

Dengan demikian, dalam kondisi mapan dampak positif investasi terhadap persediaan modal per pekerja akan menyeimbangkan dampak negatif depresiasi dan pertumbuhan populasi. Sekali perekonomian berada dalam kondisi mapan, investasi memiliki dua tujuan. Sebagian dari perekonomian itu akan mengganti modal yang terdepresiasi, dan sisanya memberi modal untuk para pekerja baru.

Model ini menunjukkan bagaimana tabungan dan pertumbuhan populasi menentukan persediaan modal kondisi mapan perekonomian dan tingkat pendapatan perkapita pada kondisi mapan. Dapat kita lihat mengapa

negara- negara yang yang menabung dan menginvestasikan sebagian besar output mereka lebih kaya dari negara-negara yang menabung dan menginvestasikan lebih sedikit output, dan mengapa negara-negara dengan tingkat pertumbuhan populasi yang tinggi lebih miskin ketimbang negara-negara dengan tingkat pertumbuhan populasi yang rendah. Untungnya, para ekonom cukup banyak mengetahui tentang kekuatan- kekuatan yang mengarahkan pertumbuhan ekonomi. Model pertumbuhan Solow menunjukkan bagaimana tabungan, pertumbuhan populasi, dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam menentukan tingkat serta pertumbuhan standar kehidupan suatu negara.

2. Teori Pertumbuhan Harrod Domar

Kedua ekonom ini menekankan pentingnya peranan investasi (I). Mereka berpendapat bahwa investasi (I) mempunyai pengaruh terhadap permintaan agregat (Z) melalui proses multiplier, dan mempunyai pengaruh terhadap penawaran agregat (S) melalui pengaruhnya terhadap kapasitas produksi. Investasi (I) dapat diartikan sebagai tambahan stok kapital (ΔK), Jadi $I = \Delta K$.

(Sukirno, 1996) Teori Harrod-Domar bertujuan untuk menerangkan syarat yang harus dipenuhi supaya suatu perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang teguh atau *steady growth* dalam jangka panjang. Analisis Harrod-Domar menggunakan pemisalan-pemisalan berikut : (1) Barang modal telah mencapai kapasitas penuh, (2) Tabungan adalah proporsional dengan pendapatan nasional, (3) Rasio modal-produksi (*capital output ratio*) tetap nilainya, dan (4) perekonomian terdiri dari dua sektor.

Syarat untuk mencapai pertumbuhan teguh, dalam analisisnya teori Harrod Domar menunjukkan bahwa, walaupun pada satu tahun tertentu

(misalnya tahun 1994) barang-barang modal sudah mencapai kapasitas penuh, pengeluaran agregat dalam tahun 1994 yaitu $AE = C + I$, akan menyebabkan kapasitas barang modal menjadi semakin tinggi pada tahun berikutnya (tahun 1995). Dengan perkataan lain, investasi yang berlaku dalam tahun 1994 akan menambah kapasitas barang modal untuk mengeluarkan barang dan jasa pada tahun 1995.

Adapun syarat yang perlu dipenuhi agar kapasitas barang modal yang bertambah itu akan sepenuhnya digunakan. Artinya: apakah syaratnya agar pada tahun berikutnya (tahun 1995) barang-barang modal mencapai kapasitas penuh kembali?. Dua hal yang perlu diketahui untuk memecahkan persoalan ini.

Pertama, berapakah besarnya pertambahan kapasitas barang modal pada tahun 1995? Karena teori Harrod-Domar menganggap rasio modal-produksi tetap, teori tersebut mengatakan pertambahan kapasitas barang modal tergantung kepada dua faktor, yaitu rasio modal-produksi itu sendiri (misalkan ia bernilai COR) dan investasi yang dilakukan pada tahun 1994 (misalkan ia bernilai I). Pertambahan kapasitas barang modal (Δc) dapat dinyatakan dalam persamaan berikut:

$$\Delta c = \frac{I}{COR}$$

Kedua, keadaan yang bagaimanakah yang akan mengakibatkan pertambahan pendapatan nasional (ΔY) sama dengan pertambahan kapasitas barang modal (Δc)?. Teori Harrod-Domar adalah perluasan dari analisis Keynes. Dengan demikian teori itu berpendapat bahwa kapasitas penuh pada tahun berikut akan tercapai apabila pengeluaran agregat bertambah dengan cukup

besar sehingga tercapai keadaan :

$$\Delta c = \Delta Y$$

Teori Keynes telah menerangkan, apabila ada pertambahan pengeluaran agregat (misalnya ΔI) maka pendapatan nasional akan bertambah. Besarnya pertambahan pendapatan nasional tergantung kepada besarnya multiplier, dan pertambahan pendapatan tersebut dapat dihitung dengan menggunakan

3. Teori Pertumbuhan Endogen

(N. Gregory. Mankiw, 2003) Teori pertumbuhan endogen yaitu teori yang menolak asumsi model Solow tentang perubahan teknologi yang berasal dari luar (eksogen). Kita mulai dengan fungsi produksi sederhana ;

$$Y = AK,$$

Di mana Y adalah output, K adalah persediaan modal, dan A adalah konstanta yang mengukur jumlah output yang diproduksi untuk setiap unit modal. Ketiadaan pengembalian modal yang kian menurun merupakan perbedaan penting antara model pertumbuhan endogen dan pertumbuhan Solow.

Bagaimana fungsi produksi berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, diasumsikan bahwa sebagian pendapatan ditabung dan diinvestasikan. Karena itu kita jelaskan akumulasi modal dengan persamaan yang telah kita gunakan sebelumnya.

$$\Delta K = sY - \delta K$$

Persamaan ini menyatakan bahwa perubahan persediaan modal (ΔK) sama dengan investasi (sY) dikurangi depresiasi (δK). Menggabungkan persamaan ini dengan fungsi produksi $Y = AK$, kita dapatkan :

$$\Delta Y/Y = \Delta K/K = sA - \delta$$

Persamaan ini menunjukkan apa yang menentukan tingkat pertumbuhan output $\Delta Y/Y$, lihatlah selama $sA > \delta$, pendapatan perekonomian tumbuh selamanya, meskipun tanpa asumsi kemajuan teknologi eksogen.

Jadi, perubahan sederhana dalam fungsi produksi bisa mengubah secara dramatis prediksi tentang pertumbuhan ekonomi. Dalam model Solow, tabungan akan mendorong pertumbuhan untuk sementara, tetapi pengembalian modal yang kian menurun pada akhirnya akan mendorong perekonomian mencapai kondisi mapan di mana pertumbuhan hanya bergantung pada kemajuan teknologi eksogen. Sebaliknya dalam pertumbuhan endogen, tabungan dan investasi bisa mendorong pertumbuhan yang berkesinambungan.

Namun, penganut teori pertumbuhan endogen berpendapat bahwa asumsi pengembalian modal konstan (bukan yang kian menurun) lebih bermanfaat jika K diasumsikan secara lebih luas.

2.1.2 Inflasi

Menurut (Samuelson, P. A., & Nordhaus, 2001) Inflasi merupakan variabel ekonomi makro yang dapat merugikan suatu perusahaan. Pada dasarnya inflasi yang tinggi tidak disukai oleh pelaku pasar modal karena akan meningkatkan biaya produksi, yang akan berakibat buruk terhadap harga dan pendapatan. Menurut (Winardi, 1995) inflasi adalah suatu periode di mana kekuatan membeli kesatuan moneter turun. Inflasi dapat timbul bila jumlah uang deposito dalam peredaran lebih banyak dibandingkan dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan.

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya

nilai mata uang secara terus-menerus. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi rendahnya tingkat harga artinya tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus menerus dan saling mempengaruhi. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang jasa yang dikonsumsi masyarakat. Jadi, inflasi dapat berpengaruh langsung terhadap nilai perusahaan. Inflasi sendiri mempunyai arti yaitu jumlah uang yang beredar di masyarakat lebih banyak dibandingkan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Inflasi yang besar dapat mengakibatkan harga-harga menjadi naik, dan tentunya berdampak langsung terhadap kelangsungan perusahaan.

Menurut (Iskandar, 2009) teori yang membahas tentang inflasi, yaitu:

1. Teori Kuantitas

Teori ini dikenal dengan teori kaum moneteris (*monetaris models*) yang menekankan kepada peranan jumlah uang yang beredar dan harapan ekspektasi masyarakat mengenai kenaikan harga terhadap timbulnya inflasi.

2. Teori Keynes

Teori ini menyatakan bahwa inflasi terjadi karena masyarakat hidup di luar batas kemampuan ekonominya.

3. Teori Struktural

Teori ini mengatakan bahwa inflasi bukan semata-mata dikarenakan faktor moneter, tetapi juga oleh fenomena struktural. Hal ini terjadi

umumnya di negara-negara sedang berkembang yang umumnya masih bercorak agraris ataupun mengenai hal yang berhubungan dengan luar negeri, misalnya *term of trade*, utang luar negeri dan kurs valuta asing dapat menimbulkan fluktuasi harga di pasar domestik.

Menurut (Iskandar, 2009) ada beberapa dampak baik negatif maupun positif dari inflasi sebagai berikut:

1. Dampak positif dari inflasi:

- a. Bagi pengusaha barang-barang mewah (*High End*) yang mana barangnya laku saat harganya semakin tinggi (masalah prestise). Masyarakat akan semakin selektif dalam mengonsumsi, produksi akan diusahakan seefisien dan konsumtifisme dapat ditekan.
- b. Tingkat pengangguran cenderung akan menurun karena masyarakat akan bergerak untuk melakukan kegiatan produksi dengan cara mendirikan atau membuka usaha.

2. Dampak negatif dari inflasi:

- a. Bila inflasi berkepanjangan maka produsen banyak yang bangkrut karena produknya relatif akan semakin mahal sehingga tidak ada yang mampu membeli.
- b. Kerugian akan dialami para kreditur, bila bunga pinjaman yang diberikan lebih rendah dari inflasi.
- c. Inflasi bisa menyebabkan kenaikan produksi. Biasanya dalam keadaan inflasi kenaikan harga barang akan mendahului kenaikan gaji.

2.1.3 Pengangguran

Menurut (N. G. Mankiw, 2013) pengangguran merupakan masalah makro ekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan yang paling berat. Bagi kebanyakan orang, kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar kehidupan dan tekanan psikologis.

Menurut Sandono Sokarno Pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang menjadi bagian dari angkatan kerja dan ingin memperoleh pekerjaan namun belum mampu memperolehnya.

A. Jenis-Jenis Pengangguran

(Sukirno, 1996) jenis pengangguran itu ada 2 yaitu berdasarkan penyebabnya dan berdasarkan cirinya.

1. Berdasarkan penyebabnya

- a. Pengangguran friksional, adalah pengangguran normal yang terjadi jika ada 2-3% maka dianggap sudah mencapai kesempatan kerja penuh.
- b. Pengangguran siklikal, adalah pengangguran yang terjadi karena merosotnya harga komoditas dari naik turunnya siklus ekonomi. Sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah dari pada penawaran tenaga kerja.
- c. Pengangguran struktural, adalah pengangguran karena kemerosotan beberapa faktor produksi sehingga produksi menurun dan pekerja diberhentikan.
- d. Pengangguran teknologi, adalah pengangguran yang terjadi karena tenaga manusia di gantikan oleh mesin industri.

2. Pengangguran Berdasarkan Cirinya

a. Pengangguran Terbuka

Pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Sebagai akibatnya dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan. efek dari keadaan ini dalam jangka masa yang cukup panjang mereka tidak melakukan suatu pekerjaan. Jadi, mereka menganggur secara nyata dan sepenuh waktu. Pengangguran terbuka dapat pula wujud sebagai akibat dari kegiatan ekonomi yang menurun, dari kemajuan teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga kerja, atau sebagai akibat dari kemunduran perkembangan suatu industri.

b. Pengangguran Tersembunyi

Pengangguran ini biasanya terjadi di sektor pertanian atau jasa. Setiap kegiatan ekonomi memerlukan tenaga kerja, dan jumlah tenaga kerja yang digunakan tergantung kepada banyak faktor, seperti besar atau kecilnya perusahaan, jenis kegiatan perusahaan, mesin yang digunakan dan tingkat produksi yang dicapai. Di banyak negara berkembang, seringkali didapati bahwa jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi lebih banyak dari yang sebenarnya diperlukan supaya dapat menjalankan kegiatannya dengan efisien. Kelebihan tenaga kerja yang digunakan digolongkan dalam pengangguran

tersembunyi. Misalnya, pelayan restoran yang lebih banyak dari yang diperlukan dan keluarga petani dengan anggota keluarga yang besar yang mengerjakan luas tanah yang sangat kecil.

c. Pengangguran Bermusim

Pengangguran ini biasanya terjadi di sektor perikanan atau pertanian. Pada musim hujan penyadap karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa menganggur. Pada musim kemarau pula para pesawah tidak dapat mengerjakan tanahnya. Pada umumnya para pesawah tidak begitu aktif di antara waktu sesudah menanam dan sesudah menuai. Apabila dalam masa diatas para penyadap karet, nelayan dan pesawah tidak melakukan pekerjaan lain maka mereka terpaksa menganggur. Pengangguran ini digolongkan sebagai pengangguran bermusim.

d. Setengah Menganggur

Di negara-negara berkembang migrasi dari desa ke kota cenderung sangat pesat dan mengakibatkan tidak semua orang yang pindah ke kota dapat memperoleh pekerjaan dengan mudah. Sebagiannya terpaksa menjadi penganggur sepenuh waktu. Di samping itu ada pula yang tidak menganggur, tetapi tidak pula bekerja sepenuh waktu, dan jam kerja mereka jauh lebih rebdah dari yang normal. Mereka mungkin hanya bekerja satu hingga dua hari seminggu, atau satu hingga empat jam sehari. Pekerja yang mempunyai masa kerja seperti ini

digolongkan sebagai setengah menganggur atau dalam bahasa inggris adalah underemployed dan jenis pengangguran ini dinamakan underemployment

B. Penyebabnya Terjadinya Pengangguran

Pengangguran memang tidak diinginkan, namun merupakan penyakit yang terus menyebar di banyak negara karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Mengurangi pengangguran memerlukan kerjasama dari lembaga pendidikan, masyarakat dan lain-lain. Berikut beberapa penyebab pengangguran (Franita, 2016)

1. Sedikitnya lapangan pekerjaan yang menampung para pencari kerja.
2. Banyaknya para pencari kerja tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang dimiliki oleh negara indonesia
3. Kurangnya keahlian yang dimiliki oleh para pencari kerja. Banyak jumlah sumber daya manusia yang tidak memiliki keterampilan menjadi salah satu penyebab makin bertambahnya angka pengangguran di indonesia
4. Kurangnya informasi dimana pencari kerja tidak memiliki akses untuk mencari tau informasi tentang perusahaan yang memiliki kekurangan tenaga pekerja.
5. Kurangnya merata lapangan pekerjaan banyaknya lapangan pekerjaan di kota, dan banyak sedikitnya perataan lapangan pekerjaan.
6. Masih belum maksimal nya upaya pemerintah dalam memberikan pelatihan untuk meningkatkan softskill.

C. Dampak pengangguran

Dampak pengangguran berdampak pada menurunnya tingkat perekonomian negara berdampak pada stabilitas politik berdampak pada investor serta berdampak pada kesehatan sosial dan psikologis. Dampak pengangguran (Franita, 2016).

1. Ditinjau dari segi ekonomi pengangguran akan meningkatkan jumlah kemiskinan. Karena banyaknya yang menganggur berdampak rendahnya pendapatan ekonomi mereka. Sementara biaya hidup terus berjalan.
2. Ditinjau dari segi sosial dengan banyaknya pengangguran yang terjadi maka akan meningkatnya jumlah kemiskinan dan banyaknya pengemis gelandangan serta pengamen. Yang dapat mempengaruhi terhadap tingkat kriminal karena sulitnya mencari pekerjaan makanya banyak orang yang melakukan seperti merampok, mencuri, dan masih banyak lagi yang lain.
3. Ditinjau dari segi mental dengan banyaknya pengangguran maka rendahnya kepercayaan diri keputusan asa dan akan menimbulkan depresi.
4. Ditinjau dari segi politik maka akan banyak terjadi demonstrasi yang terjadi. Yang membuat dunia politik menjadi tidak stabil banyaknya demonstrasi pada serikat kerja karena banyaknya pengangguran terjadi.
5. Banyaknya pengangguran juga dapat meningkatkan pekerja seksama komersial dikalangan muda karena demi menghidupi ekonominya.

2.1.4 Kemiskinan

Kemiskinan berasal dari kata “miskin” yang berarti tidak memiliki harta benda. Namun, dalam arti yang lebih luas, kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu kondisi ketidak mampuan yang dialami oleh individu, keluarga atau kelompok. Kondisi ini membuat mereka rentan terhadap berbagai masalah sosial lainnya.

Kemiskinan dipahami sebagai situasi dimana seseorang atau sekelompok orang, baik laki-laki maupun perempuan, tidak memiliki akses yang layak terhadap hak-hak dasar mereka, sehingga menyulitkan mereka untuk menjalani dan mengembangkan kehidupan ber martabat.

Tingginya atau rendahnya tingkat kemiskinan disuatu daerah dipengaruhi oleh dua faktor utama: rata-rata pendapatan nasional dan tingkat kesenjangan dalam distribusi pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun suatu daerah mencapai tingkat pendapatan nasional per kapita yang tinggi, jika distribusi pendapatannya tidak merata, maka tingkat kemiskinan di daerah tersebut tetap akan tinggi. Sebaliknya, meskipun distribusi pendapatan disuatu daerah merata, jika rata-rata pendapatan nasional pendapatan nasional tidak membaik, maka kemiskinan juga akan meluas (Todaro, M. P., & Smith, 2013).

A. Kemiskinan Absolut

Individu atau kelompok dianggap berada dalam kategori kemiskinan absolut jika pendapatan mereka berada dibawah garis kemiskinan, sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup. Ukuran ini bertujuan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, dan tempat

tinggal, agar mereka dapat menjalani kehidupan yang layak.

B. Kemiskinan Relatif

Individu atau kelompok dikategorikan sebagai miskin relatif jika kebutuhan dasarnya terpenuhi, tetapi masih jauh dibawah standar kehidupan masyarakat disekitarnya. Berdasarkan pengukuran ini, garis kemiskinan dapat berubah seiring dengan perubahan tingkat kehidupan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pengukuran kemiskinan relatif bersifat dinamis dan akan selalu ada.

C. Kemiskinan Kultural

Individu atau kelompok dapat dikategorikan sebagai mangakami kemiskinan kultural jika mereka enggan berupaya memperbaiki kondisi hidupnya, meskipun telah ada usaha dari pihak lain atau peluang yang tersedia. Dengan kata lain, mereka menjadi miskin karena sikap dan perilaku mereka sendiri, yaitu sikap malas dan kurangnya usaha untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.

Kemiskinan dipengaruhi oleh berbagi aspek ekonomi, yang terdiri dari tiga komponen utama sebagai penyebabnya: tingkat pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan tingkat pengangguran. Selain itu, faktor seperti upah minimum ditingkat kabupaten atau kota juga turut berkontribusi terhadap kemiskinan. Tingginya pengangguran akan mengurangi pendapatan masyarakat, sehingga menciptakan lingkaran setan yang memperburuk kondidi ekonimi yang telah dicapai. Penurunan tingkat kemakmuran ini p ada gilirannya akan menimbulkan masalah baru berupa kemiskinan (Sukirno, 2016).

Ketika seseorang hidup dalam kemiskinan, salah satu masalah utama yang sering mereka hadapi adalah kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang layak. Kemampuan ekonomi yang terbatas mengakibatkan kurangnya akses ke pendidikan berkualitas, pelatihan keterampilan, atau bahkan modal untuk membuka usaha. Akibatnya, peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang stabil semakin kecil, dan inilah yang menuntun pada pengangguran.

2.2 Regulasi Pemerintah

Kebijakan **pertumbuhan ekonomi** pemerintah adalah serangkaian tindakan, keputusan, dan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah suatu negara untuk mempengaruhi kondisi dan kinerja ekonomi negara tersebut. Tujuan dari kebijakan ekonomi pemerintah adalah untuk mencapai berbagai sasaran ekonomi yang diinginkan, seperti pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, stabilitas harga, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan ekonomi pemerintah dapat mencakup berbagai aspek dan sektor ekonomi, termasuk kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan struktural. **Kebijakan fiskal** berkaitan dengan pengaturan pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Pemerintah dapat mengubah tarif pajak, mengeluarkan anggaran untuk proyek-proyek infrastruktur atau program sosial, serta mengatur tingkat pengeluaran untuk mencapai tujuan ekonomi yang diinginkan. **Kebijakan moneter** berfokus pada pengaturan jumlah uang yang beredar di perekonomian dan suku bunga.

Otoritas moneter, seperti bank sentral, dapat mengubah suku bunga atau melakukan operasi pasar terbuka untuk mengendalikan inflasi, mengatur

likuiditas pasar, dan mempengaruhi tingkat investasi dan konsumsi masyarakat.

Kebijakan struktural bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas ekonomi dalam jangka panjang. Kebijakan ini dapat mencakup reformasi dalam sektor-sektor seperti pasar tenaga kerja, perdagangan internasional, investasi, dan regulasi bisnis.

Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan investasi. **Undang undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal bahwa:** Mengatur tentang hak, kewajiban, dan perlindungan bagi investor dalam negeri dan asing, Menyediakan insentif bagi investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, Menegaskan peran pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Kebijakan yang dilakukan pemerintah saat terjadinya **Inflasi** :

Kebijakan fiskal berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran anggaran pemerintah (APBN). Kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah untuk mencegah inflasi adalah dengan mengurangi pengeluaran pemerintah, meningkatkan tarif pajak, serta melakukan pinjaman. Kebijakan moneter bertujuan menjaga kestabilan moneter agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut, ada beberapa hal yang dapat dilakukan, yakni kebijakan penetapan persediaan kas, kebijakan diskonto yaitu untuk meningkatkan nilai suku bunga, dan kebijakan operasi pasar terbuka. Kebijakan ini bisa dilakukan dengan cara mengendalikan jumlah uang beredar. **Kebijakan Non Fiskal dan Non Moneter**, Selain kebijakan fiskal dan moneter, cara mengatasi inflasi oleh pemerintah adalah dengan meningkatkan hasil produksi, mempermudah masuknya barang impor, menstabilkan pendapatan masyarakat

(tingkat upah), menetapkan harga maksimum, serta melakukan pengawasan dan distribusi barang. **Undang undang Nomoo 9 Tahun 2016 tentang pencegahan krisis sistem keuangan bahwa:** Mengatur pembentukan Bank Perantara sebagai sarana resolusi, Mengatur pembentukan Komite Stabilitas Sistem Keuangan, Mengatur tugas Komite, Stabilitas Sistem Keuangan dalam mencegah dan menangani krisis sistem keuangan, Mengatur pimpinan rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan, Mengatur pengambilan keputusan oleh Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.

Kebijakan yang diterapkan pemerintah untuk mengatasi **pengangguran** antara lain dengan memberikan bantuan pengetahuan, kemampuan, dan wawasan terkait jiwa kewirausahaan kepada para pelaku usaha UMKM maupun bimbingan manajemen dan teknis yang dapat membantu mereka dalam melancarkan usahanya sendiri. Selain itu, pemerintah juga dapat berupaya untuk melakukan pembangunan, pembenahan, serta pengembangan kawasan-kawasan terpencil untuk dibangun fasilitas, sarana transportasi serta komunikasi baru untuk dapat menggerakkan perekonomian dengan cara membuka lapangan kerja baru bagi para masyarakat. Selain itu, pemerintah juga dapat membangun lembaga sosial penjamin kehidupan para masyarakat yang menganggur, agar mereka memperoleh perhatian khusus, menyederhanakan perizinan dan maksimalisasi keamanan untuk investasi, agar para investor dapat membuka lapangan kerja baru bagi para tenaga kerja, maupun meningkatkan proses pelatihan, pengembangan keahlian, serta potensi tenaga kerja agar dapat tersalurkan sesuai dengan bidangnya masing-masing. **Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang**

Keuangan Negara : Mengatur pengelolaan keuangan negara secara transparan dan akuntabel, Memperjelas batasan keuangan negara dan tanggung jawab pengelolaanya, Menyelaraskan pengelolaan keuangan negara dengan prinsip good governance, Memperkuat peran DPR dalam pengawasan anggaran negara.

Kebijakan pemerintah untuk menurunkan tingkat **kemiskinan**. Pertama, penurunan beban pengeluaran (bantuan sosial). Kedua, peningkatan pendapatan masyarakat. Strategi ketiga adalah pengurangan kantong-kantong kemiskinan. Langkahnya dengan regionalisasi bantuan sosial. Undang-undang **Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial**, (1) Asuransi kesejahteraan sosial diselenggarakan untuk melindungi warga negara yang tidak mampu membayar premi agar mampu memelihara dan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya. (2) Asuransi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan iuran oleh Pemerintah.

2.3 Peneliti Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Etik Umiyati	Analisa Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah Di Pulau Sumatera	Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pembangunan, Sumber Daya, Indikator Kesejahteraan	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa : 1. Pertumbuhan Ekonomi: Terdapat perbedaan signifikan dalam pertumbuhan ekonomi antar provinsi di Sumatera, yang dipengaruhi oleh potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kualitas teknologi. 2. Ketimpangan Pembangunan: Ketimpangan pembangunan antar wilayah semakin

				besar, dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Riau memiliki indeks ketimpangan yang relatif tinggi dibandingkan provinsi lainnya. Indeks Williamson digunakan untuk mengukur ketimpangan pembangunan, menunjukkan angka yang cenderung mendekati nol di sebagian besar provinsi, tetapi relatif tinggi di beberapa provinsi tertentu. (Etik Umiyati, 2013)
2.	Yoghi Citra Pratama	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Indonesia	Tingkat Kemiskinan, Pendapatan Perkapita, Inflasi, Tingkat Pendidikan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Konsumsi Rumah Tangga.	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa : 1. Pengaruh Simultan: Variabel pendapatan per kapita, inflasi, tingkat pendidikan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan konsumsi secara simultan mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia. Uji F menunjukkan signifikansi $< 0,05$. 2. R-Squared: Nilai R-squared sebesar 0,56, yang berarti 56% variasi dalam tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh kelima variabel tersebut, sedangkan 44% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti. 3. Pengaruh Spesifik Variabel: Konsumsi: Memiliki pengaruh negatif dan signifikan

				terhadap tingkat kemiskinan. Peningkatan konsumsi berhubungan dengan penurunan tingkat kemiskinan. a) Indeks Pembangunan Manusia (IPM): Juga berpengaruh negatif dan signifikan. Semakin rendah IPM, semakin tinggi tingkat kemiskinan. b) Inflasi: Tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, meskipun teorinya inflasi tinggi seharusnya menurunkan daya beli. c) Pendapatan per Kapita: Memiliki hubungan negatif tetapi tidak signifikan, menunjukkan bahwa distribusi pendapatan yang tidak merata mungkin menjadi faktor. d) Tingkat Pendidikan: Tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan dalam jangka pendek. (Pratama, 2015)
3	Sri Eida Rosalia	Pengaruh Pengangguran dan Pertumbuhan ekonomi Terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh	Kemiskinan, Pengangguran, Pertumbuhan	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa : 1. Pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan: Nilai signifikansi

			Ekonomi.	untuk pengangguran adalah 0,006, yang berarti ada pengaruh signifikan antara pengangguran dan tingkat kemiskinan. 2. Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) berpengaruh terhadap kemiskinan: Nilai signifikansi untuk PDRB adalah 0,002, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi juga berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. 3. Pengaruh simultan: Variabel pengangguran dan pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kemiskinan dengan nilai signifikansi 0,031. (Gusria Eliza, 2019)
4.	Elisabeth Nainggolan	Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara (2010-2019)	Tingkat Kemiskinan, Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Pengangguran Terbuka.	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa : 1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi: Tidak terdapat pengaruh signifikan antara pertumbuhan ekonomi (diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto/PDRB) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara pada periode 2010-2019. Koefisien pertumbuhan ekonomi adalah 0,263 dengan nilai signifikansi 0,310, yang menunjukkan hasil yang tidak signifikan.

				2. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka: Tingkat Pengangguran Terbuka memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Koefisiennya adalah 0,895 dengan nilai signifikansi 0,0106, yang menunjukkan bahwa jika tingkat pengangguran meningkat 1%, maka tingkat kemiskinan akan naik sebesar 0,895%.(Cotti et al., 2011)
5.	Erika Feronika Br Simanungkalit	Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia	Pertumbuhan Ekonomi Produk Domestik Bruto (PDB), Inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada periode 1983-2014. Koefisien inflasi sebesar - 0,250527 berarti bahwa setiap kenaikan inflasi sebesar 1% akan mengurangi pertumbuhan ekonomi sebesar 0,250527. Model regresi menunjukkan bahwa 74,76% variasi dalam pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh inflasi, dengan uji F menunjukkan hasil yang signifikan ($p < 0,05$). (Simanungkalit, 2020)
6	Rudy Susanto dan Indah Pangesti	Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia	Tingkat Kemiskinan, Inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK), Pertumbuhan Ekonomi,	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Inflasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, dengan

			Produk Domestik Bruto (PDB).	nilai t_{hitung} yang lebih kecil dari t_{tabel} ($0,7906 < 1,753$). Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi terbukti berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, di mana nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($3,4024 > 1,753$). Selain itu, ketika dilihat secara simultan, inflasi dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, yang ditunjukkan oleh nilai F_{hitung} yang lebih besar dari F_{tabel} ($7,7305 > 3,59$). Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun inflasi tidak berkontribusi langsung terhadap pengurangan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi memainkan peran penting dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. (Susanto & Pangesti, 2021)
7	Novita Pratiwi	Analisis Pengaruh Pengangguran dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2017-2021	Pertumbuhan Ekonomi, Produk Domestik Bruto (PDB), Tingkat Pengangguran, Tingkat Inflasi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangguran dan inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2017-2021. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, di mana peningkatan pengangguran

				sebesar 5% dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, inflasi juga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, di mana peningkatan inflasi sebesar 1% akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Secara simultan, kedua variabel ini menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,995547, yang berarti 99,55% variasi dalam pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh variasi pengangguran dan inflasi. (Novita Pratiwi, 2022)
--	--	--	--	--

2.4 Kerangka Penelitian

2.4.1. Tahap Penelitian

Melakukan analisa ekonomi secara deskriptif tentang pertumbuhan ekonomi.

Beberapa faktor yang dianggap mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu Inflasi, investasi, Jumlah tenaga kerja, PDB Perkapita, Jumlah pengangguran, Jumlah orang miskin yang mempengaruhi. Beberapa faktor yang dianggap mempengaruhi pengangguran yaitu Kemiskinan, rata-rata lama sekolah, upah minimum provinsi, jumlah angkatan kerja.

2.4.2 Kerangka Analisis Penelitian

Gambar 2. 5 Kerangka Analisis Penelitian



2.4.3 Kerangka Konseptual Model Estimasi Ekonomi terkait Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. (Data Panel)

Gambar 2. 6 Kerangka Analisa Estimasi



Dalam model ini, Inflasi, Investasi, Jumlah tenaga kerja, PDB Perkapita, Jumlah pengangguran, Jumlah orang miskin yang mempengaruhi merupakan variabel bebas yang mempengaruhi secara langsung terhadap

Pertumbuhan Ekonomi yang dimana merupakan variabel terikat.

2.5 Hipotesis

Berdasarkan landasan teori, penelitian-penelitian terdahulu, dan kerangka konseptual penelitian diatas, maka hipotesis dari penelitian ini adalah:

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan dari Inflasi, Investasi, Jumlah tenaga kerja, PDB Perkapita, Jumlah pengangguran, Jumlah orang miskin yang mempengaruhi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran tahun 2004-2024.
2. Terdapat korelasi antara Inflasi, investasi, Jumlah tenaga kerja, PDB Perkapita, Jumlah pengangguran, Jumlah orang miskin yang mempengaruhi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran tahun 2004-2024 (Menggunakan data panel).

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian adalah langkah dan prosedur yang dilakukan dalam mengumpulkan informasi empiris guna memecahkan masalah dan menguji hipotesis dari sebuah penelitian.

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, yang dimana bertujuan untuk mengestimasi dan menganalisis hubungan antar variabel yang telah ditentukan untuk menjawab rumusan masalah dengan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif yaitu data yang berbentuk angka dan bilangan. Data yang disajikan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui perantara atau pihak yang telah mengumpulkan data sebelumnya. Data dalam penelitian ini berjenis data panel digunakan untuk mempelajari karakteristik antar individu dan antar waktu yang berbeda. Data panel merupakan gabungan dari data cross section dan data time series.

3.2 Definisi Operasional

Adapun variabel yang terdapat dalam penelitian ini ialah:

Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel Ekonometrika (Data Panel)

Variabel	Definisi Operasional	Kategori	Sumber Data
Pertumbuhan Ekonomi (PE)	Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita yang terus menerus dalam jangka panjang, yang diukur dalam satuan ukuran (%) per tahun	Variabel Terikat	www.bps.go.id (BPS RI)
Inflasi (INF)	Inflasi diartikan sebagai kondisi dimana harga barang dan jasa naik secara terus menerus dalam suatu periode waktu tertentu yang diukur dalam satuan % Per tahun.	Variabel Bebas	www.bps.go.id (BPS RI)

Investasi (I)	Investasi diartikan sebagai kegiatan menanamkan modal, baik penanaman modal dalam negeri ataupun penanaman modal asing yang diukur dalam satuan rupiah per tahun.	Variabel Bebas	www.bkpm.go.id/id/home (Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI)
Jumlah Tenaga Kerja (JTK)	Total individu yang bekerja dalam suatu periode tertentu disebuah wilayah atau sektor yang diukur dalam satuan jiwa pertahun.	Variabel Bebas	www.bps.go.id (BPS RI)
Produk Domestik Bruto Per Kapita (PDBKAP)	Nilai total barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu wilayah dibagi dengan jumlah penduduk yang diukur dalam satuan rupiah per tahun.	Variabel Bebas	www.bps.go.id (BPS RI)
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Tingkat Pengangguran Terbuka bahwa persentase dari angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan tetapi sedang aktif mencari pekerjaan, diukur dalam satuan persen pertahun	Variabel Bebas	www.bps.go.id (BPS RI)
Jumlah Orang Miskin (JOM)	Jumlah orang miskin adalah kondisi ketidak mampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar minimum yang diukur dalam satuan jiwa pertahun.	Variabel Bebas	www.bps.go.id (BPS RI)

Sumber: Olahan Penulis

3.3 Tempat Dan Waktu Penelitian

3.3.1. Tempat Penelitian

Secara khusus penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan di Indonesia dengan melihat data yang digunakan merupakan data yang telah disediakan dalam laporan lembaga terkait yang resmi.

3.3.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini direncanakan selama 3 bulan yang dimulai dari bulan Januari 2025 hingga Maret 2025

3.4 Jenis Data dan Sumber Data

3.4.1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Data sekunder pada

penelitian ini menggunakan data panel (gabungan data cross section dan data *time series*) tahun 2004-2024.

3.4.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari beberapa lembaga resmi seperti Badan Pusat Statistik, Kementerian Investasi dan Hilirisasi Republik Indonesia dan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengambilan data sekunder melalui Badan Pusat Statistik, Kementerian Investasi dan Hilirisasi Republik Indonesia dan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

3.6 Model Estimasi

Penelitian ini mengenai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tahun 2004-2024 dengan menggunakan data panel yang dimulai dari periode , model ekonometrika pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$PE_{it} = \beta_0 + \beta_1 INF_{it} + \beta_2 INV_{it} + \beta_3 JTK_{it} + \beta_4 PDBPK_{it} + \beta_5 JP_{it} + \beta_6 JOM_{it}$$

Dimana:

PE	: Pertumbuhan Ekonomi per-Provinsi
INF	: Inflasi per-Provinsi
INV	: Investasi per-Provinsi
JTK	: Jumlah Tenaga Kerja per-Provinsi
PDBk	: Produk Domestik Bruto Pendapatan Perkapita per-Provinsi
TPT	: Tingkat Pengangguran Terbuka per-Provinsi
JP	:Jumlah Pengangguran per-Provinsi
JOM	: Jumlah Orang Miskin per-Provinsi
β_0	: Konstanta
$\beta_1- \beta_7$	: Koefisien
i	: Data 34 per-Provinsi

t : Dari tahun 2004-2024
 ϵ_t : term of error

Setelah model penelitian diestimasi maka akan diperoleh nilai dan besaran masing-masing parameter model persamaan diatas. Nilai dari parameter positif dan negatif selanjutnya akan diperoleh untuk menguji hipotesa penelitian

3.7 Metode Estimasi

Metode estimasi pada penelitian ini adalah untuk mengestimasi semua variabel yang diamati menggunakan panel (gabungan data time series dan cross section) dalam kurun waktu 20 tahun. (Analisis trend dalam kurun waktu 120 bulan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan metode kuadrat terkecil atau OLS (Ordinary Least Square) dalam bentuk regresi linier berganda (Multiple Regression Model) yang disajikan lebih sederhana serta mudah dipahami. Asumsi-asumsi yang mendasari model regresi linear dengan menggunakan metode Ordinary Least Square adalah sebagai:

Nilai rata-rata disturbance term = 0

1. Tidak terdapat korelasi serial (Serial Auto Correlation) diantara disturbance term $COV(\epsilon_t, \epsilon_j) = 0 : I \neq j$
2. Sifat momocidentecity dari disturbance term $Var(\epsilon^i) = \sigma^2$
3. Covariance antar ϵ^i dari setiap variabel bebas (x) = 0 setiap variabel bebas (x) = 0
4. Tidak terdapat bias dalam spesifikasi model regresi. Artinya, model regresi yang diuji secara tepat telah dispesifikasikan atau diformulasikan.
5. Tidak terdapat collinearity antara variabel-variabel bebas. Artinya, variable- variabel bebas tidak mengandung hubungan linier tertentu

antara sesamanya

6. Jika model berganda yang diestimasi melalui OLS memenuhi suatu set asumsi (asumsi gauss-markov), maka dapat ditunjukkan bahwa parameter yang diperoleh adalah bersifat BLUE (Best Linear Unbiased Estimator) (Gujarati, 2016).

3.8 Teknik Analisis Data

3.8.1 Melakukan Analisis Ekonomi Secara Deskriptif tentang pertumbuhan ekonomi inflasi, pengangguran, kemiskinan tahun 2004-2024

Metode analisis deskriptif merupakan suatu metode analisa sederhana yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi observasi dengan menyajikan dalam bentuk tabel, grafik, maupun narasi dengan tujuan memudahkan pembaca dalam menafsirkan hasil penelitian. Metode analisis deskriptif dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Pertumbuhan Ekonomi, inflasi, pengangguran, kemiskinan tahun 2004-2024.

3.8.2 Melakukan Analisis Analisa Model Ekonometrika untuk Mengetahui Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi (PE) tahun 2004-2015 Menggunakan data (Panel)

A.Tahapan Analisis

1. Penaksiran

a. Korelasi (r)

Koefisien korelasi merupakan derajat keeratan antara variabel terikat dengan variabel bebas yang diamati. Koefisien korelasi biasanya dilambangkan dengan huruf r dimana bervariasi mulai -1 sampai +1. Nilai $r = -1$ atau $+1$ menunjukkan hubungan yang kuat antar variabel- variabel tersebut, jika nilai $r = 0$, mengindikasikan tidak ada hubungan antar variabel-variabel tersebut. Sedangkan tanda $+$ (positif) dan $-$ (negatif)

memberikan informasi mengenai arah dari hubungan antar variable-variabel tersebut.

b. Uji Koefisien Determinasi (D)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar persentase sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat yang dapat dinyatakan dalam persentase. Namun tidak dapat dipungkiri ada kalanya dalam penggunaan koefisien determinasi (D) terjadi bias terhadap satu variabel bebas yang dimasukkan dalam model. Sebagai ukuran kesesuaian garis regresi dengan sebaran data, menghadapi masalah karena tidak memperhitungkan derajat bebas. Sebagai alternatif digunakan *corrected* atau *adjusted R²* (Kuncoro, 2013).

2. Pengujian (Test Diagnostic)

a. Uji Parsial (uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat (Gujarati, 2013). Uji t dilakukan untuk melihat signifikan dari pengaruh Inflasi (INFit), Investasi (INVit), Jumlah Tenaga Kerja (JTKit), Produk Domestik Bruto Pendapatan Perkapita (PDRBkit), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPTit), Jumlah Orang Miskin (JOMit) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE) tahun 2004-2024. Dalam hal ini pengujian dilakukan adalah sebagai berikut:

3. Perumusan Hipotesis

a. Hipotesis $H_0 : \beta_1 - \beta_7 = 0$ (tidak ada hubungan yang signifikan antara masing-masing variabel pengaruh Inflasi (INFit), Investasi (INVit),

Jumlah Tenaga Kerja (JTKit), Produk Domestik Bruto Pendapatan Perkapita (PDRBkit), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPTit), Jumlah Orang Miskin (JOMit) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE) tahun 2004-2015.

b. Hipotesis $H_a \neq \beta_1 - \beta_7 \neq 0$ (ada hubungan yang signifikan antara masing-masing variabel pengaruh Inflasi (INFit), Investasi (INVit), Jumlah Tenaga Kerja (JTKit), Produk Domestik Bruto Pendapatan Perkapita (PDRBkit), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPTit), Jumlah Orang Miskin (JOMit) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE) tahun 2004-2024.

4. Uji stastitik yang digunakan adalah uji t. Dimana t hitung adalah:

$$t_h = \frac{\beta_i}{Se \beta_i}$$

Dimana:

β_1 : Pertumbuhan Ekonomi per-Provinsi

β_2 : Inflasi

β_3 : Investasi

β_4 : Jumlah Tenaga Kerja

β_5 : Produk Domestik Bruto Pendapatan Perkapita

β_6 : Jumlah Pengangguran

β_7 : Jumlah Orang Miskin

Terbuka $Se \beta_i$: Standar error

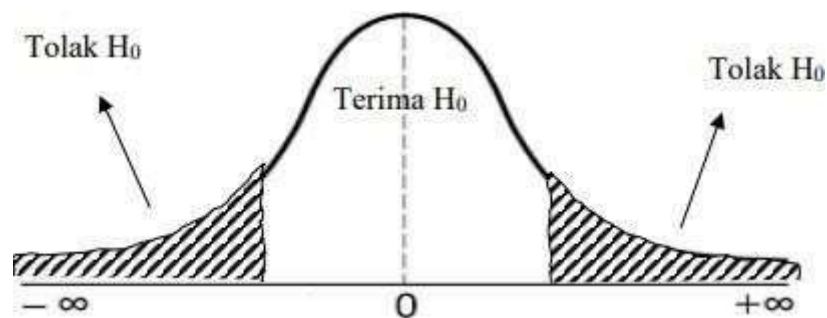
Nilai t_{hitung} akan dibandingkan dengan $t_{tabel} = \pm t (\alpha / 2, n - 1)$

dengan derajat kesalahan α pada tingkat 1%, 5%, 10%, dan 15%

Kreteria Uji

Terima H_0 jika $- t_{tabel} < t_{hitung} < + t_{tabel}$, hal lain tolak H_0

atau dalam distribusi kurva normal t dapat digambarkan sebagai berikut:



5. Kesimpulan

Sesuai kriteria uji maka terima H_0 atau tolak H_0

b. Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui pada model INFit, INVit, JTKit, PDRBkapit, TPTit, dan JOMit secara keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap PEit tahun 2004-2024. Dimana langkah-langkah sebagai berikut:

1. Perumusan Hipotesis

a. Hipotesis $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = \beta_6 = \beta_7 = 0$ (tidak ada hubungan yang signifikan secara serentak antara variabel Inflasi (INFit), Investasi (INVit), Jumlah Tenaga Kerja (JTKit), Produk Domestik Bruto Pendapatan Perkapita (PDRBkit), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPTit), Jumlah Orang Miskin (JOMit) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE) tahun 2004-2024.

b. Hipotesis $H_a : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = \beta_6 = \beta_7 \neq 0$ (ada hubungan yang signifikan secara serentak antara variabel Inflasi (INFit), Investasi (INVit), Jumlah Tenaga Kerja (JTKit), Produk Domestik Bruto Pendapatan Perkapita (PDRBkit), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPTit), Jumlah Orang Miskin (JOMit) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE) 2014-2024.

2. Uji statistik yang digunakan adalah uji F, dimana F hitung adalah:

$$F = \frac{R^2/K - 1}{(1 - R^2/(n - k))}$$

Dimana :

K= Jumlah Parameter yang diesmati

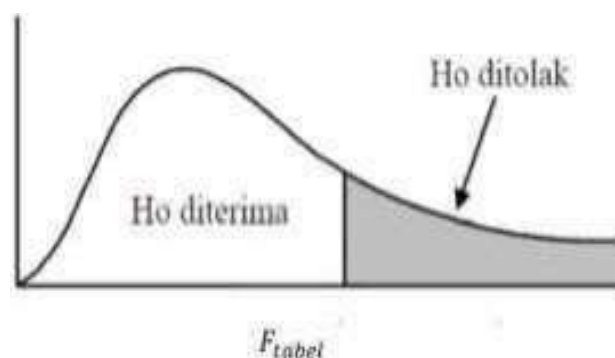
n= Jumlah data yang di observasi

Nilai Fhitung akan dibandingkan dengan Ftabel = F (a,n-k-1) dengan derajat

Kesalahan $\alpha = 10\%$

3. Kreteria Uji

Terima jika H_0 jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, hal lain tolak H_0 . Atau dalam distribusi kurva F dapat digambarkan sebagai berikut :



c. Uji Asumsi Klasik

Metode OLS (Ordinary Least Square) mendapatkan nilai estimator yang diharapkan dapat memenuhi sifat estimator OLS (Ordinary Least Square) yang BLUE (Blue Linier Unbiased Estimator) dengan cara

meminimumkan kuadrat simpangan setiap observasi dalam sampel. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga asumsi dalam metode estimasi OLS (Ordinary Least Square) yang harus dipenuhi dalam pengujian berdasarkan kriteria ekonometrika, yaitu:

1. Tidak ada masalah hubungan antara variabel independen dalam regresi berganda yang digunakan (tidak multikolinearitas)
2. Varian variabel yang konstan (tidak heterokedastisitas)
3. Tidak ada hubungan variabel gangguan antara satu observasi dengan observasi berikutnya (tidak ada autokorelasi).

1. Multikolinieritas

Multikolinieritas berhubungan dengan situasi dimana ada linear baik yang pasti atau mendekati pasti antara variabel independen. Masalah multikolinieritas timbul bila variabel-variabel independen berhubungan satu sama lain. Selain mengurangi kemampuan untuk menjelaskan dan memprediksi, multikolinieritas juga menyebabkan kesalahan baku koefisien (uji t) menjadi indikator yang tidak terpercaya (Gujarati, 2016).

Uji multikolinearitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas saling berhubungan secara linear dalam model persamaan regresi. Apabila terjadi multikolinearitas, akibatnya variabel penafsiran menjadi cenderung terlalu besar, t-hitung tidak bias, namun tidak efisien.

Dalam penelitian ini uji multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan auxiliary regression untuk mendekteksi adanya

multikolinearitas. Kriterianya adalah jika R^2 regresi persamaan utama lebih dari R^2 *regresi auxiliary* maka didalam model ini tidak terjadi multikolinearitas.

2. Heterokedastisitas

Heterokedastisitas adalah keadaan dimana varians dari setiap gangguan tidak konstan. Dampak adanya hal tersebut adalah tidak efisisennya proses estimasi, sementara hasil estimasinya sendiri tetap konsisten dan tidak bias serta akan mengakibatkan hasil uji t dan uji f dapat menjadi tidak “reliable” atau tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Untuk mengetahui ada atau tidaknya heterokedastisitas dapat digunakan Uji White. Secara manual uji ini dilakukan dengan melakukan regresi kuadrat dengan variabel bebas kuadrat dan perkalian variabel bebas. Nilai R^2 yang didapat digunakan untuk menghitung x^2 , dimana $x^2 = n \cdot R^2$ (Gujarati, 2016). Dimana pengujiannya adalah jika nilai probability Observation R- Squared lebih besar dari taraf nyata 5%, Maka hipotesis alternatif adanya heteroskedastisitas dalam model ditolak.

3. Autokorelasi

Autokorelasi adalah keadaan dimana variabel gangguan pada periode tertentu berkorelasi dengan variabel pada periode lainnya, dengankata lain variabel gangguan tidak random. Faktor-faktor yang menyebabkan autokorelasi antara lain kesalahan dalam menentukan model, menggunakan lag pada model, memasukkan variabel yang penting. Akibat dari adanya autokorelasi adalah parameter bias dan variannya minimum, sehingga tidak efisien (Gujarati, 2016). Untuk menguji ada tidaknya

autokorelasi salah satunya diketahui dengan melakukan Uji Durbin Watson Test. Dimana apabila di dan du adalah batas bawah dan batas atas, statistik menjelaskan apabila nilai Durbin Watson berada pada $2 < DW < 4$ -du maka autokorelasi atau no-autocorrelation (Gujarati, 2016).

D. Uji Hausman

Pengujian Hausman bertujuan untuk memilih apakah model *Fixed Effect* atau *Random Effect* yang paling tepat digunakan. Pada uji ini, hipotesis yang digunakan adalah:

H_0 : Tidak ada perbedaan antara model fixed effect dengan model random effect

H_1 : Terdapat perbedaan antarkedua model tersebut

Jika hasil estimasi menunjukkan “menolak H_0 ”, maka yang dipilih adalah model *fixed effect*. Sedangkan jika hasilnya “menerima H_0 ” maka model harus diuji lagi menggunakan uji *Lagrange Multiplier* (LM test) atau *Breusch-Pangan* test (BP test), (Wahyudi, 2020).

3.8.3 Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Berdasarkan Provinsi di Indonesia Menggunakan Tipologi Klassen

Penelitian ini menggunakan model analisis Tipologi Klassen.

Model Analisis Tipologi Klassen digunakan untuk mengetahui gambaran tentang Pertumbuhan Ekonomi (PE) dan Inflasi (INF) masing-masing provinsi di Indonesia. Tipologi klassen pada penelitian membagi wilayah berdasarkan dua indikator utama, yaitu Pertumbuhan Ekonomi (PE) terletak di sumbu vertikal dan Inflasi (INF) terletak di sumbu horizontal.

Tabel 3. 2 Tipologi Klassen untuk Klasifikasi Daerah

Kuadran II Daerah Maju dan Tapi Tertekan $PE_i > PE$ dan $INF_i < INF$	Kuadran I Daerah Maju dan Tumbuh $PE_i > PE$ dan $INF_i > INF$
Kuadran III Daerah Relatif Tertinggal $PE_i < PE$ dan $INF_i < INF$	Kuadran IV Daerah Berkembang Cepat $PE_i < PE$ dan $INF_i > INF$

Dimana:

Pertumbuhan Ekonomii : Pertumbuhan Ekonomi di provinsi

Indonesia

Pertumbuhan Ekonomi : Pertumbuhan Ekonomi di provinsi

Indonesia

INF_i : Inflasi (INF) di provinsi Indonesia

INF : Inflasi (INF) di Indonesia.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Indonesia

4.1.1 Kondisi Geografis Indonesia

Secara geografis Indonesia terletak di antara dua benua, Benua Asia dan Australia, di antara dua samudera, Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Secara astronomis Indonesia terletak antara 6° Lintang Utara dan 11° Lintang Selatan dan 95° – 141° Bujur Timur yang meliputi rangkaian pulau antara Sabang sampai Merauke. Data yang bersumber dari Badan Informasi Geospasial, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau sebanyak 13.466, luas daratan sebesar 1.922.570 km² dan luas perairan sebesar 3.257.483 km².

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, secara administratif wilayah Indonesia terbagi atas 38 provinsi, 514 kabupaten/kota (416 kabupaten dan 98 kota), 7.277 kecamatan, 8.488 kelurahan, dan 74.957 desa. Jumlah provinsi bertambah dari 34 menjadi 38 provinsi sejak tahun 2013, dengan penambahan provinsi baru sebagai hasil pemekaran, yaitu Provinsi Papua Barat, dengan 5 kabupaten yaitu Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Maybrat. Provinsi Papua Tengah (diresmikan pada tahun 2022), yang merupakan pemekaran dari Provinsi Papua, dengan 8 kabupaten yaitu Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten

Intan Jaya, Kabupaten Deiyai dan Kabupaten Puncak. Provinsi Papua Selatan (diresmikan pada tahun 2022), yang merupakan pemekaran dari Provinsi Papua, dengan 4 kabupaten yaitu Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi dan Kabupaten Asmat.

Luas lautan Indonesia sekitar 3.273.810 km² dan memiliki batas 12 mil laut dan zona ekonomi eksklusif sebesar 200 mil. Batas ujung barat Indonesia ialah Sabang; ujung timur adalah Merauke; ujung utara adalah Miangas; ujung selatan adalah Pulau Rote. Indonesia memiliki iklim tropis sehingga memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan kemarau serta berada di belahan timur bumi. Indonesia memiliki 3 pembagian daerah waktu, yaitu WIB (Waktu Indonesia bagian Barat), WITA (Waktu Indonesia bagian Tengah), dan WIT (Waktu Indonesia bagian Timur).

4.1.2 Kondisi Demografi Indonesia

Berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2020, Indonesia memiliki penduduk sebanyak 270,2 juta jiwa. Penduduk laki-laki sebanyak 136,66 juta jiwa atau 50,58% dari total penduduk Indonesia. Sementara, total penduduk perempuan di Indonesia sebanyak 133,54 juta jiwa atau sebanyak 49,42 persen dari penduduk di Indonesia. Indonesia memiliki penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang terus meningkat sejak tahun 1971.

Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Indonesia (2020-2024)

Jumlah Penduduk Indonesia	
Tahun	Jumlah (juta jiwa)
2020	270.203,9
2021	272.682,5
2022	275.773,8
2023	278.696,2
2024	281.603,8

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah 2025

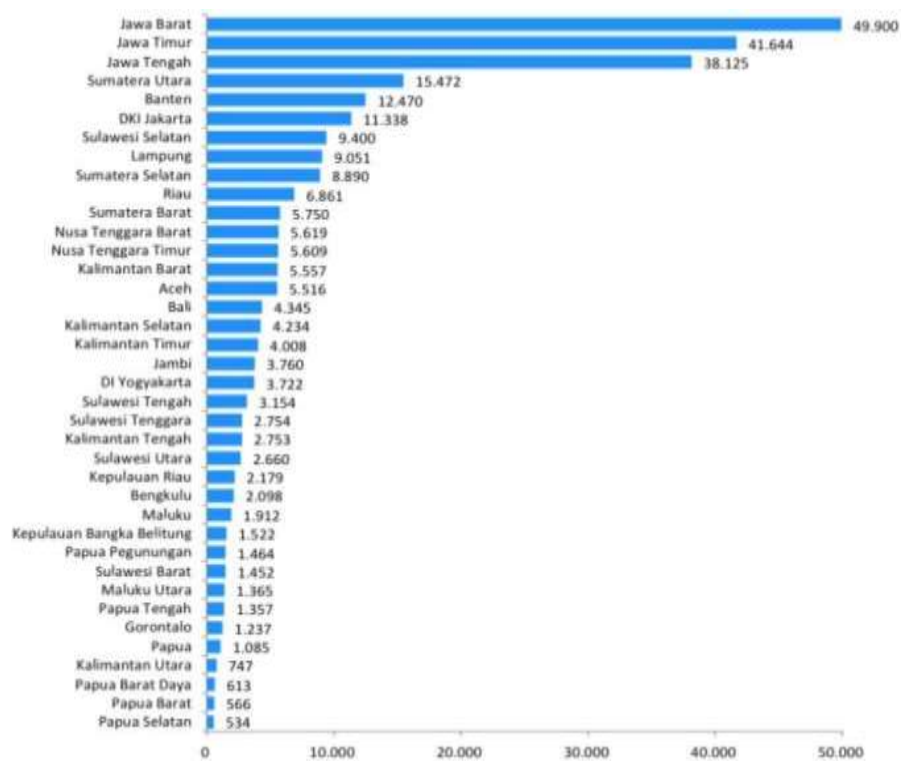
Pada tahun 2020, jumlah penduduk meningkat menjadi 270,2 juta jiwa, dengan tambahan sekitar 3,3 juta jiwa dalam satu tahun. Tahun ini juga ditandai dengan merebaknya pandemi COVID-19 yang berdampak signifikan pada kesehatan dan ekonomi masyarakat.

Pada tahun 2021, jumlah penduduk mencapai 272,7 juta jiwa, menunjukkan pertumbuhan yang lebih moderat dengan tambahan 2,5 juta jiwa. Pertumbuhan ini tetap berada dalam tren alami meskipun pandemi masih berlangsung.

Pada tahun 2022, jumlah penduduk kembali meningkat menjadi 275,7 juta jiwa. Pertumbuhan ini mencerminkan stabilitas demografis yang cukup konsisten dan didorong oleh pemulihan ekonomi yang lebih kuat setelah dampak pandemi. Proyeksi untuk tahun 2023 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 278,8 juta jiwa. Meskipun pertumbuhan populasi tetap stabil, laju pertumbuhannya sedikit melambat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Pada tahun 2024, proyeksi menunjukkan jumlah penduduk mencapai sekitar 281,6 juta jiwa. Data ini menunjukkan adanya peningkatan yang

konsisten setiap tahunnya dengan rata-rata kenaikan sekitar 2,9 juta jiwa per tahun dari 2021 hingga 2024. Kemudian dapat kita pada data gambar jumlah penduduk menurut provinsi tahun.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Gambar 4. 1 Jumlah Penduduk Menurut Provinsi (Dalam Ribuan) Tahun 2023

Pada Gambar 4.2 berdasarkan hasil estimasi, jumlah penduduk paling banyak di Indonesia terdapat di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk sebesar 49.900 ribu jiwa, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Provinsi Papua Selatan dengan jumlah penduduk sebesar 534 ribu jiwa.

4.1.3 Perkembangan Ekonomi di Indonesia

Perkembangan ekonomi di Indonesia telah mengalami berbagai dinamika dalam beberapa tahun terakhir. Berikut adalah beberapa poin penting yang menggambarkan perkembangan ekonomi di Indonesia.

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi sebagai sebuah proses peningkatan output dari waktu ke waktu menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara (Todaro, 2005). Pertumbuhan ekonomi di Indonesia merupakan indikator penting untuk mengukur kinerja perekonomian negara

Tabel 4. 2 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (2018-2024)

Tahun	Jumlah (%)
2018	5,17
2019	5,02
2020	-2,07
2021	3,69
2022	5,31
2023	5,05
2024	5,03

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah 2025

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada tahun 2018 mencatat pertumbuhan sebesar 5,17%, meningkat dari 5,07% pada tahun 2017. Peningkatan ini mencerminkan optimisme di pasar domestik serta penguatan sektor-sektor kunci seperti manufaktur dan jasa. Namun, pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi sedikit melambat menjadi 5,02%, menandakan adanya stabilisasi setelah periode pertumbuhan yang kuat sebelumnya.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada tahun 2018 mencatat pertumbuhan sebesar 5,17%, meningkat dari 5,07% pada tahun 2017. Peningkatan ini mencerminkan optimisme di pasar domestik serta penguatan sektor-sektor kunci

seperti manufaktur dan jasa. Namun, pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi sedikit melambat menjadi 5,02%, menandakan adanya stabilisasi setelah periode pertumbuhan yang kuat sebelumnya.

Tahun 2020 menjadi titik balik yang signifikan dengan penurunan pertumbuhan ekonomi mencapai -2,07%. Penurunan ini mencerminkan dampak serius dari pandemi COVID-19 yang menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Hampir semua komponen pengeluaran mengalami penyusutan, dengan ekspor barang dan jasa mengalami kontraksi terbesar sebesar 7,70%, sedangkan impor menyusut hingga 14,71%.

Pada tahun 2021, perekonomian Indonesia mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan dengan pertumbuhan mencapai 3,69%, suatu peningkatan yang signifikan dibandingkan penurunan tahun sebelumnya. Pemulihan ini berlanjut pada tahun 2022, ketika pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 5,31%, mencerminkan kembalinya aktivitas ekonomi dan peningkatan kepercayaan pasar. Namun, pada tahun 2023, pertumbuhan kembali menurun menjadi 5,03%, meskipun tetap menunjukkan keberhasilan Indonesia dalam mengelola pemulihan pasca-pandemi di tengah ketidakpastian global yang masih ada. Pada tahun 2024, laju pertumbuhan ekonomi stagnan di angka 5,03%, sedikit melambat dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang mencapai 5,05%.

Secara keseluruhan, meskipun Indonesia telah berhasil dalam beberapa aspek pemulihan ekonomi pasca-pandemi, tantangan tetap ada. Ketidakpastian global dan faktor domestik seperti daya beli masyarakat yang menurun perlu

diwaspadai. Pemerintah harus terus berupaya untuk memperkuat fondasi ekonomi dan memastikan bahwa pertumbuhan dapat berlanjut dengan stabil di masa depan.

2. Tingkat Inflasi di Indonesia

Inflasi merupakan indikator perekonomian yang penting, laju pertumbuhannya selalu diupayakan rendah dan stabil agar supaya tidak menimbulkan penyakit makro ekonomi yang nantinya akan memberikan dampak ketidakstabilan dalam perekonomian. Inflasi yang tinggi dan tidak stabil merupakan cerminan dari ketidakstabilan perekonomian yang berakibat pada naiknya tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus.

Tabel 4. 3 Tingkat Inflasi Indonesia (2020-2024)

Tahun	Jumlah(%)
2020	1,68
2021	1,87
2022	4,35
2023	2,61
2024	1,57

Sumber: Bank Indonesia, diolah 2025

Tahun 2020 mencatatkan tingkat inflasi terendah dalam periode ini, yaitu sebesar 1,68%. Inflasi yang rendah ini sebagian besar disebabkan oleh penurunan aktivitas ekonomi yang signifikan akibat pandemi COVID-19, yang mengakibatkan permintaan konsumen menurun drastis. Pada tahun 2021, inflasi mengalami sedikit peningkatan menjadi 1,87%, mencerminkan awal dari pemulihan ekonomi pasca- pandemi.

Namun, pada tahun 2022, inflasi meningkat secara signifikan, dipicu oleh lonjakan harga energi global, gangguan rantai pasokan, dan pemulihan permintaan domestik. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan bahan

makanan menjadi faktor utama penyebab inflasi tersebut.

Pada tahun 2023 dan 2024, inflasi kembali menunjukkan tren penurunan, masing-masing menjadi 2,61% dan 1,57%, yang mengindikasikan stabilisasi harga seiring dengan normalisasi kondisi ekonomi. Inflasi yang rendah tidak selalu mencerminkan efisiensi ekonomi; sebaliknya, hal ini bisa menjadi indikator lemahnya permintaan domestik.

4.1.3 Perkembangan Sosial di Indonesia

Perkembangan sosial di Indonesia telah mengalami berbagai dinamika dalam beberapa tahun terakhir. Berikut adalah beberapa poin penting yang menggambarkan perkembangan sosial di Indonesia.

1. Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia

Kemiskinan adalah keadaan yang bersifat absolut dan relatif yang mengindikasikan bahwa individu atau kelompok orang di suatu daerah tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka sesuai dengan nilai atau norma yang ada di masyarakat atau norma-norma tertentu yang berlaku dalam masyarakat karena faktor-faktor alamiah, kultural, atau struktural.

Tabel 4. 4 Jumlah Penduduk Miskin Indonesia (2019-2024)

Tahun	Jumlah(juta jiwa)
2019	24,79
2020	27,55
2021	26,5
2022	26,36
2023	25,9
2024	24,06

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah 2025

Berdasarkan data jumlah penduduk miskin di Indonesia pada periode 2019 hingga 2024, terlihat adanya dinamika yang mencerminkan dampak kondisi

sosial dan ekonomi nasional.

Pada tahun 2019, jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 24,79 juta jiwa. Namun, pada tahun 2020 terjadi peningkatan signifikan menjadi 27,55 juta jiwa. Kenaikan ini kemungkinan besar disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang mengakibatkan perlambatan ekonomi, peningkatan angka pengangguran, serta penurunan pendapatan masyarakat secara luas. Seiring dengan upaya pemulihan ekonomi dan pelaksanaan berbagai program bantuan sosial oleh pemerintah, angka kemiskinan menunjukkan tren penurunan pada tahun-tahun berikutnya.

Pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin turun menjadi 26,5 juta jiwa, kemudian berlanjut menjadi 26,36 juta jiwa pada tahun 2022, dan menurun lagi menjadi 25,9 juta jiwa pada tahun 2023. Hingga tahun 2024, jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 24,06 juta jiwa, lebih rendah dibandingkan kondisi sebelum pandemi.

Data ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan secara berkelanjutan telah memberikan dampak positif terhadap perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia.

2. Garis Kemiskinan di Indonesia

Garis kemiskinan adalah jumlah uang minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Garis kemiskinan digunakan untuk mengukur jumlah penduduk miskin dan mempertimbangkan program untuk menanggulangi kemiskinan.

Tabel 4. 5 Garis Kemiskinan Indonesia (2019-2024)

Tahun	Jumlah (Rp)
2019	Rp. 440.538,00
2020	Rp. 458.947,00
2021	Rp. 486.168,00
2022	Rp. 535.547,00
2023	Rp. 550.458,00
2024	Rp. 595.242,00

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah 2025

Garis kemiskinan di Indonesia pada tahun 2019 ditetapkan sebesar Rp 440.538,00 per kapita per bulan, yang mencerminkan pendapatan minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Pada tahun 2020, garis kemiskinan meningkat menjadi Rp 458.947,00 per kapita per bulan. Kenaikan ini kemungkinan besar dipicu oleh inflasi dan dampak dari pandemi COVID-19, yang mempengaruhi harga barang dan jasa serta pendapatan masyarakat secara keseluruhan.

Selanjutnya, pada tahun 2021, garis kemiskinan kembali naik menjadi Rp 486.168,00 per kapita per bulan. Peningkatan ini menunjukkan bahwa biaya hidup terus meningkat, mungkin disebabkan oleh pemulihan ekonomi yang belum stabil dan kenaikan harga kebutuhan pokok. Tahun 2022 mencatatkan lonjakan signifikan dengan garis kemiskinan mencapai Rp 535.547,00 per kapita per bulan. Kenaikan besar ini dapat diatribusikan kepada peningkatan harga bahan bakar, pangan, dan komoditas lainnya, serta dampak dari kebijakan ekonomi dan pemulihan pasca-pandemi.

Pada tahun 2023, garis kemiskinan naik menjadi Rp 550.458,00 per kapita per bulan. Meskipun kenaikan ini tidak sebesar tahun sebelumnya, hal ini tetap menunjukkan bahwa tekanan inflasi dan kondisi ekonomi masih mempengaruhi

biaya hidup masyarakat. Tahun 2024 mencatatkan garis kemiskinan mencapai Rp 595.242,00 per kapita per bulan, yang merupakan peningkatan signifikan lainnya. Ini menunjukkan bahwa biaya hidup terus meningkat dan tantangan ekonomi tetap ada.

Meskipun angka-angka ini menunjukkan tren kenaikan garis kemiskinan, penting untuk diingat bahwa peningkatan garis kemiskinan tidak hanya mencerminkan inflasi tetapi juga tantangan struktural dalam perekonomian. Kebijakan yang lebih efektif diperlukan untuk menangani faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kemiskinan dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

4.2 Analisis Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Pengangguran, Kemiskinan

4.2.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Masa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (2004-2024)



Sumber: Badan Pusat Statistik(BPS), diolah 2025

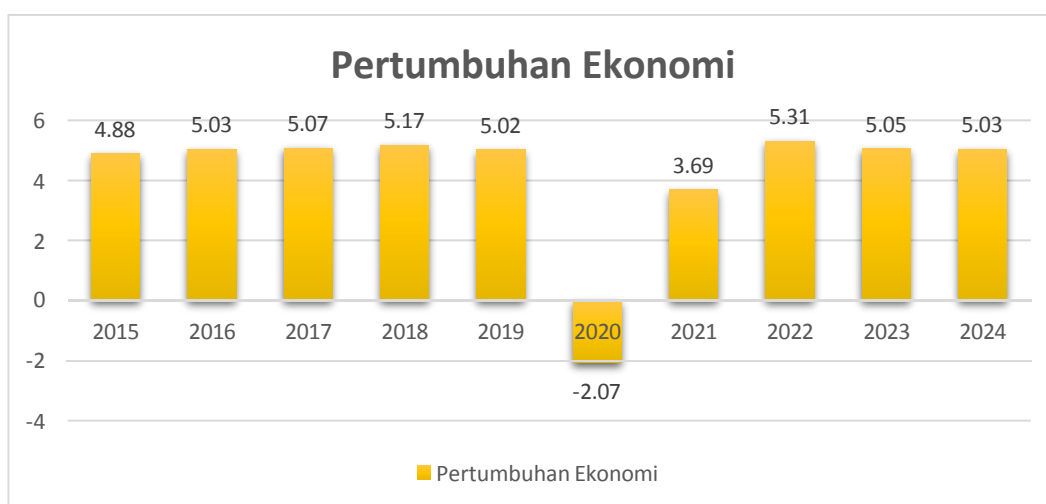
Gambar 4. 2 Pertumbuhan Ekonomi Masa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Tahun 2004-2014

Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang berlangsung dari tahun 2004 hingga 2014, menunjukkan tren yang relatif stabil dan positif, meskipun diwarnai oleh dinamika ekonomi global. Pada awal periode pertama pemerintahan, yaitu tahun 2004, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,03 persen. Angka ini terus mengalami peningkatan dan mencapai 6,35 persen pada tahun 2007. Peningkatan tersebut mencerminkan keberhasilan kebijakan ekonomi makro yang ditempuh pemerintah, antara lain melalui penguatan stabilitas fiskal, pengurangan subsidi bahan bakar minyak, serta dorongan terhadap ekspor dan investasi seiring dengan tren harga komoditas yang tinggi pada periode tersebut.

Namun demikian, pada tahun 2009, Indonesia turut merasakan dampak dari krisis keuangan global yang menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi menjadi 4,63 persen. Meskipun terjadi penurunan, Indonesia berhasil menghindari resesi dan tetap mencatat pertumbuhan positif. Hal ini menunjukkan bahwa fondasi ekonomi domestik cukup kuat, dengan konsumsi rumah tangga yang tetap terjaga serta respons kebijakan fiskal dan moneter yang tepat dari pemerintah.

Selanjutnya, pada periode kedua pemerintahan SBY (2010–2014), pertumbuhan ekonomi kembali meningkat, dengan rata-rata di atas 6 persen per tahun pada periode 2010 hingga 2012. Kondisi ini menunjukkan pemulihan ekonomi yang cukup cepat dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara emerging market yang menarik bagi investor asing. Capaian ini turut mendorong pemulihan kepercayaan internasional terhadap ekonomi Indonesia, yang ditandai dengan kembalinya peringkat kredit Indonesia ke kategori investment grade.

Namun, pada dua tahun terakhir masa pemerintahan SBY, pertumbuhan ekonomi mengalami tren perlambatan. Pada tahun 2013, pertumbuhan turun menjadi 5,56 persen dan kembali menurun menjadi 5,01 persen pada tahun 2014. Perlambatan ini disebabkan oleh berbagai faktor eksternal, seperti normalisasi kebijakan moneter oleh Bank Sentral Amerika Serikat (tapering off), yang memicu tekanan terhadap nilai tukar rupiah serta aliran modal keluar dari negara berkembang, termasuk Indonesia.



**Gambar 4. 3 Pertumbuhan Ekonomi Masa Joko Widodo
Tahun 2020-2024**

Pada awal masa pemerintahannya (2015–2019), pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif stabil di kisaran 5 persen per tahun. Tahun 2015 mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,88 %, yang kemudian sedikit meningkat pada tahun-tahun berikutnya, yakni 5,03 % (2016), 5,07 % (2017), dan mencapai 5,17 % pada 2018. Namun pada 2019, terjadi sedikit perlambatan menjadi 5,02 %, disebabkan oleh tekanan global akibat perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok serta pelemahan harga komoditas global.

Pemerintah pada masa ini berfokus pada pembangunan infrastruktur skala besar, reformasi perizinan usaha melalui sistem online (OSS), dan penguatan konektivitas antarwilayah. Strategi ini dimaksudkan untuk memperbaiki daya saing nasional dan menarik lebih banyak investasi. Namun, berbagai tantangan struktural seperti ketergantungan pada konsumsi domestik dan lemahnya diversifikasi ekspor menjadi hambatan bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Tantangan terbesar terjadi pada tahun 2020, ketika pandemi COVID-19 melanda dan menyebabkan kontraksi ekonomi sebesar -2,07 %. Ini merupakan kontraksi ekonomi pertama Indonesia sejak krisis moneter 1998. Aktivitas ekonomi terganggu secara luas akibat pembatasan sosial berskala besar (PSBB), terganggunya rantai pasok global, serta penurunan tajam pada konsumsi dan investasi. Pemerintah merespons kondisi ini dengan stimulus fiskal yang besar melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), bantuan sosial langsung, serta pelonggaran kebijakan moneter.

Pemulihan ekonomi mulai terjadi pada tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 3,69 %, didorong oleh relaksasi kebijakan pembatasan dan meningkatnya kembali mobilitas masyarakat. Pemulihan berlanjut secara lebih kuat pada 2022, ketika ekonomi tumbuh sebesar 5,31 %. Momentum pemulihan tetap terjaga pada 2023 dan 2024, masing-masing dengan pertumbuhan 5,05 % dan 5,03 %. Meskipun demikian, beberapa tekanan global seperti ketidakpastian geopolitik, inflasi internasional, serta fluktuasi harga energi dan pangan global tetap membayangi kinerja ekonomi nasional.

Tabel 4. 6 Laju Pertumbuhan Ekonomi Masa Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo Tahun 2005-2024

SBY	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	0,66	-0,19	0,85	-0,34	-1,38	1,59	-0,05	-0,14	-0,47	-0,55
Joko Widodo	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	-0,13	0,15	0,04	0,10	0,15	7,09	5,76	1,62	-0,26	-0,02

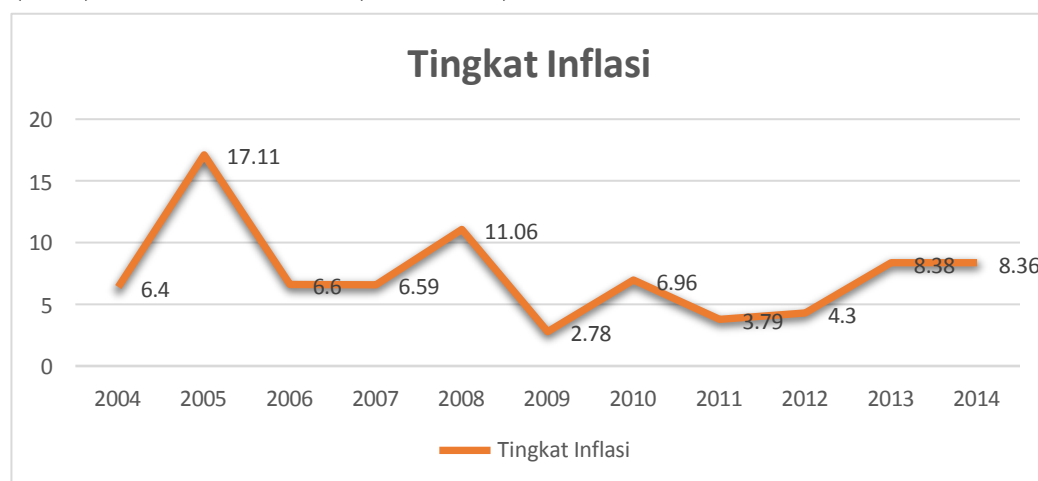
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah 2025

Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan pola yang fluktuatif namun tetap stabil secara umum. Pada tahun 2005, pertumbuhan tercatat sebesar 0,47%, lalu menurun sedikit di tahun 2006 (-0,10%) namun pulih ke 0,85% di tahun 2007. Krisis keuangan global tahun 2008 berdampak besar, dengan penurunan pertumbuhan menjadi -0,34% dan kemudian -1,38% pada 2009. Meskipun demikian Indonesia berhasil menunjukkan pemulihan yang cukup cepat pada 2010 dengan pertumbuhan 1,59%—tertinggi dalam periode tersebut. Namun setelahnya, tren pertumbuhan cenderung menurun secara bertahap, dari -0,05% (2011) hingga -0,55% (2014). Penurunan ini mengindikasikan adanya keterbatasan dalam struktur ekonomi nasional, khususnya ketergantungan pada sektor komoditas dan belum optimalnya industrialisasi.

Pemerintahan Joko Widodo (2015–2019) ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil namun relatif rendah, berada dalam kisaran sempit antara -0,13% hingga 0,15%. Hal ini mencerminkan stabilitas makroekonomi, namun juga menunjukkan bahwa pertumbuhan masih tertahan oleh lemahnya permintaan

domestik dan terbatasnya investasi sektor produktif. Pada tahun 2020, Indonesia mengalami kontraksi ekonomi terdalam dalam dua dekade terakhir akibat pandemi COVID-19, yaitu sebesar -7,09%. Gangguan aktivitas ekonomi akibat pembatasan sosial, penurunan konsumsi, dan terganggunya rantai pasok menjadi penyebab utama. Pemulihan terjadi pada 2021 dengan pertumbuhan 5,76%, kemudian menurun ke 1,62% pada 2022. Namun, pada 2023 dan 2024, pertumbuhan kembali melambat menjadi -0,26% dan -0,02%. Ini menunjukkan bahwa tekanan eksternal seperti inflasi global, suku bunga tinggi, dan ketidakpastian geopolitik tetap menjadi tantangan utama dalam menjaga keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional.

4.2.2 Perkembangan Inflasi di Indonesia Masa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (2009-2024)



Sumber: Bank Indonesia (BI), diolah 2025

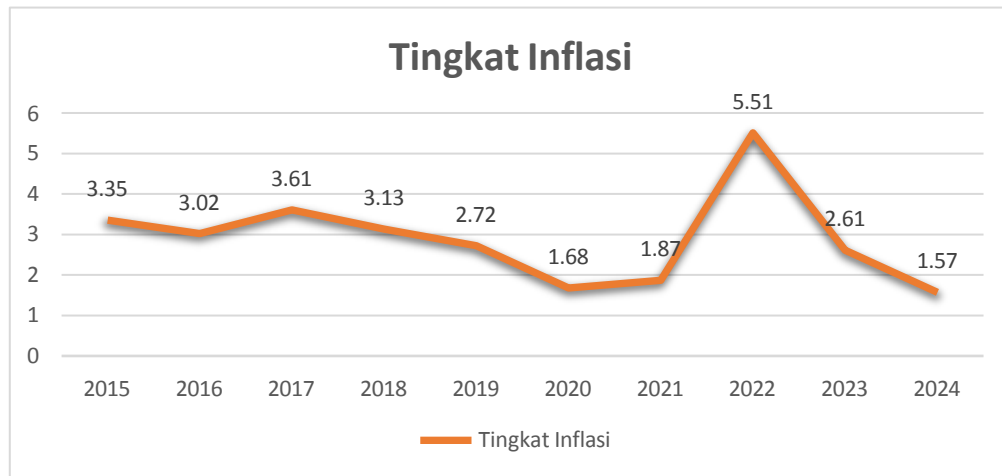
Gambar 4. 4 Tingkat Inflasi Masa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Tahun 2009-2013

Pada awal masa pemerintahan, tahun 2004, inflasi berada pada level 6,40 %. Namun pada tahun 2005, inflasi melonjak tajam hingga mencapai 17,11 %.

Kenaikan ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah dalam mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM), yang berdampak langsung terhadap peningkatan harga-harga barang dan jasa secara luas. Meskipun tekanan inflasi cukup besar, kebijakan ini dinilai penting sebagai langkah awal reformasi fiskal untuk mengurangi beban anggaran negara.

Setelah lonjakan tersebut, pemerintah berhasil menurunkan tingkat inflasi ke level yang lebih terkendali. Pada tahun 2006 dan 2007, inflasi tercatat masing-masing sebesar 6,60 % dan 6,59 %. Namun pada tahun 2008, inflasi kembali melonjak menjadi 11,06 % akibat kenaikan harga minyak dunia dan krisis pangan global. Meskipun demikian, Indonesia berhasil menjaga stabilitas harga dan menurunkan inflasi secara signifikan pada tahun 2009 menjadi 2,78 %, seiring dengan terjadinya krisis keuangan global yang menekan permintaan domestik.

Pada periode 2010 hingga 2012, inflasi cenderung terkendali, berkisar antara 3,79 % hingga 6,96 %. Kondisi ini menunjukkan efektivitas kebijakan moneter Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas harga melalui pengendalian suku bunga dan koordinasi fiskal dengan pemerintah. Namun, pada dua tahun terakhir masa pemerintahan SBY, yaitu 2013 dan 2014, inflasi kembali mengalami peningkatan yang signifikan, masing-masing sebesar 8,38 persen dan 8,36 %. Peningkatan ini dipicu oleh kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi serta gangguan pasokan pangan akibat cuaca ekstrem dan distribusi yang terganggu.



Sumber: Bank Indonesia (BI), diolah 2025

Gambar 4. 5 Tingkat Inflasi Masa Joko Widodo Tahun 2020-2024

Pada periode awal kepemimpinannya (2015–2019), inflasi berhasil ditekan dan berada dalam kisaran moderat antara 2,72% hingga 3,61%. Stabilitas inflasi ini mencerminkan efektivitas kebijakan pengendalian harga oleh pemerintah dan Bank Indonesia, terutama melalui sinergi pengelolaan harga bahan pangan dan energi. Selain itu, reformasi sistem logistik nasional dan kebijakan penguatan sektor pertanian juga turut menekan gejolak harga kebutuhan pokok.

Tahun 2020 dan 2021 menandai fase penurunan inflasi secara tajam, masing-masing menjadi 1,68% dan 1,87%. Penurunan tersebut bukan disebabkan oleh peningkatan efisiensi harga, melainkan oleh melemahnya permintaan agregat sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Pembatasan mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi menyebabkan konsumsi rumah tangga menurun, sehingga tekanan inflasi menjadi sangat rendah. Meskipun dari sisi konsumen ini mencerminkan harga yang stabil, dari sisi makroekonomi hal tersebut merupakan cerminan pelemahan ekonomi secara umum.

Namun, pada tahun 2022, inflasi melonjak drastis menjadi 5,51%. Kenaikan ini dipicu oleh krisis energi global, gangguan rantai pasok internasional, serta penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri. Dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat melalui kenaikan harga pangan, transportasi, dan barang konsumsi lainnya. Pemerintah merespons dengan kebijakan subsidi energi tambahan dan penguatan jaring pengaman sosial.

Pada tahun 2023 dan 2024, inflasi berhasil dikendalikan kembali ke level 2,61% dan 1,57%. Penurunan ini menunjukkan bahwa kebijakan stabilisasi harga dan penguatan koordinasi antara otoritas fiskal dan moneter mulai memberikan hasil. Selain itu, perbaikan rantai pasok dan normalisasi kondisi pascapandemi turut menurunkan tekanan biaya produksi dan distribusi.

Tabel 4. 7 Laju Inflasi Masa Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo
Tahun 2005-2024

SBY	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	10,71	-10,51	-0,01	4,47	-8,28	4,18	-3,17	0,51	4,08	-0,02
Joko Widodo	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	-5,01	-0,33	0,59	-0,48	-0,41	-1,04	0,19	3,64	-2,9	-1,04

Sumber: Badan Pusat Statistik(BPS), diolah 2025

Data menunjukkan bahwa inflasi pada masa SBY mengalami fluktuasi yang sangat signifikan. Inflasi tertinggi tercatat sebesar 10,71% pada tahun 2005, sedangkan nilai inflasi terendah mencapai -10,51% pada tahun 2006. Fluktuasi ini mencerminkan volatilitas ekonomi yang cukup besar di masa tersebut. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan kondisi ini antara lain dampak krisis finansial global 2008, ketidakstabilan harga komoditas, serta kebijakan fiskal dan moneter

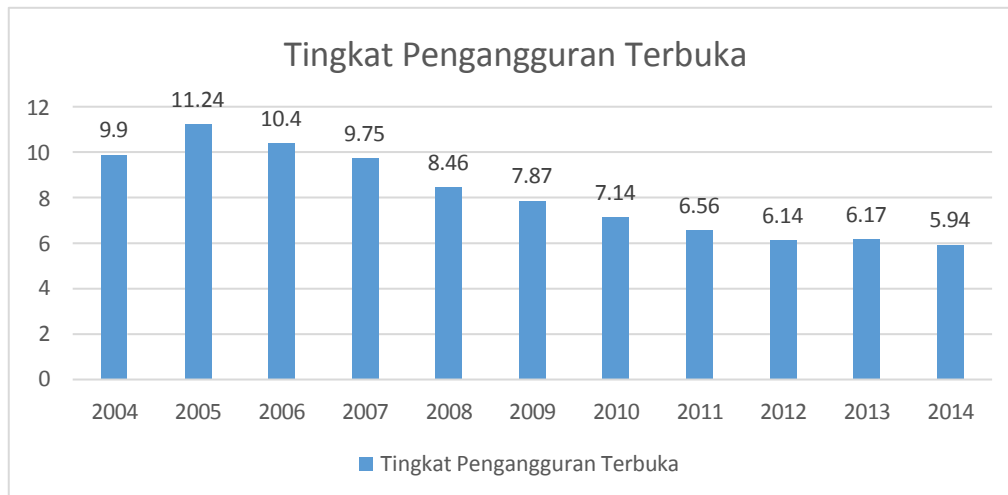
yang menyesuaikan kondisi ekonomi yang dinamis. Selain itu, beberapa tahun pada masa pemerintahan SBY menunjukkan deflasi yang cukup dalam, seperti pada tahun 2006 dan 2009, yang menandakan penurunan umum harga-harga barang dan jasa secara signifikan. Hal ini dapat mengindikasikan adanya perlambatan permintaan dalam perekonomian, yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi jika berlangsung lama.

Pada masa pemerintahan Jokowi, pola laju inflasi cenderung lebih stabil dibandingkan masa SBY, dengan sebagian besar nilai inflasi berada pada kisaran yang lebih kecil, antara -5,01% hingga 3,64%. Namun, dominasi inflasi negatif atau deflasi selama sebagian besar periode ini menunjukkan tekanan penurunan harga yang cukup signifikan. Kondisi ini mungkin disebabkan oleh lemahnya permintaan domestik, dampak pandemi COVID-19 pada tahun 2020, serta kebijakan moneter yang ketat untuk menjaga kestabilan harga.

Puncak inflasi pada periode ini terjadi pada tahun 2022 sebesar 3,64%, yang bisa jadi merupakan refleksi pemulihan ekonomi pasca pandemi dan kenaikan harga global akibat berbagai faktor geopolitik dan ekonomi internasional. Kemudian pada tahun 2023 nilai inflasi sebesar -2,9. Pada tahun terakhir 2024 nilai inflasi menjadi -1,04.

Rata-rata inflasi selama 10 tahun masa SBY adalah sekitar +0,40%, sedangkan rata-rata inflasi selama masa Jokowi adalah sekitar -0,78%. Perbedaan ini mengindikasikan perubahan karakteristik inflasi dari periode yang lebih fluktuatif ke periode yang lebih stabil tetapi mengalami tekanan deflasi.

4.2.3 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia Masa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (2004-2024)



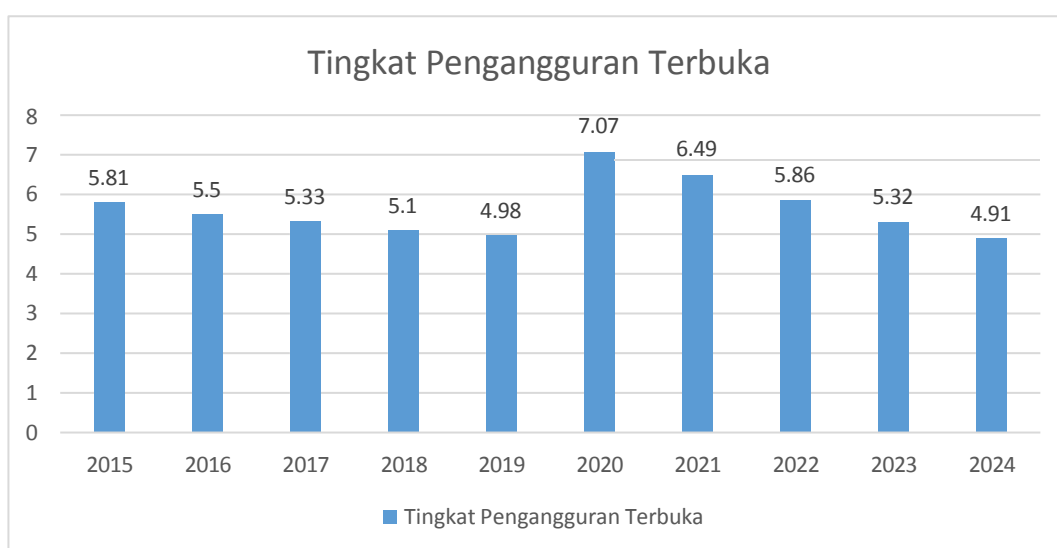
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah 2025

Gambar 4. 6 Tingkat Pengangguran Terbuka Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Tahun 2004-2014

Pada awal periode tahun 2004, tingkat pengangguran terbuka tercatat sebesar 9,9 %, dan mencapai puncaknya pada tahun 2005 sebesar 11,2 %. Lonjakan ini terjadi seiring dengan perlambatan ekonomi serta dampak dari penyesuaian kebijakan struktural yang mendorong efisiensi di berbagai sektor, terutama industri padat karya yang sempat mengalami restrukturisasi.

Setelah tahun 2005, tren pengangguran menunjukkan penurunan yang konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2006, TPT turun menjadi 10,4 %, dan terus menurun hingga mencapai 8,46 % pada tahun 2008. Penurunan ini mencerminkan dampak positif dari berbagai program pemerintah, seperti peningkatan investasi infrastruktur, program Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta berbagai kebijakan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menciptakan lapangan kerja baru di sektor informal dan formal.

Meskipun Indonesia sempat terdampak krisis keuangan global pada 2008–2009, TPT hanya naik sedikit ke 7,87 % pada 2009, yang menunjukkan ketahanan ekonomi nasional. Selanjutnya, pengangguran kembali menurun secara konsisten: 7,14 % (2010), 6,56 % (2011), 6,14 % (2012), hingga mencapai 5,94 % pada tahun 2014. Capaian ini merupakan tingkat pengangguran terendah dalam satu dekade terakhir dan menjadi indikator keberhasilan kebijakan ekonomi inklusif pemerintah.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah 2025

**Gambar 4. 7 Tingkat Pengangguran Terbuka Pemerintahan Joko Widodo
Tahun 2015-2024**

Pada awal masa kepemimpinannya tahun 2015, TPT tercatat sebesar 5,81%. Dalam lima tahun pertama (2015–2019), tren TPT mengalami penurunan yang konsisten, dari 5,81% menjadi 4,98%. Penurunan ini mencerminkan keberhasilan berbagai program pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja, seperti percepatan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan UMKM, serta

program vokasi dan pendidikan kerja yang terintegrasi dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.

Namun, pada tahun 2020, Indonesia mengalami lonjakan pengangguran yang signifikan hingga mencapai 7,07% akibat pandemi COVID-19. Pembatasan mobilitas dan penurunan aktivitas ekonomi menyebabkan banyak sektor, terutama pariwisata, manufaktur, dan perdagangan, melakukan PHK atau menunda perekrutan. Ini merupakan tingkat pengangguran tertinggi dalam dua dekade terakhir, sekaligus mencerminkan kerentanan struktur pasar tenaga kerja Indonesia terhadap guncangan eksternal.

Memasuki tahun 2021 hingga 2024, TPT kembali menunjukkan tren penurunan: 6,49% (2021), 5,86% (2022), 5,32% (2023), dan mencapai 4,91% pada tahun 2024. Pemulihan ini mencerminkan efektivitas berbagai program pemulihan ekonomi nasional (PEN), insentif usaha, dan peningkatan daya serap tenaga kerja melalui digitalisasi dan ekonomi kreatif. Selain itu, program pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan revitalisasi pendidikan vokasi turut mendukung terciptanya peluang kerja baru, khususnya di sektor konstruksi, teknologi, dan logistik.

Tabel 4. 8 Laju Pengangguran Terbuka Masa Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo Tahun 2005-2024

SBY	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	1,34	-0,84	-0,65	-1,29	-0,59	-0,73	-0,58	-0,42	0,03	-0,23
Joko Widodo	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	0,13	-0,31	-0,17	-0,23	-0,12	2,09	-0,58	-0,63	-0,54	-0,41

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah 2025

Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2005–2014), laju pengangguran terbuka menunjukkan tren penurunan yang cukup stabil. Pada awal masa pemerintahannya, tepatnya tahun 2005, terjadi kenaikan laju pengangguran sebesar 1,34%, namun sejak tahun 2006 hingga 2013, laju pengangguran mengalami penurunan berturut-turut dengan nilai negatif, yang menandakan perbaikan kondisi pasar tenaga kerja. Penurunan ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi dan pembangunan yang diterapkan pada masa tersebut berhasil menciptakan lapangan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran secara signifikan. Pada tahun terakhir masa SBY, yaitu 2014, laju pengangguran cenderung stabil dengan perubahan yang sangat kecil, yakni 0,23%, menandakan titik transisi sebelum pergantian pemerintahan.

Memasuki masa pemerintahan Joko Widodo (2015–2024), dinamika laju pengangguran menjadi lebih fluktuatif. Pada beberapa tahun awal, yakni 2015 hingga 2019, laju pengangguran mengalami beberapa kali penurunan dan peningkatan kecil, yang menunjukkan tantangan dalam penyerapan tenaga kerja akibat berbagai faktor ekonomi domestik dan global. Tahun 2020 menonjol sebagai titik kritis dengan kenaikan laju pengangguran sebesar 2,09%, yang dapat dikaitkan dengan dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan gangguan besar pada pasar tenaga kerja. Namun setelah itu, dari 2021 hingga 2024, laju pengangguran kembali menunjukkan tren penurunan, meskipun dengan penurunan yang tidak terlalu besar. Hal ini mengindikasikan adanya upaya pemulihan ekonomi dan stabilisasi kondisi ketenagakerjaan pada masa pandemi dan pascapandemi.

4.2.4 Perkembangan Jumlah Penduduk Kemiskinan di Indonesia Masa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (2009-2024)



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah 2025

Gambar 4. 8 Persentase Penduduk Kemiskinan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Tahun 2009-2013

Selama masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, persentase penduduk miskin di Indonesia menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2004, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 16,66%. Meskipun sempat menurun pada tahun 2005 menjadi 15,97%, angka ini kembali meningkat pada tahun 2006 menjadi 17,75%. Kenaikan ini berkaitan erat dengan kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) dan inflasi yang cukup tinggi pada tahun tersebut, yang menyebabkan meningkatnya tekanan terhadap daya beli masyarakat miskin.

Namun, sejak tahun 2007 hingga 2014, tren penurunan persentase penduduk miskin berjalan cukup stabil. Tahun 2007 mencatat angka 16,58%, kemudian turun secara bertahap menjadi 15,42% (2008), 14,15% (2009), dan

13,33% pada tahun 2010. Penurunan ini mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam menstabilkan inflasi, memperkuat jaring pengaman sosial, serta meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap layanan dasar. Program-program seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan peningkatan subsidi untuk pendidikan dan kesehatan berperan penting dalam memperbaiki kesejahteraan kelompok miskin.

Pada periode 2011–2014, tren positif tersebut berlanjut. Persentase penduduk miskin turun dari 12,49% pada 2011 menjadi 11,96% (2012), 11,47% (2013), dan mencapai titik terendah pada akhir masa jabatan Presiden SBY di tahun 2014, yaitu sebesar 10,96%. Penurunan ini menunjukkan bahwa kebijakan pertumbuhan ekonomi inklusif dan perluasan program pengentasan kemiskinan telah memberikan hasil yang nyata. Meski demikian, tantangan seperti ketimpangan pendapatan, kerentanan sektor informal, dan ketergantungan terhadap komoditas tertentu masih menjadi hambatan struktural dalam upaya pengurangan kemiskinan secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, masa pemerintahan SBY menunjukkan pencapaian yang cukup baik dalam pengurangan tingkat kemiskinan, meskipun masih menyisakan tantangan dalam hal peningkatan kualitas hidup dan pengentasan kemiskinan ekstrem di daerah-daerah tertinggal.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah 2025

**Gambar 4. 9 Persentase Penduduk Miskin Pemerintahan
Joko Widodo Tahun 2020-2024**

Pada awal periode tahun 2015, tingkat kemiskinan berada pada angka 11,13%. Seiring dengan pelaksanaan berbagai program pembangunan dan kebijakan perlindungan sosial seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta Program Keluarga Harapan (PKH), angka kemiskinan secara bertahap menurun menjadi 10,70% (2016), 10,12% (2017), 9,66% (2018), dan mencapai 9,41% pada tahun 2019. Tren ini mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil.

Namun, pada tahun 2020, pandemi COVID-19 memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi nasional, terutama sektor informal yang menyerap sebagian besar tenaga kerja berpendidikan rendah. Akibatnya, tingkat kemiskinan meningkat menjadi 10,19%. Ini menunjukkan bahwa kelompok rentan sangat

terdampak oleh krisis kesehatan dan ekonomi, yang menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin dalam waktu singkat.

Meskipun demikian, pemerintah merespons dengan memperluas bantuan sosial dan memperkuat program pemulihan ekonomi nasional. Hasilnya mulai terlihat sejak tahun 2021, ketika persentase penduduk miskin menurun kembali menjadi 10,14%, dan terus turun menjadi 9,57% (2022), 9,36% (2023), dan mencapai titik terendah dalam dua dekade terakhir sebesar 8,57% pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan pemulihan ekonomi pascapandemi serta perbaikan tata kelola program perlindungan sosial berbasis data yang lebih akurat melalui registrasi sosial ekonomi dan digitalisasi bantuan.

Secara keseluruhan, capaian penurunan kemiskinan dari 11,13% pada tahun 2015 menjadi 8,57% pada tahun 2024 menunjukkan bahwa meskipun dihadapkan pada krisis besar, pemerintahan Presiden Joko Widodo mampu menjaga dan bahkan memperkuat tren pengurangan kemiskinan nasional. Namun demikian, tantangan dalam mengatasi kemiskinan ekstrem, kesenjangan antarwilayah, dan akses terhadap pekerjaan layak masih menjadi isu penting dalam agenda pembangunan ke depan.

Tabel 4. 9 Laju Pertumbuhan Penduduk Miskin Masa Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
SBY	1,78	-1,17	-1,16	-1,27	-0,82	-0,84	-0,53	-0,49	-0,51	0,17
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Joko Widodo	-0,43	-0,58	-0,46	-0,25	0,78	-0,05	-0,57	-0,21	-0,79	-8,57

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah 2025

Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2005–2014) umumnya menunjukkan arah penurunan yang relatif stabil. Meskipun pada tahun 2005 terjadi peningkatan sebesar 1,78%, namun tren selanjutnya menunjukkan penurunan berturut-turut: -1,17% (2006), -1,16% (2007), dan -1,27% (2008). Penurunan ini dapat dikaitkan dengan keberhasilan program bantuan sosial langsung tunai dan penguatan stabilitas ekonomi makro.

Tren penurunan dilanjutkan pada tahun 2009 hingga 2013 dengan laju antara -0,84% hingga -0,49%, yang mencerminkan keberlanjutan program pro-poor dan stabilitas harga kebutuhan pokok. Namun, pada tahun terakhir pemerintahan SBY (2014), terjadi sedikit peningkatan sebesar 0,17%, yang mungkin disebabkan oleh efek lanjutan dari kebijakan penyesuaian harga BBM menjelang akhir masa jabatannya, serta perlambatan ekonomi global yang berdampak pada sektor ekspor dan lapangan kerja.

Sebaliknya, masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (2015–2024) menunjukkan dinamika yang lebih fluktuatif. Pada lima tahun pertama, laju pertumbuhan penduduk miskin tetap negatif dengan tren menurun: -0,43% (2015), -0,58% (2016), -0,46% (2017), -0,25% (2018). Namun, pada tahun 2019, terjadi peningkatan sebesar 0,78%, yang bertepatan dengan ketidakpastian global dan tekanan terhadap daya beli masyarakat. Dampak pandemi COVID-19 yang sangat besar terlihat pada tahun 2020 dan 2021, di mana laju pertumbuhan penduduk miskin menjadi -0,05% (stagnan) dan kembali turun sedikit -0,57% (2021), meskipun kondisi ekonomi masih belum sepenuhnya pulih.

Penurunan signifikan kembali terjadi pada tahun 2022 hingga 2024 dengan laju masing-masing -0,21%, -0,79%, dan -8,57%, di mana angka 2024 menunjukkan percepatan luar biasa dalam pengurangan jumlah penduduk miskin. Penurunan tajam ini dapat dihubungkan dengan pemulihan ekonomi pascapandemi, efektivitas bantuan sosial terintegrasi, digitalisasi sistem penyaluran, serta prioritas pemerintah dalam mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem.

Secara umum, pemerintahan SBY menunjukkan penurunan yang stabil dan bertahap, dengan pendekatan makroekonomi dan bantuan tunai langsung sebagai instrumen utama. Sementara itu, pemerintahan Jokowi menghadapi tantangan lebih besar seperti pandemi global, namun mampu mengarahkan kebijakan yang lebih responsif melalui reformasi bantuan sosial, pemulihan ekonomi, serta perluasan inklusi keuangan digital. Kedua periode memiliki kontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan, namun masing-masing dihadapkan pada konteks ekonomi dan sosial yang berbeda secara signifikan.

4.3 Analisa Model Ekonometrika untuk Mengetahui Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

4.3.1 Statistik Deskriptif Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Statistik deskriptif adalah metode dalam statistika untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, meringkas, menginterpretasikan, dan menyajikan data secara deskriptif atau eksplanasi. Penyajian ini berfungsi untuk menggambarkan karakteristik suatu sampel data, namun tidak menarik kesimpulan atau probabilitas dari data tersebut

Tabel 4. 10 Statistik Deskriptif Model

	PE	INF	INV	PDBKAP	JTK	TPT	JOM
Mean	271328.1	358.4211	10606.01	38541.69	37.58246	4.487807	9.643596
Median	109004.8	191.5000	3502.750	29582.58	39.55500	4.370000	8.270000
Maximum	2151041	1191.000	128402.1	201315.1	68.45000	10.51000	31.53000
Minimum	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Std. Deviasi	425938.7	346.0564	19965.03	33143.73	14.73873	2.324088	6.459909

Sumber: Eviews, diolah 2025

Data penaksiran di atas menampilkan ringkasan statistik deskriptif untuk tujuh variabel, yang diantaranya terdapat satu variabel terikat yaitu Pertumbuhan Ekonomi (PE), Inflasi (INFit), Investasi (INVit), Jumlah Tenaga Kerja (JTKit), Produk Domestik Bruto Pendapatan Perkapita (PDRBkit), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPTit), dan Jumlah Orang Miskin (JOMit). Berikut adalah penjelasan untuk masing-masing bagian dari data ini:

a. *Mean* (Rata-rata)

PE : Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi adalah 271328.1%

INF : Rata-rata Inflasi adalah 358.4211%

INV : Rata-rata Investasi adalah 10606.01Milliar

JTN : Rata-rata Jumlah Tenaga Kerja adalah 37.58246 %

PDBkap : Rata-rata Produk Domestik Bruto adalah 38541.69 Rupiah

TPT : Rata-rata Tingkat Pengangguran Terbuka adalah 4.487807 %

JOM : Rata-rata Jumlah Orang Miskin adalah 9.643596 Jiwa

b. *Median* (Nilai Tengah)

PE : *Median* Pertumbuhan Ekonomi adalah 109004.8%

INF : *Median* Inflasi adalah 191.5000 %

INV : *Median* Investasi adalah 3502.750 Milliar

JTN : *Median* Jumlah Tenaga Kerja adalah 39.55500 %

PDBkap : *Median* Produk Domestik Bruto adalah 29582.58Rupiah

TPT : *Median* Tingkat Pengangguran Terbuka adalah 4.370000%

JOM : *Median* Jumlah Orang Miskin adalah 8.270000 Jiwa

c. *Maximum* (Maksimum)

PE : *Maximum* Pertumbuhan Ekonomi adalah 2151041 %

INF : *Maximum* Inflasi adalah 1191.000%

INV : *Maximum* Investasi adalah 128402.1 Milliar

JTN : *Maximum* Jumlah Tenaga Kerja adalah 68.45000%

PDBkap : *Maximum* Produk Domestik Bruto adalah 201315.1 Rupiah

TPT : *Maximum* Tingkat Pengangguran Terbuka adalah 10.51000 %

JOM : *Maximum* Jumlah Orang Miskin adalah 31.53000 Jiwa

d. Minimum

PE : Minimum Pertumbuhan Ekonomi adalah 0.000000 %

INF : Minimum Inflasi adalah 0.000000%

INV : Minimum Investasi adalah 0.000000 Milliar

JTN : Minimum Jumlah Tenaga Kerja adalah 0.000000 %

PDBkap : Minimum Produk Domestik Bruto adalah 0.000000 Rupiah

TPT : Minimum Tingkat Pengangguran Terbuka adalah 0.000000 %

JOM : Minimum Jumlah Orang Miskin adalah 0.000000 Jiwa

e. Standar Deviasi

PE : Standar Deviasi Pertumbuhan Ekonomi adalah 425938.7 %

INF : Standar Deviasi Inflasi adalah 346.0564%

- INV : Standar Deviasi Investasi adalah 19965.03Milliar menunjukkan tingkat variasi investasi
- JTN : Standar Deviasi Jumlah Tenaga Kerja adalah 14.73873% menunjukkan tingkat variasi jumlah tenaga kerja
- PDBkap : Standar Deviasi Produk Domestik Bruto adalah 33143.71 Rupiah menunjukkan tingkat variasi produk domestik bruto perkapita
- TPT : Standar Deviasi Tingkat Pengangguran Terbuka adalah 2.324088% menunjukkan tingkat variasi tingkat pengangguran terbuka
- JOM : Standar Deviasi Jumlah Orang Miskin adalah 6.459909 Jiwa menunjukkan tingkat variasi jumlah orang miskin.

4.3.2 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 4. 11 Hasil Olahan Regresi Linier Berganda

Dependent Variable: PE
Method: Panel Least Squares
Date: 05/22/25 Time: 11:15
Sample: 2012 2024
Periods included: 6
Cross-sections included: 38
Total panel (balanced) observations: 228

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-42779.31	45335.48	-0.943617	0.3464
INF	170.3304	44.83366	3.799164	0.0002
INV	17.41713	0.840530	20.72160	0.0000
PDBKAP	0.843991	0.578323	1.459378	0.1459
JTK	-2861.927	1427.710	-2.004558	0.0462
TPT	39175.12	8089.004	4.843009	0.0000
JOM	-3364.903	2296.033	-1.465529	0.1442
R-squared	0.762397	Mean dependent var	271328.1	
Adjusted R-squared	0.755946	S.D. dependent var	425938.7	
S.E. of regression	210421.5	Akaike info criterion	27.38183	
Sum squared resid	9.79E+12	Schwarz criterion	27.48712	
Log likelihood	-3114.529	Hannan-Quinn criter.	27.42431	
F-statistic	118.1871	Durbin-Watson stat	0.309238	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Eviews 12, diolah 2025

Dari hasil regresi pertama diatas, tidak ditemukan masalah yang terdapat pada setiap variabel bebas yang berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat yaitu Pertumbuhan Ekonomi (PE). Pada tingkat signifikan 15% ($\alpha > 15\%$). Hasil regresi juga menghasilkan nilai *R-squared* yang sangat tinggi yaitu sebesar 0,762397 artinya kemampuan variabel terikat. Oleh karena itu penelitian dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

Tabel 4. 12 Hasil Regresi Setelah Menghapus Variabel JOM

Dependent Variable: PE				
Method: Panel Least Squares				
Date: 05/22/25 Time: 11:26				
Sample: 2012 2024				
Periods included: 6				
Cross-sections included: 38				
Total panel (balanced) observations: 228				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-74520.82	39930.01	-1.866286	0.0633
INF	161.0757	44.50129	3.619574	0.0004
INV	17.42208	0.842693	20.67429	0.0000
PDBKAP	0.983917	0.571860	1.720557	0.0867
JTK	-2687.065	1426.388	-1.883824	0.0609
TPT	37078.67	7982.064	4.645248	0.0000
R-squared	0.760088	Mean dependent var		271328.1
Adjusted R-squared	0.754684	S.D. dependent var		425938.7
S.E. of regression	210964.7	Akaike info criterion		27.38273
Sum squared resid	9.88E+12	Schwarz criterion		27.47298
Log likelihood	-3115.632	Hannan-Quinn criter.		27.41914
F-statistic	140.6676	Durbin-Watson stat		0.301388
Prob(F-statistic)	0.000000			

Dari hasil regresi kedua diatas, setelah menghapus satu variabel bebas Jumlah Orang Miskin (JOM), ditemukan hasil yang sesuai dengan hipotesis yang seharusnya jika Pertumbuhan Ekonomi naik maka Jumlah Orang Miskin seharusnya menurun dan ditemukan bahwa variabel bebas yaitu Jumlah Orang

Miskin (JOM) yang sebelumnya tidak signifikan menjadi berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat yaitu Pertumbuhan Ekonomi (PE) pada tingkat signifikansi 15% ($\alpha > 0.15$). Hasil regresi juga menghasilkan nilai *R-squared* yang sangat tinggi yaitu sebesar 0.760088, artinya kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat. Oleh karena itu, penelitian dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

Tabel 4. 13 Ringkasan Hasil Pengolahan Data Model Estimasi

Variabel	OLS (<i>Ordinary Least Square</i>)	
	Model sebelum dihapus	Model setelah Penghapusan variabel
INF	0.0002**** (170.3304)	0.0004**** (161.0757)
INV	0.0000**** (17.41713)	0.0000**** (17.42208)
PDBKAP	0.1459* (0.843991)	0.0867** (0.983917)
JTK	0.0462** (-2861.927)	0.0609** (-2687.065)
TPT	0.0000**** (39175.12)	0.0000**** (37078.67)
JOM	0.1442* (-3364.903)	-
Konstanta	-42779.31	0.0633
<i>Number of Obs</i>	228	228
<i>Adj. R-Squared</i>	0.755946	0.754684
<i>R (Correlation)</i>	76.22	76.00
Uji F	118.1871 (0.000000)	140.6676 (0.000000)
<i>Durbin Watson</i>	0.309238	0.301388

Sumber: *Eviews 12*, diolah 2025

Keterangan: Level of Significant, ****1%, ***5%, **10%, *15%; Coefficient, (T-Statistic)

A. Penaksiran

1) Korelasi (R)

Dari hasil regresi diperoleh nilai R sebesar artinya bahwa derajat keeratan antara variabel Inflasi (INFit), Investasi (INVit), Jumlah Tenaga Kerja (JTKit), Produk Domestik Bruto Pendapatan Perkapita (PDRBkit), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPTit), terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE) menggambarkan hubungan yang sangat erat.

2) Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (*R-Squared*) menunjukkan besarnya kontribusi atau proporsi persentase variabel bebas yaitu variabel, Investasi (INVit), Jumlah Tenaga Kerja (JTKit), Produk Domestik Bruto Pendapatan Perkapita (PDRBkit), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPTit) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE). Berdasarkan hasil regresi didapatkan nilai *R-Squared* sebesar 0,762397, artinya kontribusi sebesar 76,%. Sedangkan sisanya sebesar 0,76% dijelaskan oleh variabel lain diluar dari model estimasi ini atau berada pada *disturbance error term*.

3) Interpretasi Hasil

Dari hasil regresi diatas maka model ekonometrikanya yaitu:

$$PE_{it} = \beta_0 + \beta_1 INFit + \beta_2 INVit + \beta_3 PDRBK_{it} + \beta_4 JTK_{it} + \beta_5 TPT_{it} + \epsilon_t$$

Interpretasi hasil model sebagai berikut:

$$PE_{it} = (-74520.82) + (161.0757) INFit + (17.42208) INVit + (0.983917)$$

$$PDRBK_{it} + (-2687.065) JTK_{it} + (37078.67) TPT_{it} + \epsilon_t$$

Koefisien $\beta_0 = -74520.82$, artinya nilai tersebut menunjukkan bahwa jika variabel, Investasi (INVit), Jumlah Tenaga Kerja (JTKit), Produk Domestik Bruto

Pendapatan Perkapita (PDRB_{kit}), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT_{it}), dan Jumlah Orang Miskin (JOM_{it}) maka Pertumbuhan Ekonomi (PE) -74520.82% dan jika dilihat dari hasil olahan diketahui nilai probabilitasnya sebesar 0.0633 ($\alpha < 1\%$) yang berarti signifikan. Artinya dapat disimpulkan bahwa benar jika prediksi Pertumbuhan Ekonomi (PE) akan bertambah sebesar -74520.82% jika menambahkan variabel bebas diatas.

Koefisien $\beta_1 = 170.3304$ artinya jika Inflasi (INF) naik diperkirakan tingkat Pertumbuhan Ekonomi naik sebesar 170.3304%, dan jika dilihat dari hasil olahan data diatas ternyata signifikan dikarenakan nilai probabilitasnya sebesar 0.0004 ($\alpha = 15\%$). Maka dapat disimpulkan bahwa benar inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE).

Koefisien $\beta_2 = 161.0757$, artinya jika Investasi (INV) naik diperkirakan Pertumbuhan Ekonomi akan naik sebesar 161.0757, dan jika dilihat dari hasil olahan data diatas ternyata signifikan dikarenakan nilai probabilitasnya sebesar 0.0000 ($\alpha < 15\%$). Maka dapat disimpulkan bahwa Investasi berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE).

Koefisien $\beta_3 = 0.983917$, artinya jika Produk Domestik Bruto perkapita (PDBKAP) naik diperkirakan Pertumbuhan Ekonomi akan naik sebesar 0.983917%, dan jika dilihat dari hasil olahan data diatas ternyata signifikan dikarenakan nilai probabilitasnya sebesar 0.0867 ($\alpha < 15\%$). Maka dapat disimpulkan bahwa benar Produk Domestik Bruto perkapita (PDBKAP) berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE).

Koefisien $\beta_4 = -2687.065$, artinya jika Jumlah Tenaga Kerja (JTK) naik diperkirakan Pertumbuhan Ekonomi akan turun sebesar -2687.065%. Jika dilihat dari hasil olahan data diatas ternyata signifikan dikarenakan nilai probabilitasnya

sebesar 0.0609 ($\alpha < 15\%$). Maka dapat disimpulkan bahwa benar Jumlah Tenaga Kerja berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE).

Koefisien $\beta_5 = 37078.67$, artinya jika Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) naik diperkirakan Pertumbuhan Ekonomi akan turun sebesar 37078.67%. Jika dilihat dari hasil olahan data diatas ternyata signifikan dikarenakan nilai probabilitasnya sebesar 0.0000 ($\alpha < 15\%$). Maka dapat disimpulkan bahwa benar Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE).

B. Uji Statistik

1) Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan (Uji F) bertujuan untuk pengujian signifikansi semua variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat.

Dimana rumus mencari F_{hitung} adalah: $F = \frac{R^2/K-1}{(1-R^2)/(n-k)}$

Dimana:

k = Jumlah parameter yang diestimasi

n = Jumlah data yang di observasi

F_{hitung} adalah sebagai berikut:

$$F = \frac{\frac{0.992324}{5} - 1}{\frac{1-0.992324}{228-5}} = 3943.068$$

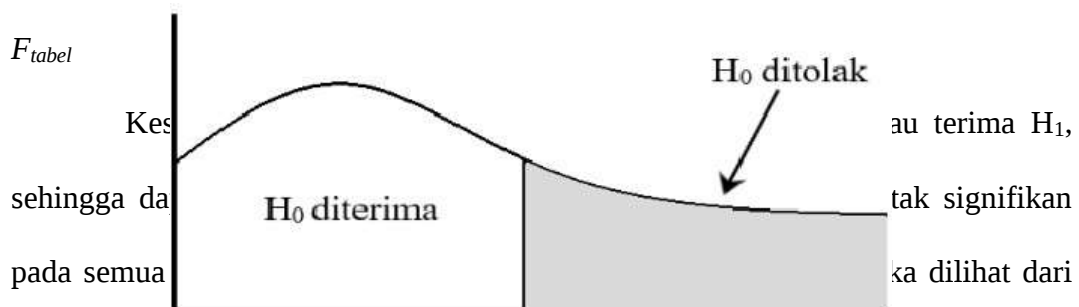
Dari hasil regresi didapati variabel Inflasi (INF), Investasi (INV), Produk Domestik Bruto Perkapita (PDBKAP), Jumlah Tenaga Kerja (JTK), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dalam menjelaskan variabel Pertumbuhan Ekonomi (PE) memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0633.

Nilai F_{hitung} akan dibandingkan dengan $F_{tabel} = (\alpha; df1 = k-1; df2 = n-k)$ maka $F_{tabel} = (10\%; df1=7-1; df2=170-7) = (0.1; 6; 163)$ dengan demikian nilai F_{tabel} adalah 2.802.

Kriteria uji:

Terima H_0 jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, hal lain tolak H_0 , atau dalam distribusi kurva

F dapat digambarkan sebagai berikut:



olahan *Eviews*, nilai probabilitasnya 0.000000 atau berada pada alpha 1% yang berarti signifikan. Sehingga ada hubungan yang secara serentak antara variabel Inflasi (INF), Investasi (INV), Produk Domestik Bruto Perkapita (PDBKAP), Jumlah Tenaga Kerja (JTK), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dalam menjelaskan variabel terikat Pertumbuhan Ekonomi (PE).

2) Uji Parsial (Uji t)

Uji-t statistik bertujuan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel bebas secara individual atau masing-masing dalam menjelaskan variabel terikat.

Rumus t_{hitung} sebagai berikut:

$$th = \frac{\beta_i}{Se \beta_i}$$

Dimana:

β_i : Koefisien regresi variabel

Se β_i : Standar error dari masing-masing koefisien

Jika di masukkan nilai setiap koefisien ke dalam rumus tersebut maka menjadi sebagai berikut:

a. Inflasi (INF)

$$th = \frac{161.0757}{44.50129} = 3.619574$$

b. Investasi (INV)

$$th = \frac{17.42208}{0.842693} = -20.67429$$

c. Produk Domestik Bruto Perkapita (PDBKAP)

$$th = \frac{0.983917}{0.571860} = 1.720557$$

d. Jumlah Tenaga Kerja (JTK)

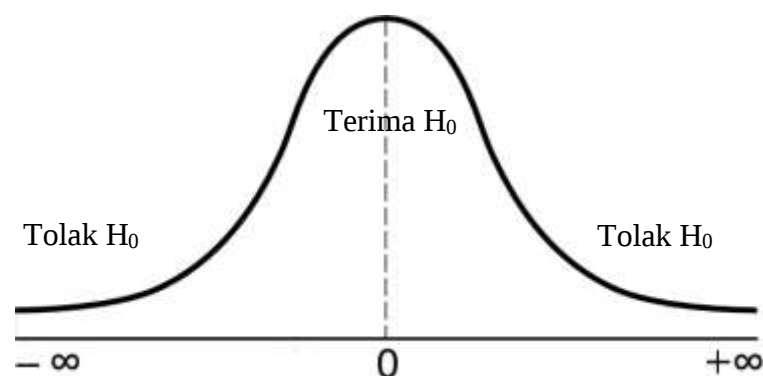
$$th = \frac{-2687.065}{1426.388} = -1.883824$$

e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

$$th = \frac{37078.67}{7982.064} = 4.645248$$

Adapun dalam penelitian ini untuk melihat nilai tabel dengan cara mencari $df = (n-k) = 228 - 5 = 223$ dengan $(\alpha = 10\%/2=0.05)$ maka nilai tabel sebesar ± 1.65222 .

Terima H_0 jika $-t_{tabel} < t_{hitung} < t_{tabel}$, hal lain tolak H_0 atau dalam distribusi kurva normal t dapat digambarkan sebagai berikut:



Kesimpulan

- a. t_{hitung} Inflasi (INF) 3.619574, berada di luar $\pm t_{tabel}$ atau dalam kriteria uji - $1.65222 < 3.619574 > 1.65222$ maka tolak H_0 atau terima H_1 artinya ada hubungan yang signifikan antara investasi terhadap nilai Pertumbuhan Ekonomi (PE).
- b. t_{hitung} Investasi -20.67429 , berada di luar $\pm t_{tabel}$ atau dalam kriteria uji - $1.65222 > -20.67429 < 1.65222$ maka tolak H_0 atau terima H_1 artinya ada hubungan yang signifikan jumlah tenaga kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE).
- c. t_{hitung} Produk Domestik Bruto Perkapita (PDBKAP) 1.720557, berada di luar $\pm t_{tabel}$ atau dalam kriteria uji $-1.65222 > 1.720557 < 1.65222$ maka tolak H_0 atau terima H_1 artinya ada hubungan yang signifikan produk domestik bruto perkapita terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE).
- d. t_{hitung} Jumlah Tenaga Kerja (TPT)-1.883824 , berada di luar $\pm t_{tabel}$ atau dalam kriteria uji $-1.65222 < -1.883824 > 1.65222$ maka tolak H_0 atau terima H_1 artinya ada hubungan yang signifikan tingkat pengangguran terbuka terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE).
- e. t_{hitung} Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4.645248 , berada di luar $\pm t_{tabel}$ atau dalam kriteria uji $-1.65222 < 4.645248 > 1.65222$ maka tolak H_0 atau terima H_1 artinya ada hubungan yang signifikan jumlah orang miskin terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE).

C. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Multikolinearitas Matriks Parsial (terbebas)

Tabel 4. 14 Hasil Uji Multikolinearitas

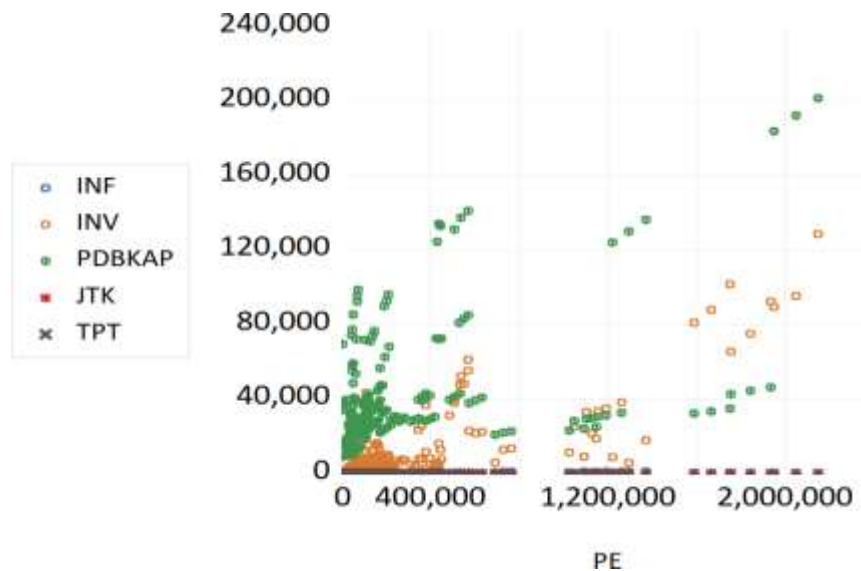
	INF	INV	PDBKAP	JTK	TPT
INF	1.000000	-0.263046	-0.089089	0.136932	0.240408
INV	-0.263046	1.000000	0.488752	0.309249	0.231949
PDBKAP	-0.089089	0.488752	1.000000	0.585663	0.337279
JTK	0.136932	0.309249	0.585663	1.000000	0.628636
TPT	0.240408	0.231949	0.337279	0.628636	1.000000

Sumber: Eviews 12, diolah 25

Koefisien korelasi INF dan INV sebesar $-0.263046 < 0,85$, INF dan PDBKAP sebesar $-0.089089 < 0,85$ INF dan JTK sebesar $0.136932 < 0,85$ INF dan TPT sebesar $0.240408 < 0,85$. INF, INV, PDBKAP, JTK, TPT, memiliki nilai yang kurang dari 0,85. Maka dapat disimpulkan bahwa terbebas dari multikolineritas.

2) Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residual satu pengamatan yang lain tetap, maka disebut terjadi heterokedastisitas dan jika berbeda disebut tidak heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah terbebas dari heterokedastisitas. Untuk melihat ada atau tidaknya heterokedastisitas, dapat dilakukan dengan melihat grafik *scatterplot* antara nilai prediksi variabel dependen dengan residualnya. Dasar analisis heterokedastisitas sebagai berikut :



Sumber: Eviews 12, diolah 2025

Gambar 4. 10 Scatterplot Model

Gambar diatas menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara berkelompok, membentuk pola garis lurus walaupun tidak sejajar serta atas, samping, dan bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian tidak terjadi heterokedastisitas pada model estimasi.

3) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan penggunaan pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Untuk menguji apakah suatu model terdapat autokorelasi dalam penelitian ini maka digunakan uji digunakan uji statistik *Durbin Watson* yaitu dengan cara melihat nilai (D-W) yang diperoleh.

Tabel 4. 15 Hasil Uji Auto Korelasi

R-squared	0.760088	Mean dependent var	271328.1
Adjusted R-squared	0.754684	S.D. dependent var	425938.7
S.E. of regression	210964.7	Akaike info criterion	27.38273
Sum squared resid	9.88E+12	Schwarz criterion	27.47298
Log likelihood	-3115.632	Hannan-Quinn criter.	27.41914
F-statistic	140.6676	Durbin-Watson stat	0.301388
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Eviews 12, diolah 2025

Pada model estimasi yang dilakukan dengan uji *Fixed Effect Model* (FEM) diperoleh nilai *Durbin Watson* sebesar 0.301388 artinya pada model diduga terkena dari masalah autokorelasi. Dikatakan sudah terkena dari masalah autokorelasi, dimana standar suatu model terdapat masalah autokorelasi apabila D-W yang diperoleh $1 < 0.30 < 2$. Peneliti melakukan perbaikan pada model auto korelasi, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 16 Hasil Uji Korelasi Setelah Melakukan Perbaikan

Dependent Variable: PE
Method: Panel Least Squares
Date: 05/22/25 Time: 11:34
Sample (adjusted): 2013 2024
Periods included: 5
Cross-sections included: 38
Total panel (balanced) observations: 190
Convergence achieved after 7 iterations

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	92111.29	54762.39	1.682017	0.0943
INF	-25.95134	8.057535	-3.220755	0.0015
INV	4.737834	0.422316	11.21869	0.0000
PDBKAP	0.742162	0.317130	2.340246	0.0203
JTK	-539.4676	466.0439	-1.157547	0.2486
TPT	5784.109	2863.462	2.019970	0.0448
AR(1)	1.059697	0.010219	103.6993	0.0000
R-squared	0.992324	Mean dependent var	284879.0	
Adjusted R-squared	0.992073	S.D. dependent var	444858.6	
S.E. of regression	39608.37	Akaike info criterion	24.04761	
Sum squared resid	2.87E+11	Schwarz criterion	24.16724	
Log likelihood	-2277.523	Hannan-Quinn criter.	24.09607	
F-statistic	3943.068	Durbin-Watson stat	2.358947	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Eviews 12, diolah 2025

Pada model estimasi yang dilakukan dengan uji *Fixed Effect Model* (FEM) diperoleh nilai Durbin Watson sebesar 2.358947 artinya pada model yang digunakan tidak terdapat masalah setelah menambahkan AR (1). Dikatakan sudah terbebas dari masalah autokorelasi, dimana standar suatu model terbebas masalah autokorelasi apabila D-W yang diperoleh $1 < 2.35 < 3$.

4) Uji Hausman

Tabel 4. 17 Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test				
Equation: Untitled				
Test cross-section random effects				
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.	
Cross-section random	144.891437	5	0.0000	
Cross-section random effects test comparisons:				
Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
INF	-4.687474	9.984923	3.314275	0.0000
INV	7.010119	7.852444	0.009846	0.0000
PDBKAP	0.674843	0.886340	0.021920	0.1531
JTK	-873.093...	-288.861393	81999.182...	0.0413
TPT	6141.123...	13537.911...	2000279.5...	0.0000

Sumber : Eviews 12, diolah 2025

Dari hasil uji *Fixed Effect Model* (FEM) maka diperoleh nilai time-series random sebesar 0.0000, nilai probability < 0.05 maka model yang dipilih adalah *fixed effect*, disimpulkan bahwa *fixed effect* lebih tepat dibandingkan dengan model *random effect*.

B. Pembahasan

1. Pengaruh Inflasi terhadap Pertumbuhan ekonomi

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut ditunjukkan oleh hasil olahan data menggunakan *evIEWS* dimana hasil olahan menunjukkan adanya pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai probabilitas (0.0004). Penelitian Novita Pratiwi (2020), menemukan bahwa inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah, dan penelitian Erika Simanungkalit (2020), menemukan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

2. Pengaruh Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa investasi berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut ditunjukkan oleh hasil olahan data menggunakan *evIEWS* dimana hasil olahan menunjukkan adanya pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai probabilitas (0.0000). Penelitian Sari (2018), menemukan bahwa investasi berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

3. Pengaruh PDRB per Kapita terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa PDRB perkapita berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut ditunjukkan oleh olahan data menggunakan *evIEWS* dimana hasil olahan menunjukkan adanya pengaruh PDRB perkapita terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai probabilitas (0.0867). Penelitian Eliza (2019), menemukan bahwa PDRB perkapita berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dari hasil penelitian penulis dengan penelitian terdahulu sejalan.

4. Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa jumlah tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut ditunjukkan oleh data menggunakan eviews dimana hasil olahan menunjukkan adanya pengaruh jumlah tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai probabilitas (0.0609). Penelitian Novita Pratiwi (2022) menemukan bahwa jumlah tenaga kerja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

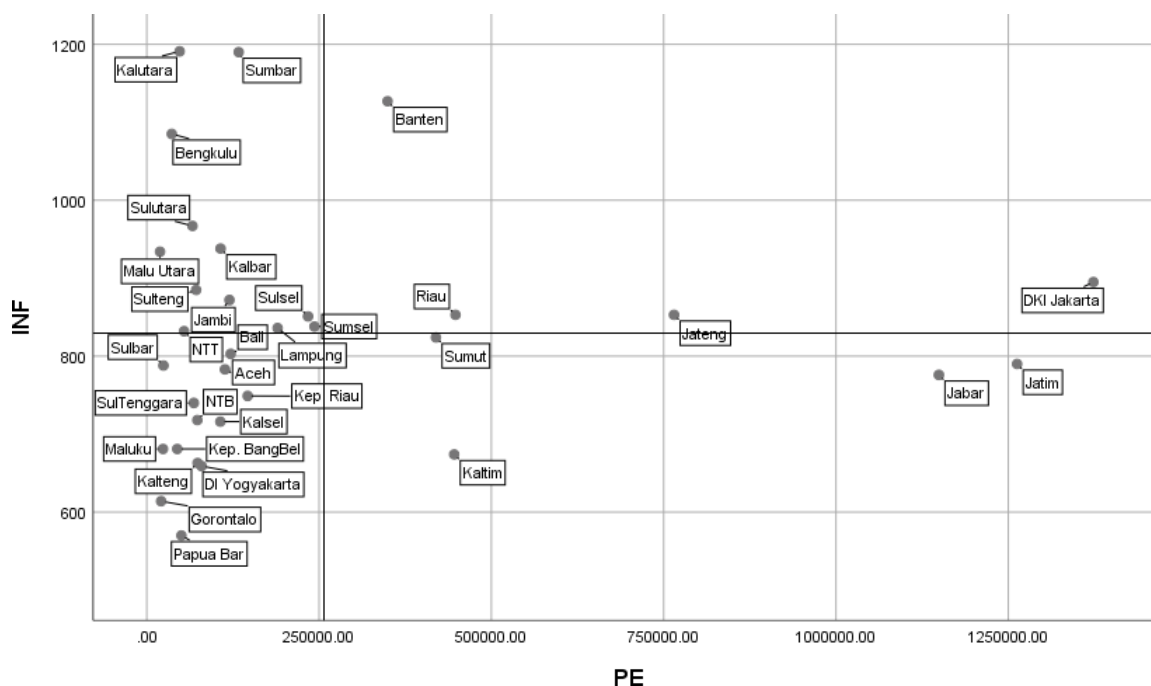
5. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut ditunjukkan oleh data menggunakan eviews dimana hasil olahan menunjukkan adanya pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai probabilitas (0.0000). Penelitian Novita Pratiwi (2022) menemukan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ini memberikan berbagai perspektif terkait hubungan antar variabel-variabel penelitian terhadap pertumbuhan ekonomi.

4.4 Analisis Tipologi Klassen

4.4.1 Analisis Tipologi Klassen Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi



Sumber: IBM SPSS STATISTIC 25, diolah 2025

Gambar 4. 11 Tipologi Klassen Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Tahun 2014

Berdasarkan hasil analisis tipologi kelas yang tertera pada gambar 4.3 di atas Indonesia terdiri 33 provinsi dibagi dalam empat kuadran Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi. Kuadran ini dibentuk berdasarkan dua kriteria utama, yaitu apakah pertumbuhan ekonomi suatu provinsi lebih tinggi atau lebih rendah dari rata-rata nasional, serta apakah tingkat inflasi provinsi tersebut lebih tinggi atau lebih rendah dari inflasi nasional. Hasil per-Provinsi pada tahun 2014 diperoleh sebagai berikut:

Tabel 4. 18 Tipologi Klassen Berdasarkan Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi per Provinsi Tahun 2014

Pertumbuhan Ekonomi (PE) Inflasi (INF)	(PE < PE)	(PE > PE)
(INF _i > INF)	KUADRAN II Kalimantan Utara Sumatera Barat Bengkulu Sulawesi Utara Maluku Utara Kalimantan Barat Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Jambi Sumatera Selatan Nusa Tenggara Timur Lampung	KUADRAN I Riau DKI Jakarta Jawa Tengah Banten
(INF _i < INF)	KUADRAN III Sulawesi Barat Bali Aceh Sulawesi Tenggara Nusa Tenggara Barat Kepulauan Riau Kalimantan Selatan Maluku Kepulauan Bangka Belitung Kalimantan Tengah DI Yogyakarta Gorontalo Papua Barat	KUADRAN IV Sumatera Utara Kalimantan Timur Jawa Barat Jawa Timur

Sumber: IBM SPSS STATISTIC 25, diolah 2025

Kuadran I terdiri dari provinsi dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari rata-rata nasional dan inflasi yang juga lebih tinggi. Wilayah dalam kategori ini meliputi Riau, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Banten. Daerah-daerah ini mencerminkan aktivitas ekonomi yang dinamis dengan tingkat produksi dan konsumsi yang tinggi, namun diiringi dengan tekanan inflasi yang signifikan. Tingginya inflasi dapat disebabkan oleh peningkatan permintaan agregat maupun gangguan pada sisi pasokan, terutama di wilayah metropolitan dan pusat industri.

Oleh karena itu, meskipun pertumbuhan ekonomi yang tinggi menunjukkan perkembangan positif, pengelolaan inflasi menjadi penting agar keseimbangan makroekonomi tetap terjaga dan tidak mengganggu daya beli masyarakat.

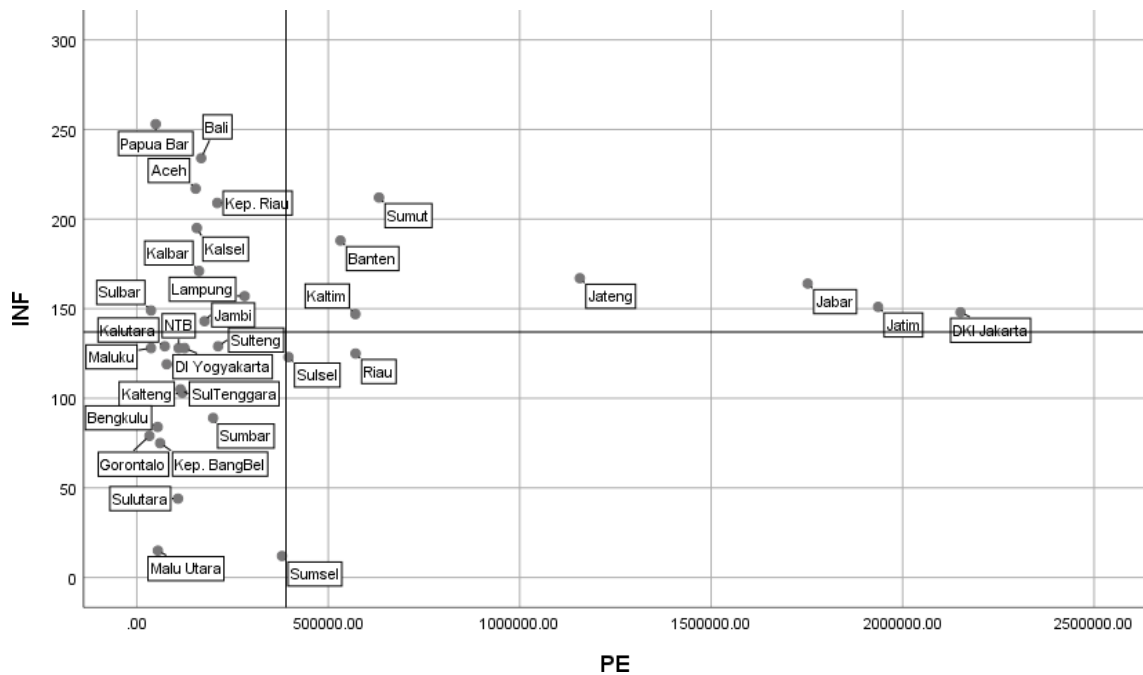
Kuadran II mencakup provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata nasional, tetapi mengalami inflasi yang tinggi. Provinsi yang termasuk dalam kategori ini antara lain Kalimantan Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Jambi, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Lampung. Kondisi ini mencerminkan tantangan ekonomi yang serius karena rendahnya produktivitas tidak mampu mengimbangi tekanan harga, sehingga dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat. Penyebabnya bisa berasal dari keterbatasan infrastruktur, ketergantungan pada sektor primer, atau distribusi logistik yang belum efisien. Daerah-daerah ini membutuhkan intervensi kebijakan yang menasar peningkatan kapasitas produksi, diversifikasi ekonomi, serta pengendalian harga komoditas penting secara lebih efektif.

Kuadran III terdiri dari provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang sama-sama di bawah rata-rata nasional. Wilayah-wilayah dalam kategori ini antara lain Sulawesi Barat, Bali, Aceh, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan, Maluku, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, DI Yogyakarta, Gorontalo, dan Papua Barat. Kondisi ini mencerminkan stabilitas harga, namun juga menunjukkan stagnasi ekonomi karena rendahnya pertumbuhan. Rendahnya inflasi kemungkinan mencerminkan lemahnya daya beli masyarakat atau belum

optimalnya aktivitas ekonomi. Meskipun tekanan harga tidak menjadi persoalan, daerah-daerah ini tetap perlu didorong melalui stimulus fiskal dan investasi untuk mengakselerasi pertumbuhan, khususnya di sektor-sektor potensial seperti pariwisata, pertanian modern, dan ekonomi kreatif.

Kuadran IV adalah kategori yang paling ideal karena terdiri dari wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi dan inflasi rendah. Provinsi yang masuk dalam kuadran ini adalah Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Wilayah-wilayah ini menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan ekonomi, di mana aktivitas produksi meningkat tanpa menimbulkan tekanan harga yang besar. Kinerja seperti ini menunjukkan struktur ekonomi yang sehat, sistem distribusi yang baik, serta kebijakan daerah yang mendukung pertumbuhan secara inklusif dan berkelanjutan. Daerah dalam kuadran ini dapat menjadi motor penggerak ekonomi nasional dan menjadi contoh penerapan kebijakan pembangunan yang efektif.

Daerah-daerah yang masuk dalam kuadran II dan III memerlukan perhatian khusus dari pemerintah pusat dan daerah untuk mendorong pertumbuhan dan menjaga stabilitas harga, sementara daerah di kuadran I dan IV perlu terus memperkuat fondasi ekonomi agar pertumbuhan yang telah dicapai dapat berkelanjutan. Kemudian dapat di lihat juga pada data tipologi berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi per provinsi pada tahun 2024:



Sumber: IBM SPSS STATISTIC 25, diolah 2025

Gambar 4. 12 Tipologi Klassen Berdasarkan Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Tahun 2024

Berdasarkan hasil analisis tipologi klassen yang tertera pada gambar 4.4 diatas Indonesia terdiri dari 33 provinsi dibagi dalam empat kuadran Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi. Klasifikasi ini tidak hanya mencerminkan tingkat kemajuan ekonomi suatu daerah, tetapi juga menggambarkan tantangan yang dihadapi dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan inflasi.

Kuadran I menunjukkan daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi namun disertai inflasi tinggi, sedangkan Kuadran II mencerminkan daerah yang belum tumbuh secara optimal tetapi mengalami tekanan inflasi yang relatif besar. Kuadran III menggambarkan daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang sama-sama rendah, sementara Kuadran IV merupakan kondisi paling ideal dengan pertumbuhan ekonomi tinggi dan inflasi rendah. Berikut ini

adalah hasil klasifikasi masing-masing provinsi ke dalam kuadran-kuadran tersebut. Hasil per provinsi pada tahun 2024 diperoleh sebagai berikut:

Tabel 4. 19 Tipologi Klassen Berdasarkan Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi per Provinsi Tahun 2024

Pertumbuhan Ekonomi (PE) Inflasi (INF)	(PE _i < PE)	(PE _i > PE)
(INF _i > INF)	KUADRAN II Papua Barat Bali Aceh Kepulauan Riau Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Sulawesi Barat Lampung Jambi	KUADRAN I Sumatera Utara Banten Kalimantan Timur Jawa Tengah Jawa Barat Jawa Timur DKI Jakarta
(INF _i < INF)	KUADRAN III Kalimantan Utara Nusa Tenggara Barat Sulawesi Tengah Maluku DI Yogyakarta Kalimantan Tengah Sulawesi Tenggara Bengkulu Sumatera Barat Gorontalo Kepulauan Bangka Belitung Sulawesi Utara Maluku Utara Sumatera Selatan	KUADRAN IV Sulawesi Selatan Riau

Sumber: IBM SPSS STATISTIC 25, diolah 2025

Kuadran I mencakup provinsi-provinsi dengan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional dan inflasi yang juga lebih tinggi dari nasional. Provinsi dalam kategori ini antara lain Sumatera Utara, Banten, Kalimantan Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI Jakarta. Kondisi ini menunjukkan aktivitas ekonomi yang dinamis dan berkembang pesat, namun dengan tekanan harga yang tinggi. Inflasi tinggi di tengah pertumbuhan mengindikasikan adanya

peningkatan permintaan agregat atau gangguan pada sisi pasokan. Oleh karena itu, meskipun pertumbuhan tinggi merupakan hal yang positif, inflasi yang menyertainya memerlukan perhatian agar tidak mengganggu stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Kuadran II berisi provinsi yang mengalami pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata nasional disertai inflasi yang tinggi. Wilayah yang termasuk dalam kategori ini adalah Papua Barat, Bali, Aceh, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Lampung, dan Jambi. Kondisi ini merupakan kombinasi yang paling rentan karena lemahnya daya saing ekonomi daerah disertai penurunan daya beli masyarakat akibat tekanan harga. Hal ini dapat disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur, ketergantungan pada sektor ekonomi primer, serta kurangnya diversifikasi ekonomi. Daerah dalam kuadran ini memerlukan intervensi kebijakan yang fokus pada perbaikan iklim investasi, penguatan sektor produktif, serta stabilisasi harga kebutuhan pokok.

Kuadran III terdiri dari provinsi dengan pertumbuhan ekonomi rendah dan inflasi yang juga rendah. Provinsi-provinsi seperti Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Maluku, DI Yogyakarta, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Bengkulu, Sumatera Barat, Gorontalo, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Sumatera Selatan tergolong dalam kuadran ini. Rendahnya inflasi di wilayah ini dapat disebabkan oleh lemahnya permintaan, yang mencerminkan stagnasi ekonomi. Meskipun stabilitas harga terjaga, kondisi ini menandakan bahwa aktivitas ekonomi belum berkembang secara optimal. Untuk mendorong pertumbuhan, diperlukan kebijakan yang

mampu meningkatkan daya beli masyarakat, mengembangkan sektor ekonomi kreatif, serta memberikan stimulus fiskal bagi pelaku usaha lokal.

Kuadran IV, yang merupakan kategori paling ideal, mencakup provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi dengan inflasi yang rendah, yaitu Sulawesi Selatan dan Riau. Daerah-daerah ini menunjukkan kinerja ekonomi yang efisien dan berkelanjutan. Tingginya pertumbuhan menandakan peningkatan aktivitas ekonomi yang kuat, sedangkan inflasi yang rendah menunjukkan kestabilan harga yang mampu menjaga daya beli masyarakat. Keberhasilan wilayah ini dapat disebabkan oleh struktur ekonomi yang beragam, kualitas infrastruktur yang baik, serta efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung iklim usaha. Provinsi-provinsi ini berpotensi menjadi pusat pertumbuhan baru dan dapat menjadi model pembangunan ekonomi bagi wilayah lain di Indonesia.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara analisis ekonomi deskriptif, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Pengangguran, dan Kemiskinan pada pemerintahan Pada era SBY (2004–2014), pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 5,78% per tahun meskipun menghadapi krisis keuangan global tahun 2008–2009. Inflasi pada masa ini cenderung fluktuatif dengan rata-rata 7,9% per tahun, dipengaruhi oleh kenaikan harga energi dan gejolak eksternal. Tingkat pengangguran berhasil ditekan secara bertahap dari angka 9,86% menjadi 5,94%, dan angka kemiskinan juga menurun berkat kebijakan stabilisasi ekonomi dan pengembangan UMKM. Memasuki era pemerintahan Joko Widodo (2015–2024), fokus utama kebijakan diarahkan pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan konektivitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sedikit lebih rendah dengan rata-rata sekitar 5%, dan sempat mengalami kontraksi akibat pandemi COVID-19 pada 2020. Namun demikian, inflasi lebih stabil dengan rata-rata 3,3% per tahun. Tingkat pengangguran yang sempat melonjak selama pandemi berhasil diturunkan kembali hingga mencapai 4,91% pada 2024. Kemiskinan juga terus menurun, menunjukkan efektivitas program bantuan sosial dan pemulihan ekonomi. Meski demikian, analisis tipologi Klassen mengungkapkan bahwa ketimpangan pertumbuhan antarwilayah masih

terjadi, menandakan perlunya pemerataan pembangunan yang lebih merata ke seluruh provinsi di Indonesia.

2. Hasil estimasi model ekonometrika terhadap beberapa variabel yang secara signifikan mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi, dimana variabel Inflasi (INF), Investasi (INV), Jumlah Tenaga Kerja (JTK), Produk Domestik Bruto perkapita (PDBKAP), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Jumlah Orang Miskin (JOM) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Jumlah Pertumbuhan Ekonomi.
3. Analisis tipologi Klassen terhadap pertumbuhan ekonomi dan inflasi di Indonesia tahun 2014 dan 2024 menunjukkan bahwa terjadi dinamika spasial dalam pembangunan antarprovinsi. Pada tahun 2014, mayoritas provinsi tergolong dalam kategori wilayah tertinggal dan tertekan, yang mencerminkan rendahnya laju pertumbuhan ekonomi disertai tekanan inflasi yang cukup tinggi. Namun, pada tahun 2024 terlihat pergeseran yang positif, di mana beberapa provinsi mengalami peningkatan klasifikasi menjadi maju dan cepat tumbuh, seperti Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Papua Barat.

Perubahan ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam stabilitas ekonomi regional seiring dengan implementasi kebijakan pembangunan yang lebih merata, terutama dalam infrastruktur dan intervensi sosial-ekonomi. Meski demikian, masih terdapat sejumlah provinsi yang stagnan pada kategori tertinggal, menandakan bahwa disparitas wilayah masih menjadi tantangan struktural dalam pembangunan nasional. Secara keseluruhan, tipologi Klassen memberikan

gambaran penting mengenai ketimpangan wilayah dan dapat menjadi acuan strategis bagi perumusan kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis wilayah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menyusun dan memberikan saran kepada pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu fokus pada pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
2. Diharapkan pemerintah memberikan kebijakan yang dapat memperkuat konektivitas dan akses ekonomi di wilayah tertinggal agar tidak terjadi ketimpangan pertumbuhan ekonomi antarprovinsi.
3. Pemerintah harus memperkuat sistem ekonomi agar lebih tahan terhadap guncangan global, seperti pandemi atau krisis energi, dengan memperluas basis industri domestik dan memperbaiki sistem logistik.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS). (n.d.). *Berbagai Publikasi Statistik Indonesia*. www.bps.go.id.
- CNBC Indonesia. (2023). *Kantong Orang RI Makmur Era SBY atau Jokowi? Ini Datanya*. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230607145221-128-443872/kantong-orang-ri-makmur-era-sby-atau-jokowi-ini-datanya>
- Cotti, E., Dessì, C., Piras, A., & Mercuro, G. (2011). Can a chronic dental infection be considered a cause of cardiovascular disease? A review of the literature. *International Journal of Cardiology*, 148(1), 4–10. <https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2010.08.011>
- Data Ketenagakerjaan Indonesia. (n.d.). *Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia*.
- Etik Umiyati. (2013). Analisa Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah Di Pulau Sumatera. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 9(2), 42–50.
- Franita, R. (2016). *Faktor-Faktor Penyebab Pengangguran dan Dampaknya terhadap Perekonomian*. Pustaka ekonomi.
- Gujarati, D. (2016). *Dasar-Dasar Ekonometrika*.
- Gusria Eliza. (2019). *Pengaruh Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh*.
- Iskandar. (2009). *Teori Ekonomi: Inflasi dan Kebijakan Moneter*. Universitas Indonesia.
- Kuncoro, M. (2013). *Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi*.
- Laporan Investasi Nasional. (n.d.). *Kementerian Investasi dan Hilirisasi Republik Indonesia*.
- Mankiw, N. G. (2013). *Macroeconomics (8th ed.)*. worth Publisher.
- Mankiw, N. Gregory. (2003). *Teori Pertumbuhan Ekonomi*.
- Mochtar, F., Ikram, M. A. M., & Agung, K. (2024). 766-1624-1-Sm. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan Regional*, 19, 1–56.
- Novita Pratiwi. (2022). Analisis Pengaruh Pengangguran dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2017-2021.

- Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 1(4), 155–166.
<https://doi.org/10.58192/populer.v1i4.300>
- Pratama, Y. C. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Indonesia. *Esensi*, 4(2). <https://doi.org/10.15408/ess.v4i2.1966>
- Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2001). *Economics (17th ed.)*.
- Simanungkalit, E. F. B. (2020). Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Journal of Management: Small and Medium Enterprises (SMEs)*, 13(3), 327–340. <https://doi.org/10.35508/jom.v13i3.3311>
- Sukirno, S. (1996). *Makroekonomi: Teori Pengantar*.
- Sukirno, S. (2016). *Makroekonomi: Teori Pengantar (Edisi Revisi)*. Rajawali pers.
- Susanto, R., & Pangesti, I. (2021). Pengaruh Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 7(2), 271. <https://doi.org/10.30998/jabe.v7i2.7653>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2013). *Economic Development (12th ed.)*. Pearson Education.
- Todaro, M. P. (2003). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*,.
- Wahyudi, S. T. (2020). *Ekonometrika Terapan: Pendekatan Data Panel dan Time Series*. Penerbit Universitas Gadjah Mada.
- wikipedia. (2024). *Economy of Indonesia*.
https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Indonesia
- Winardi, J. (1995). *Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro*. Rajawali pers.
- Dra. Roswita Hafni, M. S. (2024). *Statistika Ekonomi*. Perdana Mulya Sarana.

LAMPIRAN

A. Data Regresi Linear Berganda (Diolah)

➤ Data Regresi Panel

Pertumbuhan Ekonomi per Provinsi di Indonesia (%) tahun 2012-2024

Provinsi			Tahun			
	2012	2013	2014	2022	2023	2024
Aceh	1089149	1117558	113490.4	140971.7	146932.4	153780.4
Sumatera Utara	375924.1	398727.1	419573.3	573528.8	602236	632534.7
Sumatera Barat	118724.4	125940.6	133340.8	182628.3	191070.6	199407.4
Riau	425626	436187.5	447986.8	529533	551828.5	571233.6
Jambi	104615.1	111766.1	119991.4	161732	169277.6	176906.5
Sumatera Selatan	220459.2	232175.1	243297.8	343503.6	360967.5	379119.6
Bengkulu	32363.04	34326.37	36207.15	49916.06	52051.56	54454.65
Lampung	170769.2	180620	189797.5	257534.2	269240.5	281557.2
Kep. Bangka Belitung	40104.91	42190.86	44159.44	57804.21	60336.51	60802.64
Kep. Riau	128035	137263.9	146325.2	190111.1	199912.8	209939.1
DKI Jakarta	1222528	1296695	1373389	1953489	2050473	2151041
Jawa Barat	1028410	1093544	1149216	1589985	1669421	1752071
Jawa Tengah	691343.1	726655.1	764959.2	1050278	1102474	1157026
DI Yogyakarta	71702.45	75627.45	79536.08	112901.3	118625.5	124590.5
Jawa Timur	1124465	1192790	1262685	1757875	1844809	1935810
Banten	310385.6	331099.1	349351.2	484129.4	507425.7	531735.3
Bali	106951.5	114103.6	121787.6	150830.8	159447.7	168186
Nusa Tenggara Barat	66340.81	69766.71	73372.96	102073.7	103906.2	109415
Nusa Tenggara Timur	48863.19	51505.19	54107.97	72711.28	75234.57	78044.57
Kalimantan Barat	96161.93	101980.3	107115	148368.9	154980.8	162574.5
Kalimantan Tengah	64649.17	69410.99	73724.52	109094.7	113611.5	118682.3
Kalimantan Selatan	96697.84	101850.5	106779.4	142339.2	149226.1	156756.9
Kalimantan Timur	428877.7	438532.9	446029.1	506158.9	537630	570824
Kalimantan Utara	40768.54	44091.7	47696.35	66528.39	69816.76	73007.99
Sulawesi Utara	58677.59	62422.5	66360.76	96768.15	102070.5	107575
Sulawesi Tengah	62249.53	68219.32	71677.53	172624.8	193181.4	212281.5
Sulawesi Selatan	202184.6	217589.1	233988.1	360912.8	377207.8	396141.7
Sulawesi Tenggara	59785.4	64268.71	68291.78	102656.4	108153	113989.5
Gorontalo	17987.07	19367.57	20775.8	30282.21	31643.79	32949.62
Sulawesi Barat	20786.89	22227.39	24195.66	33643.02	35402.56	37088.07
Maluku	21000.08	22100.94	23567.73	33575.07	35322.9	37209.36
Maluku Utara	17120.07	18208.74	19208.76	40248.38	48494.74	55152.33

Papua Barat	44423.34	47694.23	50259.91	62530.53	64975.02	49486.23
Papua Barat Daya	0	0	0	0	0	24873.72
Papua	107890.9	117118.8	121391.2	172907.3	181926.6	51587.16
Papua Selatan	0	0	0	0	0	18963.85
Papua Tengah	0	0	0	0	0	105471.5
Papua Pegunungan	0	0	0	0	0	13798.74

Inflasi per Provinsi di Indonesia (%) tahun 2012-2024

Provinsi			Tahun			
	2012	2013	2014	2022	2023	2024
Aceh	6	639	783	161	41	217
Sumatera Utara	379	1009	824	178	73	212
Sumatera Barat	416	1087	1190	124	9	89
Riau	335	883	853	112	2	125
Jambi	422	874	872	46	27	143
Sumatera Selatan	272	704	838	92	49	12
Bengkulu	461	994	1085	9	126	84
Lampung	430	756	836	104	2	157
Kep. Bangka Belitung	657	871	681	23	64	75
Kep. Riau	392	1009	749	201	209	209
DKI Jakarta	452	800	895	14	59	148
Jawa Barat	402	797	776	79	27	164
Jawa Tengah	485	819	853	128	8	167
DI Yogyakarta	431	732	659	95	3	128
Jawa Timur	439	752	790	106	3	151
Banten	441	916	1127	85	33	188
Bali	471	735	803	241	121	234
Nusa Tenggara Barat	410	927	718	68	1	128
Nusa Tenggara Timur	510	884	832	6	47	119
Kalimantan Barat	662	948	938	15	4	171
Kalimantan Tengah	673	645	663	28	28	103
Kalimantan Selatan	596	698	716	62	25	195
Kalimantan Timur	481	1037	674	21	3	147
Kalimantan Utara	0	0	1191	12	49	129
Sulawesi Utara	604	812	967	25	15	44
Sulawesi Tengah	587	757	885	2	38	129
Sulawesi Selatan	457	624	851	1	109	123
Sulawesi Tenggara	523	592	740	39	22	105
Gorontalo	531	584	614	152	29	79

Sulawesi Barat	328	591	788	32	24	149
Maluku	673	881	681	76	133	128
Maluku Utara	329	978	934	15	16	15
Papua Barat	488	463	570	44	198	253
Papua Barat Daya	452	827	798	36	49	187
Papua	0	0	0	6	81	175
Papua Selatan	0	0	0	45	31	178
Papua Tengah	0	0	0	99	209	327
Papua Pegunungan	0	0	0	455	799	536

Investasi per Provinsi di Indonesia (miliar) tahun 2012-2024

Provinsi			Tahun			
	2012	2013	2014	2022	2023	2024
Aceh	60.2	3636.4	5110.3	4424.2	8883.3	8317
Sumatera Utara	2550.3	5068.9	4223.9	22789.2	21574	22445.7
Sumatera Barat	885.3	677.8	421.1	2559.8	4488.2	7956.3
Riau	5450.4	4874.3	7707.6	43062	48243.3	61097.6
Jambi	1445.7	2799.6	908	8882.7	8939	9986.2
Sumatera Selatan	2930.6	3396	7042.8	23526	25602.4	36671.4
Bengkulu	52.6	109.6	7.8	6957.3	7218.7	7982.5
Lampung	304.2	1325.3	3495.7	5809.2	7625.8	7218.1
Kep. Bangka Belitung	533.5	608.2	615.5	6309	7961.4	15724.8
Kep. Riau	43.5	417.7	28.5	4817.4	8856.6	10017.4
DKI Jakarta	8540.1	5754.5	17811.5	89223.6	95202.1	128402.1
Jawa Barat	11384	9006.1	18726.9	80808.3	88012.9	101552.1
Jawa Tengah	5797.1	12593.6	13601.6	24992.3	32987.2	33298.7
DI Yogyakarta	334	283.8	703.9	2275	5015.5	3630.3
Jawa Timur	21520.3	34848.9	38132	65355.9	74937.4	92410.1
Banten	5117.5	4008.7	8081.3	31283.9	37971.7	47605.8
Bali	3108	2984.7	252.8	6002.1	6950.8	12312.3
Nusa Tenggara Barat	45.4	1398	212.5	11031.5	30766.2	43385
Nusa Tenggara Timur	14.4	17.6	3.6	3459.3	3407.2	2625.5
Kalimantan Barat	2811	2522.1	4320.8	9382.9	14892	15416.1
Kalimantan Tengah	4529.6	1835.3	980.4	6556.8	8779.5	15229.3
Kalimantan Selatan	3509.8	8299.2	2616.5	12310.4	14909.4	16579.3
Kalimantan Timur	5889.3	16034.6	12859	39595.6	52171.7	55078.9
Kalimantan Utara	0	22.4	642.8	7526.4	8199.1	11924.5
Sulawesi Utara	678.5	66.8	83	5042.1	7698.2	5783.9
Sulawesi Tengah	602.8	605.3	95.8	3758.6	4772.5	4593

Sulawesi Selatan	2318.9	921	4949.6	7528	11468.3	8412
Sulawesi Tenggara	907.3	1261.6	1249.9	7596	7734.6	5517.3
Gorontalo	164.9	84.4	45.1	1113.5	3960.1	4003.9
Sulawesi Barat	228.6	685.1	690.1	1313.3	2011.1	2893
Maluku	3.4	0	0	611	1904.5	1569.5
Maluku Utara	320.5	1114.9	156.3	3414.9	6901	9134.8
Papua Barat	45.8	304	100	2139.1	1261.9	1377.9
Papua Barat Daya	0	0	0	0	1708.7	1765.4
Papua	54.7	584.3	249.9	1311.8	1174.1	974.8
Papua Selatan	0	0	0	0	152.5	699.7
Papua Tengah	0	0	0	0	458.8	343.5
Papua Pegunungan	0	0	0	0	121.8	82

Jumlah Tenaga Kerja per Provinsi (Jiwa) di Indonesia tahun 2012-2024

Provinsi			Tahun			
	2012	2013	2014	2022	2023	2024
Aceh	39.83	38.55	40.14	38.55	40.14	39.83
Sumatera Utara	42.65	40.93	41.48	40.93	41.48	42.65
Sumatera Barat	37.45	34.74	35.81	34.74	35.81	37.45
Riau	49.93	45.98	47.87	45.98	47.87	49.93
Jambi	41.65	40.02	40.27	40.02	40.27	41.65
Sumatera Selatan	37.66	36.72	37.03	36.72	37.03	37.66
Bengkulu	33.99	32.46	32.23	32.46	32.23	33.99
Lampung	30.86	28.49	29.33	28.49	29.33	30.86
Kep. Bangka Belitung	48.86	50.37	48.93	50.37	48.93	48.86
Kep. Riau	68.45	63.68	66.33	63.68	66.33	68.45
DKI Jakarta	63.69	63.12	63.77	63.12	63.77	63.69
Jawa Barat	45.61	45.39	44.85	45.39	44.85	45.61
Jawa Tengah	40.36	39.84	39.61	39.84	39.61	40.36
DI Yogyakarta	46.88	46.62	46.22	46.62	46.22	46.88
Jawa Timur	38.51	36.14	36.89	36.14	36.89	38.51
Banten	53.79	52.04	53.69	52.04	53.69	53.79
Bali	49.32	46.57	47.65	46.57	47.65	49.32
Nusa Tenggara Barat	29.49	24.64	27.7	24.64	27.7	29.49
Nusa Tenggara Timur	26.68	24.76	25.49	24.76	25.49	26.68
Kalimantan Barat	43.98	41.23	40.31	41.23	40.31	43.98
Kalimantan Tengah	50.67	48.5	48.14	48.5	48.14	50.67
Kalimantan Selatan	46.44	42.7	44.75	42.7	44.75	46.44
Kalimantan Timur	57.68	55.74	55.33	55.74	55.33	57.68

Kalimantan Utara	49.59	51	48.62	51	48.62	49.59
Sulawesi Utara	44.53	40.85	41.86	40.85	41.86	44.53
Sulawesi Tengah	34.57	32.13	33.9	32.13	33.9	34.57
Sulawesi Selatan	39.5	36.45	37.23	36.45	37.23	39.5
Sulawesi Tenggara	38.08	37.61	38.16	37.61	38.16	38.08
Gorontalo	38.55	35.03	36.27	35.03	36.27	38.55
Sulawesi Barat	27.92	22.75	26.65	22.75	26.65	27.92
Maluku	34.96	36.7	34.58	36.7	34.58	34.96
Maluku Utara	35.24	34.37	33.92	34.37	33.92	35.24
Papua Barat	37.13	39.72	41.45	39.72	41.45	37.13
Papua Barat Daya	43.04	0	0	0	0	43.04
Papua	42.72	15.89	15.57	15.89	15.57	42.72
Papua Selatan	33.16	0	0	0	0	33.16
Papua Tengah	12.98	0	0	0	0	12.98
Papua Pegunungan	4.24	0	0	0	0	4.24

**Produk Domestik Bruto per Kapita (Rupiah) per Provinsi di
Indonesia tahun 2012-2024**

Provinsi			Tahun			
	2012	2013	2014	2022	2023	2024
Aceh	23099.13	23228.59	23129.04	26061.53	26800.13	27684.17
Sumatera Utara	28036.88	29339.21	30477.07	37780.55	39140.19	40576.95
Sumatera Barat	23744.01	24857.64	25982.83	32166.76	33188.07	34167.59
Riau	72396.34	72297.05	72390.88	80773.87	83070.74	84903.25
Jambi	32417.72	34012.1	35878.09	44515.14	46009.74	47500.81
Sumatera Selatan	28577.89	29656.76	30636.27	39723.97	41283.99	42899.93
Bengkulu	18143.51	18919.3	19626.72	24238.47	24952.74	25780.58
Lampung	21794.83	22770.68	23647.27	27973.81	28907.12	29890.63
Kep. Bangka Belitung	31172.42	32081.3	32859.64	38743.13	39907.76	39700.59
Kep. Riau	70930	73743.33	76313.81	89612.57	92869.32	96157.12
DKI Jakarta	123962.4	130060.3	136312.3	183598.5	192134	201315.1
Jawa Barat	23036	24118.31	24966.86	32246.78	33481.96	34801.16
Jawa Tengah	20950.62	21844.87	22819.16	28248.16	29367.22	30534.61
DI Yogyakarta	20183.88	21037.7	21867.9	30410.57	31747.86	33140.14
Jawa Timur	29508.4	31092.04	32703.39	42635.84	44423.32	46295.19
Banten	27716.47	28910.66	29846.64	39790.24	41228.21	42773.59
Bali	26689.58	28129.67	29668.9	34481.06	36203.04	37937.31
Nusa Tenggara Barat	14276.69	14809.84	15369.94	18647.1	18687.2	19379.15
Nusa Tenggara Timur	10030.98	10396.76	10742.32	13264.15	13509.37	13798.45

Kalimantan Barat	21062.22	21971.93	22712.65	26734.57	27560.34	28544.5
Kalimantan Tengah	27749.01	29106.4	30216.73	39856.48	40959.59	42240.24
Kalimantan Selatan	25547.77	26423.9	27220.27	34132.71	35342.1	36682.02
Kalimantan Timur	124501.9	133868.7	133086.1	131238.6	137510.4	141088.5
Kalimantan Utara	0	74106.93	77152.6	92392.97	95638.09	98689.06
Sulawesi Utara	25145.96	26445.86	27805.52	36368.64	38064.2	39816.39
Sulawesi Tengah	22724.47	24490.98	25316.27	56577.06	62584.06	68000.75
Sulawesi Selatan	24507.17	26083.42	27749.47	38975.18	40290.12	41860.47
Sulawesi Tenggara	25489.79	26815.36	27896.05	37956.13	39342.46	40811.51
Gorontalo	16650.27	17639.12	18622.44	25268.51	26083.3	26836.44
Sulawesi Barat	17169.06	18008.81	19232.05	23060.66	23903.25	24672.22
Maluku	13129.11	13572.07	14219.62	17717.1	18392.92	19124.4
Maluku Utara	15691.01	16332.22	16869.52	30526.49	36267.29	40684.15
Papua Barat	55047.84	57581.36	59142.59	53517.07	71924.23	85513.35
Papua Barat Daya	0	0	0	0	38868.79	39662.97
Papua	36280.03	38621.36	39271.88	39112.71	47321.1	48641.84
Papua Selatan	0	0	0	0	33940.07	34983.81
Papua Tengah	0	0	0	0	69566.13	71607.46
Papua Pegunungan	0	0	0	0	9094.7	9405.8

**Tingkat Pengangguran Terbuka (%) per Provinsi di Indonesia
tahun 2012-2024**

Provinsi			Tahun			
	2012	2013	2014	2022	2023	2024
Aceh	9.06	10.12	9.02	6.17	6.03	5.75
Sumatera Utara	6.28	6.45	6.23	6.16	5.89	5.6
Sumatera Barat	6.65	7.02	6.5	6.28	5.94	5.75
Riau	4.37	5.48	6.56	4.37	4.23	3.7
Jambi	3.2	4.76	5.08	4.59	4.53	4.48
Sumatera Selatan	5.66	4.84	4.96	4.63	4.11	3.86
Bengkulu	3.62	4.61	3.47	3.59	3.42	3.11
Lampung	5.2	5.69	4.79	4.52	4.23	4.19
Kep. Bangka Belitung	3.43	3.65	5.14	4.77	4.56	4.63
Kep. Riau	5.08	5.63	6.69	8.23	6.8	6.39
DKI Jakarta	9.67	8.63	8.47	7.18	6.53	6.21
Jawa Barat	9.08	9.16	8.45	8.31	7.44	6.75
Jawa Tengah	5.61	6.01	5.68	5.57	5.13	4.78
DI Yogyakarta	3.9	3.24	3.33	4.06	3.69	3.48
Jawa Timur	4.11	4.3	4.19	5.49	4.88	4.19

Banten	9.94	9.54	9.07	8.09	7.52	6.68
Bali	2.1	1.83	1.9	4.8	2.69	1.79
Nusa Tenggara Barat	5.23	5.3	5.75	2.89	2.8	2.73
Nusa Tenggara Timur	3.04	3.25	3.26	3.54	3.14	3.02
Kalimantan Barat	3.54	3.99	4.04	5.11	5.05	4.86
Kalimantan Tengah	3.14	3	3.24	4.26	4.1	4.01
Kalimantan Selatan	5.19	3.66	3.8	4.74	4.31	4.2
Kalimantan Timur	9.02	7.95	7.38	5.71	5.31	5.14
Kalimantan Utara	0	0	0	4.33	4.01	3.9
Sulawesi Utara	7.98	6.79	7.54	6.61	6.1	5.85
Sulawesi Tengah	3.95	4.19	3.68	3	2.95	2.94
Sulawesi Selatan	6.01	5.1	5.08	4.51	4.33	4.19
Sulawesi Tenggara	4.14	4.38	4.43	3.36	3.15	3.09
Gorontalo	4.47	4.15	4.18	2.58	3.06	3.13
Sulawesi Barat	2.16	2.35	2.08	2.34	2.27	2.68
Maluku	7.71	9.91	10.51	6.88	6.31	6.11
Maluku Utara	4.82	3.8	5.29	3.98	4.31	4.03
Papua Barat	5.42	4.4	5.02	5.37	5.38	4.13
Papua Barat Daya	0	0	0	0	0	6.48
Papua	3.71	3.15	3.44	2.83	2.67	6.48
Papua Selatan	0	0	0	0	0	4.05
Papua Tengah	0	0	0	0	0	2.75
Papua Pegunungan	0	0	0	0	0	1.32

Jumlah Orang Miskin (Jiwa) per Provinsi di Indonesia tahun 2012-2024

Provinsi			Tahun			
	2012	2013	2014	2022	2023	2024
Aceh	18.58	17.72	16.98	14.75	14.45	12.64
Sumatera Utara	10.41	10.39	9.85	8.33	8.15	7.19
Sumatera Barat	8	7.56	6.89	6.04	5.95	5.42
Riau	8.05	8.42	7.99	6.84	6.68	6.36
Jambi	8.28	8.42	8.39	7.7	7.58	7.26
Sumatera Selatan	13.48	14.06	13.62	11.95	11.78	10.51
Bengkulu	17.51	17.75	17.09	14.34	14.04	12.52
Lampung	15.65	14.39	14.21	11.44	11.11	10.62
Kep. Bangka Belitung	5.37	5.25	4.97	4.61	4.52	5.08
Kep. Riau	6.83	6.35	6.4	6.03	5.69	4.78
DKI Jakarta	3.7	3.72	4.09	4.61	4.44	4.14
Jawa Barat	9.89	9.61	9.18	7.98	7.62	7.08

Jawa Tengah	14.98	14.44	13.58	10.98	10.77	9.58
DI Yogyakarta	15.88	15.03	14.55	11.49	11.04	10.4
Jawa Timur	13.08	12.73	12.28	10.49	10.35	9.56
Banten	5.71	5.89	5.51	6.24	6.17	5.7
Bali	3.95	4.49	4.76	4.53	4.25	3.8
Nusa Tenggara Barat	18.02	17.25	17.05	13.82	13.85	11.91
Nusa Tenggara Timur	20.41	20.24	19.6	20.23	19.96	19.02
Kalimantan Barat	7.96	8.74	8.07	6.81	6.71	6.25
Kalimantan Tengah	6.19	6.23	6.07	5.22	5.11	5.26
Kalimantan Selatan	5.01	4.76	4.81	4.61	4.29	4.02
Kalimantan Timur	6.38	6.38	6.31	6.44	6.11	5.51
Kalimantan Utara	0	0	0	6.86	6.45	5.38
Sulawesi Utara	7.64	8.5	8.26	7.34	7.38	6.7
Sulawesi Tengah	14.94	14.32	13.61	12.3	12.41	11.04
Sulawesi Selatan	9.82	10.32	9.54	8.66	8.7	7.77
Sulawesi Tenggara	13.06	13.73	12.77	11.27	11.43	10.63
Gorontalo	17.22	18.01	17.41	15.51	15.15	13.87
Sulawesi Barat	13.01	12.23	12.05	11.92	11.49	10.71
Maluku	20.76	19.27	18.44	16.23	16.42	15.78
Maluku Utara	8.06	7.64	7.41	6.37	6.46	6.03
Papua Barat	27.04	27.14	26.26	21.43	20.49	21.09
Papua Barat Daya	30.66	31.53	27.8	26.8	26.03	18.09
Papua	0	0	0	0	0	0
Papua Selatan	0	0	0	0	0	0
Papua Tengah	0	0	0	0	0	0
Papua Pegunungan	0	0	0	0	0	0

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Nigo Futua
NPM 2105180021
T.T.L : Medan, 07 Mei 2004
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan: Indonesia

2. Data Pendidikan Formal

Tahun 2009-2015 : SD Swasta Kartini Medan
Tahun 2015-2018 : SMP Swasta Al-Ulum Medan
Tahun 2018-2021 : SMA Swasta Al-Ulum Medan
Tahun 2021-2025 : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara